

LAPORAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Pangan Daerah.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 20 Februari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Pangan
Kabupaten Magetan



SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721222 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	5
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	15
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	15
1. Kepegawaian	15
2. Sarana dan Prasarana.....	18
3. Anggaran (setelah perubahan).....	19
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	20
F. LANDASAN HUKUM	25
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026).....	27
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD)	28
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	30
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	34
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)	39
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	40
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	41
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	44
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	54
D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025.....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	72

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	73
1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025	73
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;.....	98
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	111
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;	113
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:	117
B. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN2025	131
C. INOVASI TAHUN 2025	137
D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025	141
BAB IV PENUTUP	145
A. SIMPULAN	145
B. RENCANA AKSI TAHUN 2026	148
LAMPIRAN.....	151
A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD	151
B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD	183
C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya	192
D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya.....	232
E. Pengukuran Kinerja	238
F. Pohon Kinerja	251
G. Rencana Aksi Tahun 2026	252

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2025 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2025 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pangan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan terdiri atas:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pangan.

b. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c) Pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
 - d) Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;

- e) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a) melaksanakan administrasi persuratan;
- b) melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c) melaksanakan urusan keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat; melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
- d) melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang;
- e) melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;
- f) melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- g) melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

b.2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- b) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c) melaksanakan tata usaha keuangan, perjalanan dinas dan gaji pegawai;
- d) memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- f) menyusun laporan keuangan;
- g) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

c. Bidang Tata Lingkungan

1. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan.
3. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan inventarisasi lingkungan hidup;

- b) perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c) penyusunan dokumen RPPLH;
- d) pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJMD, RPJPD dan RTRW berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e) penyusunan status lingkungan hidup;
- f) penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi KLHS;
- g) pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
- h) perencanaan dan penetapan kebijakan konservasi, pemantauan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i) pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelola database keanekaragaman hayati;
- j) penyusunan profil dan pengembangan keanekaragaman hayati;
- k) pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan;
- l) pelaksanaan pembinaan hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan;
- m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Lingkungan; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
3. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3;
 - b) perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c) penyusunan informasi pengelolaan sampah;
 - d) perumusan kebijakan dan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- e) pembinaan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
 - f) penyediaan fasilitas pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
 - g) pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - h) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - i) Pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah oleh pihak lain;
 - j) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - k) penetapan lokasi dan pengawasan terhadap TPS, TPS3R, Transfer Depo, Rumah Kompos, TPST3R dan TPA;
 - l) penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - m) pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - n) pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain/atau pihak ketiga dalam menyelenggarakan pengelola sampah dan limbah B3;
 - o) pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - p) penyusunan kebijakan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh pihak lain;
 - q) penyusunan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan penghargaan terkait lingkungan bersih, hijau dan sehat;
 - r) perumusan penyusunan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - s) perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
 - t) pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - u) pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - v) pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3;
 - w) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - x) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 3. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan (kualitas air, udara, tanah), sumber pencemar, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b) penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
 - c) penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - d) pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - e) pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pemantauan lingkungan dan sumber pencemar;
 - f) perumusan dan pelaksanaan kebijakan kajian dampak lingkungan;
 - g) pengkoordinasian pelaksanaan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - h) pelaksanaan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup;
 - i) penyiapan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - j) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - k) penyusunan inventarisasi GRK;
 - l) penerbitan persetujuan teknis dan SLO bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dan pembuangan emisi;
 - m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c) penyiapan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian persetujuan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan;
 - d) pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - e) pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - f) pengembangan informasi penerapan pengaduan masyarakat;
 - g) pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan seta persetujuan lingkungan;
 - h) pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan;
 - i) penyusunan kebijakan, pengembangan, pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup;
 - j) perumusan dan pelaksanaan kebijakan penghargaan lingkungan hidup;
 - k) penyusunan dan penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
 - l) peningkatan kapasitas dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
 - m) penyusunan profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - n) pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup untuk masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga kemasyarakatan;
 - o) perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- p) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Peanaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Bidang Pangan

1. Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pangan.
3. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan pelaksanaan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c) penyiapan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan supervisi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - f) pelaksanaan pengembangan promosi pemasaran usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal;
 - g) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - h) penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i) penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;

- j) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- k) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- l) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atau pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- m) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pelepasan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
- n) pengembangan sistem informasi pangan dan pengembangan jaringan pasar;
- o) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pangan;
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

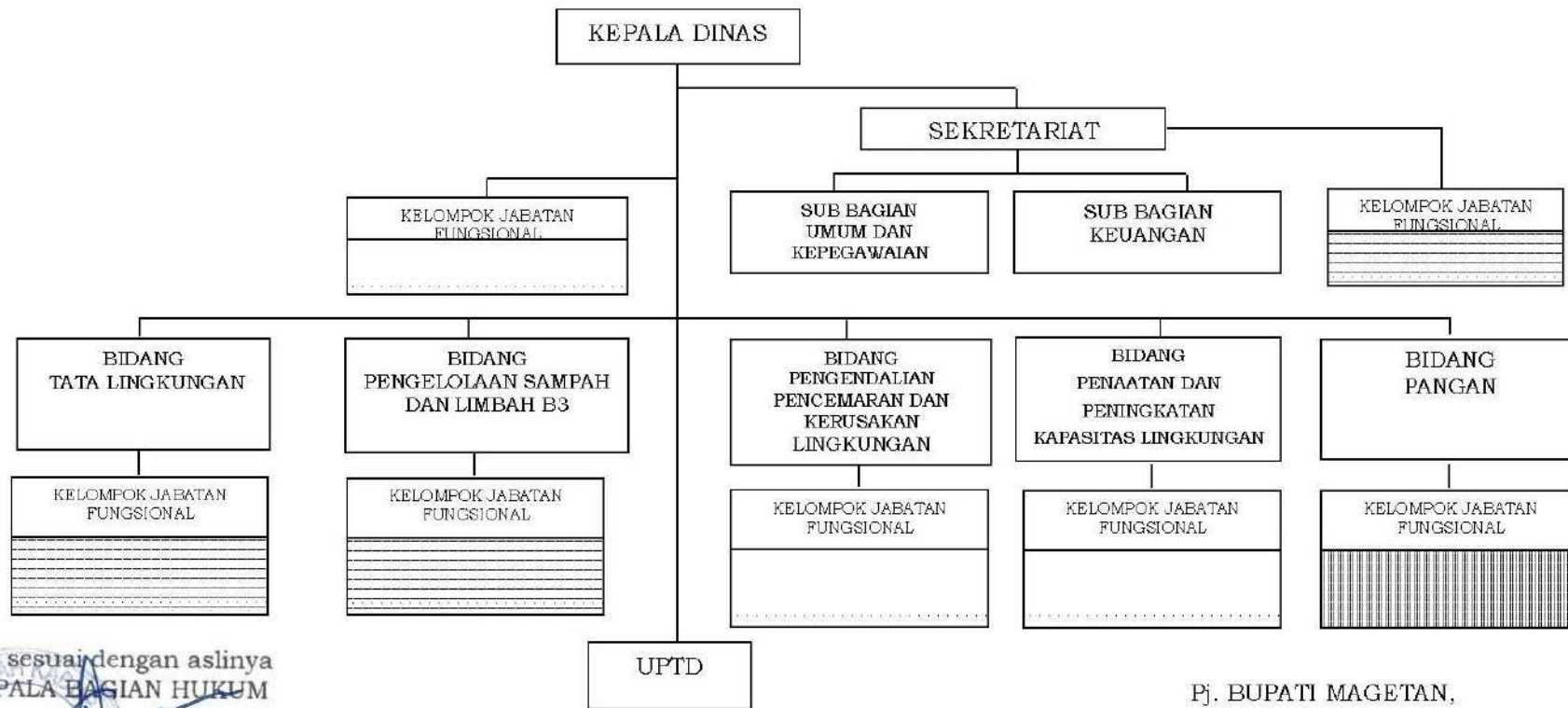
h. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
6. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
7. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas ketua tim dan anggota tim.
8. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim, yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
9. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
 Susunan Organisasi LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
 Kabupaten Magetan
 NOMOR : 10 TAHUN 2024
 TANGGAL : 5 Februari 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN



Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETRAP
 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan pada pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan pangan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan pangan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan didukung oleh pegawai sebanyak 67 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (Orang)	Realisasi (Orang)	Kekurangan/Kelebihan (Orang)
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	0	1
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	1
	Penata Layanan Operasional	1	1	0
	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	2
	JF Perencana Ahli Muda	1	1	0
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0

No.	Jabatan	Kebutuhan (Orang)	Realisasi (Orang)	Kekurangan/Kelebihan (Orang)
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	1
	Penata Layanan Operasional	1	1	0
	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
	Operator Layanan Operasional	5	0	5
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	1
	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0
	Pengadministrasi Perkantoran	3	2	1
	Operator Layanan Operasional	39	5	34
	Pengelola Umum Operasional	2	0	2
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	1	1	0
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1	0
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	5	0	5
	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
	Penata Layanan Operasional	1	1	0
	Pengolah Data Dan Informasi	1	1	0
	Pengadministrasi Perkantoran	10	10	0
	Operator Layanan Operasional	179	15	164
	Operator Alat Berat	3	3	0
	Operator Layanan Operasional	4	4	0
	Pengelola Umum Operasional	9	0	9
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1	0
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	1	0	1
7	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	2
	Penata Layanan Operasional	1	0	1
	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	1
	Operator Layanan Operasional	3	0	3
	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1	0
8	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0

No.	Jabatan	Kebutuhan (Orang)	Realisasi (Orang)	Kekurangan/Kelebihan (Orang)
	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	1
	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	1	1	0
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	1	1	0
9	Kepala Bidang Pangan	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	1
	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
	Operator Layanan Operasional	1	0	1
	Pengelola Umum Operasional	1	0	1
	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	2	2	0
10	Jabatan Fungsional Tertentu			
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	2	0	2
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	2	0	2
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	1	0	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	4	1	3
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	2	0	2
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	12	0	12
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	0	2
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	3	0	3
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	9	0	9
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	5	0	5
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	2	0	2
	JF Perencana Ahli Pertama	1	0	1
	JF Perencana Ahli Madya	1	0	1
	JF Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	5	1	4
	JF Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	5	0	5
	JF Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	2	0	2
	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	2	0	2
	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	1	0	1
	JF Arsiparis Terampil	2	0	2
	JF Arsiparis Mahir	2	0	2
	JF Arsiparis Penyelia	1	0	1
	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
Jumlah		386	76	310

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	-
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1 Orang
3	Pembina Tk.I/IV-b	-
4	Pembina/IV-a	5 Orang
5	Penata Tk.I/III-d	10 Orang
6	Penata/III-c	3 Orang
7	Penata Muda Tk.I/III-b	5 Orang
8	Penata Muda/III-a	14 Orang
9	Pengatur Juru/II-d	14 Orang
10	Pengatur /II-c	15 Orang
11	Pengatur Muda/II-b	-
12	Pengatur/IIa	9 Orang
	Jumlah	76 orang

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	8 Orang
3	Strata 1/Sederajat	21 Orang
4	Diploma	2 Orang
5	SMA/Sederajat	40 Orang
6	SMP/Sederajat	4 Orang
7	SD/Sederajat	-
	Jumlah	76 Orang

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	51 Orang
2	Perempuan	25 Orang
	Jumlah	76 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
per 31 Desember 2025
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Tanah	22.727.244.939,00	-	-	22.727.244.939,00
2.	Peralatan dan Mesin	26.566.098.949,00	413.361.541,00	-	26.979.460.490,00
3.	Gedung dan Bangunan	25.962.194.955,00	765.267.249,00	-	26.727.462.204,00
4.	Jalan,Irigasi dan Jembatan	9.327.703.570,00	394.484.500,00	-	9.722.188.070,00
5.	Aset Tetap Lainnya	70.484.800,00	-	-	70.484.800,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan.	449.070.966,00	-	-	449.070.966,00
7.	Akumulasi Penyusutan.	-	-	-	-
	Jumlah	85.102.798.179,00	1.573.113.290,00	-	86.675.911.469,00

3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025. Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 21.522.682.907,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2025 dan 2026
(Sebelum Penyusutan)

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.732.808.991,96	15.784.832.553,50
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	56.707.500,00	6.850.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	349.991.200,00	122.620.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	580.414.015,00	119.153.500,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	32.059.725,00	37.000.000,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	54.841.185,00	62.475.150,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	278.848.860,00	204.012.500,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.145.761.700,00	916.011.315,00

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	26.328.080,00	22.250.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	25.409.600,00	31.843.750,00
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	5.570.400,00	9.375.000,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	109.335.300,00	101.625.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	18.756.050,00	62.500.000,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.406.200,00	14.375.000,00

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan sesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup masih menghadapi tekanan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran air, udara, dan tanah serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari aspek pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, maupun peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki tren yang fluktuatif. Ditahun 2022 nilai IKLH sebesar 64,78, kemudian turun di tahun 2023 menjadi 64,43. Sedangkan di tahun 2024 tercatat sebesar 67,29, menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih berada dalam kategori “sedang” sehingga memerlukan peningkatan pada aspek pengendalian

pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa komponen penyusun IKLH, seperti Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan, masih menunjukkan nilai yang relatif rendah antara lain Indeks Kualitas Lahan yang berada pada angka 36,72, yang mengindikasikan bahwa kondisi lahan, daya dukung lingkungan dan kualitas ekosistem belum sepenuhnya pulih dan berfungsi optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat upaya konservasi, rehabilitasi lingkungan, serta peningkatan kapasitas pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.

Kualitas Lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang perlu diperhatikan, dipantau dan diupayakan terus untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang.

2. Cakupan Pengelolaan Sampah Belum Merata

Persoalan sampah merupakan isu yang terus dikembangkan solusinya karena jumlahnya semakin bertambah. Permasalahan sampah di Kabupaten Magetan memang sudah ada dan menjadi masalah yang belum benar-benar tuntas. Timbulan sampah berkaitan erat dengan jumlah penduduk, bertumbuhnya pembangunan dan gaya hidup masyarakat. Berubahnya gaya hidup/konsumerisme masyarakat akan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan, selain itu berkembangnya jumlah penduduk berdampak produksi sampah akan semakin meningkat.

Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Magetan secara langsung berdampak pada menurunnya kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Milangasri dalam menampung volume sampah harian, yang rata-rata mencapai $\pm 150\text{--}200\text{ m}^3$ per hari. TPA Milangasri yang dibangun pada Tahun 1997 dengan luas awal 2,5 ha telah mengalami kelebihan kapasitas (overload), sehingga pada Tahun 2011 dilakukan perluasan sebesar 1,5 ha. Perluasan TPA dengan kapasitas itu dibangun dengan asumsi masa pakai TPA selama 8 tahun, kenyataannya kapasitas tersebut tetap tidak mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang terus meningkat. Sebagai upaya lanjutan, pemerintah melakukan perluasan kembali hingga mencapai total luas 4,2 ha. Namun demikian, pada Tahun 2024 kapasitas tampung TPA Milangasri tercatat telah berada pada kondisi kritis dengan sisa daya tampung kurang dari 10% dari kapasitas optimal.

Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Magetan telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan lahan untuk TPA dan sebagai

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang berlokasi di Desa Botok Kecamatan Karas, namun saat ini pembangunan TPA pengganti belum terbangun.

Laju timbulan sampah yang tinggi tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas pengelolaan akhir, sehingga mendorong perlunya strategi pengurangan sampah dari hulu dan pengelolaan yang lebih terintegrasi.

3. Belum Terpenuhinya Target RTH Publik

Pemenuhan atas tutupan lahan masih menjadi permasalahan penting di Kabupaten Magetan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan kebutuhan 20% RTH Publik Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan Kabupaten Magetan adalah seluas 3.529,80 Ha. Pada tahun 2024 yang sudah diinventarisasi ke dalam RTH Publik yaitu seluas 2.810,155 Ha dengan capaian sebesar 15,92%, masih belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih kurangnya identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta perkembangan tata guna lahan selain RTH yang memiliki prioritas lebih baik untuk kemajuan daerah. Dalam rangka pemenuhan RTH publik, salah satunya direncanakan melalui pembangunan Eco Bamboo Park di lahan seluas ±18,5 hektar yang diharapkan dapat menanggulangi kerusakan lahan dan dapat menyerap gas rumah kaca CO₂ sebesar 50 ton/tahun pada 1 hektar tanaman bambu. Selain berfungsi untuk pemenuhan RTH, penanaman bambu ini merupakan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara intensif untuk mengembalikan fungsi tanah.

Pelaksanaan penanaman telah dilaksanakan, namun diperkirakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang baru dapat memenuhi perhitungan tutupan lahan. Pemenuhan RTH publik perlu menjadi perhatian serius melalui perencanaan yang terintegrasi, penguatan kebijakan perlindungan lahan, serta kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, agar keberadaan RTH publik dapat ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

4. Pengembangan diversifikasi pangan alternatif masih rendah

Pengembangan diversifikasi pangan alternatif di Kabupaten Magetan masih tergolong rendah, meskipun pola konsumsi masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin beragam. Hal ini tercermin dari nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, di mana kelompok padi-padian tidak mencapai skor maksimal, sementara kelompok umbi-umbian mampu memenuhi skor maksimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Magetan tidak

sempurnanya bergantung pada beras dan telah memanfaatkan sumber pangan non-beras sebagai bagian dari pola konsumsi sehari-hari.

Namun jika ditinjau dari sisi ketersediaan pangan, hasil analisis neraca bahan makanan menunjukkan bahwa skor PPH pada tingkat ketersediaan belum mencapai skor maksimal pada beberapa kelompok bahan makanan strategis, antara lain umbi umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah-buahan. Padahal, kelompok bahan makanan tersebut justru telah mencapai atau mendekati skor maksimal pada tingkat konsumsi. Adanya kesamaan kelompok bahan makanan yang belum optimal pada PPH ketersediaan maupun PPH konsumsi menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pangan alternatif tersebut belum sepenuhnya dipenuhi dari produksi dan pasokan lokal.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keragaman konsumsi pangan masyarakat Magetan lebih banyak ditopang oleh pasokan dari luar daerah, bukan hasil dari pengembangan sistem pangan alternatif lokal yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun konsumsi pangan masyarakat sudah relatif beragam, pengembangan diversifikasi pangan alternatif di Kabupaten Magetan masih lemah pada aspek penyediaan, produksi, dan penguatan rantai pasok lokal, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan ketersediaan pangan serta ketergantungan terhadap daerah lain dalam jangka panjang.

5. Pemenuhan Konsumsi Pangan pangan belum sesuai

Pemenuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Magetan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar kecukupan gizi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan tahun 2024, rata-rata konsumsi energi penduduk tercatat sebesar 1.992,8 kkal per kapita per hari. Angka tersebut masih berada di bawah standar kecukupan energi yang diharapkan, yaitu sebesar 2.150 kkal per kapita per hari, sehingga menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan energi harian masyarakat.

Di sisi lain, konsumsi protein penduduk Kabupaten Magetan telah mencapai 65,3 gram per kapita per hari, yang berada di atas standar kecukupan protein ideal sebesar 57 gram per kapita per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan protein secara kuantitas relatif sudah memadai, namun belum diimbangi dengan kecukupan asupan energi dari sumber pangan yang beragam dan seimbang.

Ketidaksesuaian antara kecukupan energi dan protein tersebut mengindikasikan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan dari sisi keseimbangan dan keragaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan edukasi gizi, diversifikasi sumber pangan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan seimbang guna mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan secara berkelanjutan.

6. Kerawanan pangan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan memiliki nilai indeks ketahanan pangan (IKP) 75,28 dengan kategori wilayah Tahan Pangan. Dari nilai IKP

tersebut, Kabupaten Magetan mendapatkan peringkat ke-4 di Jawa Timur dan peringkat ke-87 secara Nasional. Jika melihat capaian nilai dan peringkat yang ada, maka Kabupaten Magetan termasuk wilayah yang sudah cukup baik dalam kaitannya dengan ketahanan pangan.

Namun demikian, kewaspadaan dan kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu terjadi keadaan yang tidak diinginkan, kondisi tahan pangan itu tidak bisa dikatakan 100% aman dan kita dituntut untuk senantiasa waspada. Oleh karena itu terdapat sistem yang dijalankan Pemerintah Indonesia yakni Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan tiga aspek indikator yaitu aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan pangan. Namun demikian, permasalahan utama yang sering menjadi kendala adalah ketiadaan data yang dibutuhkan. Selain itu, respon pemenuhan data yang kurang cepat menjadi kendala tersendiri dalam proses pengerjaan aplikasi SKPG maupun proses analisa kondisi kerawanan pangan di wilayah Kabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Magetan tidak hanya bergantung dari satu atau dua instansi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab banyak pihak untuk turut serta bahu membahu merealisasikannya. Ketahanan pangan tidak hanya makanan tersedia, tetapi juga makanan harus bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan dimanfaatkan dengan tepat untuk pemenuhan gizi tubuh sesuai rentang usia.

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang Hasil Pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.202/2024 Tanggal 1 Februari 2024

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan mengalami masa transisi dengan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan Bupati Magetan, Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dengan
Tujuan Bupati Magetan
Tahun 2024-2026

Tujuan ke-4 RPD : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup • Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran ke-4.1.1 RPD : Meningkatkan Kualitas Air • Indikator : Indeks Kualitas Air Sasaran ke-4.1.2 RPD : Meningkatkan Kualitas Udara • Indikator : Indeks Kualitas Udara Sasaran ke-4.1.3 RPD : Meningkatkan Kualitas Lahan • Indikator : Indeks Kualitas Lahan
Tujuan (Renstra) ke-1 : Tujuan OPD: Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan • Indikator : Indeks Kualitas Udara (IKU) • Indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) • Indikator : Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Sasaran (Renstra) ke-1: Meningkatkan tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara • Indikator : Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi • Indikator : Persentase pemenuhan Baku Mutu Air • Indikator : Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara
Sasaran (Renstra) ke-2: Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah • Indikator : Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan
Sasaran (Renstra) ke-3: Meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup • Indikator : Persentase Kelompok/Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan

Tujuan ke-2 RPD : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing • Indikator : Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran ke-2.1 RPD : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat • Indikator : Indeks Kesehatan
Tujuan ke-3 RPD : Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat • Indikator : Persentase Penduduk Miskin
Sasaran ke-3.1 RPD : Menurunnya beban pengeluaran masyarakat • Indikator : Pengeluaran Perkapita
Tujuan (Renstra) ke-2: Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan • Indikator : Indeks Ketahanan Pangan
Sasaran (Renstra) ke-4: Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal • Indikator : Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan • Indikator : Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan
Sasaran (Renstra) ke-5: Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat • Indikator : Skor Pola Pangan Harapan

Tujuan ke-5 RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih • Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran ke-5.2 RPD : Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen pemerintah • Indikator : Nilai SAKIP
Sasaran ke-5.5 RPD : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik • Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran (Renstra) ke-6: Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan • Indikator : Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan • Indikator : Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
Sasaran (Renstra) ke-2: Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah • Indikator : Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD)

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan periode

2024-2026. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA			
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatkan Kualitas Air, udara dan Lahan		Indeks kualitas udara (IKU)		89,92	89,94	89,95	
			Indeks Kualitas Air (IKA)		53,69	53,79	53,89	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)		37,21	37,21	37,21	
		1.1	Meningkatnya Tutupan Lahan Serta Pemenuhan Baku Mutu Air dan Udara.	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan/Vegetasi	%	62,5	62,5	62,5
				Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air	%	100	100	100
				Persentase Pemenuhan Baku Mutu Udara	%	100	100	100
		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	%	99	100	100
1.3	Meningkatnya Kepedulian Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Kelompok/Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	%	53	55	57		
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan		Indeks Ketahanan Pangan		86,37	86,40	86,42	
		2.1	Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan	kkal/kap/hr	6.307	6.308	6.309
				Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan	gr/kap/hr	151.04	151.05	151.06
		2.2	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan		92,8	93	93,2

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
						2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
3		3.1	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan		93,17	93,18	93,19
				Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan		80,25	80,50	80,75

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan periode 2024-2026

Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2024 – 2026

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan	1.1	Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	1.1.1	Meningkatkan kualitas air	1.1.1.1	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
				1.1.2	Meningkatkan kualitas udara	1.1.2.1	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
						1.1.2.2	Meningkatkan/Mengoptimalkan pengawasan emisi kendaraan

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
							bermotor dan industri
				1.1.3	Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi	1.1.3.1	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan vegetasi
						1.1.3.2	Melaksanakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				1.1.4	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	1.1.4.1	Melaksanakan penghijauan disekitar sumber air
				1.1.5	Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan	1.1.5.1	Melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup
		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	1.2.1	Mengoptimalkan upaya penanganan sampah	1.2.1.1	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarpras persampahan
						1.2.1.2	Mengembangkan rencana kerjasama dengan daerah lain dan/ atau pihak ketiga dalam pengelolaan sampah
						1.2.1.3	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah melalui pengembangan teknologi pemrosesan akhir
				1.2.2	Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah	1.2.2.1	Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
						1.2.2.2	Mengembangkan pengelolaan TPS 3R dan bank sampah
						1.2.2.3	Meningkatkan kondisi lingkungan agar memenuhi kriteria kota sehat, bersih dan hijau
		1.3	Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	1.3.1	Meningkatkan penguatan sistem perijinan, pengawasan dan pengamanan SDA dan lingkungan hidup	1.3.1.1	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin/berkala terhadap masalah lingkungan
						1.3.1.2	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran serta pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan
						1.3.1.3	Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan
				1.3.2	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat	1.3.2.1	Pembinaan kader/keompok pelestarian fungsi lingkungan hidup
				1.3.3	Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	1.3.3.1	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan kebudayaan lingkungan(Adiwiyata)
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berlandaskan	2.1	Terpenuhinya kebutuhan pangan	2.1.1	Peningkatan Indeks Ketahanan	2.1.1.1	Pembangunan Sektor pangan

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
	Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan		secara optimal		Pangan		secara inklusif
				2.1.2	Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, meningkatkan produksi pangan, pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan	2.1.2.1	Menjamin ketersediaan pangan
				2.1.3	Penguatan sitem logistik, stabilitas harga pangan di produsen dan konsumen, perluasan akses informasi pangan, penataan kelembagaan pangan yang inklusif	2.1.3.1	Menjamin keterjangkauan pangan
				2.1.4	Penguatan SKPG, penyaluran pangan bergizi, pemenuhan persyaratan gizi pangan dan perluasan akses informasi kerawan pangan dan gizi	2.1.4.1	Penanganan kerawanan pangan secara inklusif
				2.1.5	Integrasi data produksi, ketersediaan/distribusi, kebutuhan dan pemanfaatan informasi iklim/cuaca untuk memperkuat	2.1.5.1	Implementasi teknologi informasi untuk basis data dan informasi pangan

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
					ketersediaan pangan		
		2.2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	2.2.1	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA dan difersifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal	2.2.1.1	peningkatan pemanfaatan pangan berbasis sumberdaya lokal dan pola konsumsi pangan masyarakat
				2.2.2	Penguatan sitem jaminan dan mutu pangan, peningkatan kelembagaan keamanan pangan	2.2.2.1	menjamin keamanan dan mutu pangan
3		3.1	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	3.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik urusan pemerintahan daerah

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
 tahun 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	1.1	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	%	Persentase perbandingan antara luas lahan yang telah tertanami dan memenuhi kriteria tutupan lahan dengan luas lahan yang harus ditanami sesuai ketentuan RTH.	$\frac{\text{Jumlah lahan yang tertanami}}{\text{Jumlah lahan yang harus ditanami}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah lahan yang tertanami= jumlah luas lahan eksisting yang memenuhi kriteria tutupan lahan dengan kerapatan tajuk minimal luas 0,1 hektar Jumlah lahan yang harus ditanami=luas Wilayah kota/ Kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai RTH di Kabupaten Magetan <i>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Laporan pengelolaan tutupan vegetasi (Bidang Tata Lingkungan)
	1.2	Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	%	Persentase jumlah sample dengan minimal status mutu air ringan dibandingkan dengan jumlah seluruh sampel air yang dipantau	$\frac{\text{Jumlah sample dengan minimal status mutu air ringan}}{\text{jumlah total sample air}} \times 100\%$ Keterangan : Status mutu air ringan = air yang mempunyai status kualitas tercemar ringan $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$ = cemar ringan $0 \leq IP_j \leq 1,0$ = baik (memenuhi baku mutu) <i>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Laporan pemantauan kualitas air badan air (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)
		Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	%	Persentase jumlah sampel yang memenuhi baku mutu udara dibandingkan	$\frac{\text{Jumlah sample yang memenuhi baku mutu udara}}{\text{jumlah sample udara}} \times 100\%$ Keterangan: Baku Mutu = baku mutu udara ambien yang berlaku di Indonesia	Laporan pemantauan kualitas udara ambien (Bidang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				dengan jumlah seluruh sampel udara yang dipantau	<p>berdasarkan PP tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> <p>NO₂ = 40 µg/m³ SO₂ = 20 µg/m³</p> <p>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	2.1	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	%	Persentase volume penanganan sampah dibandingkan dengan volume timbulan sampah	$\frac{\text{Volume penanganan dan pengurangan sampah}}{\text{Volume Timbulan Sampah}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Penanganan sampah = $\frac{\text{Volume Sampah yang ditangani dan diangkut ke TPA}}{\text{Volume Timbulan Sampah}} \times 100\%$ Pengurangan sampah = $\frac{\text{Volume sampah yang berkurang dari sumbernya}}{\text{Volume sampah pada sumbernya}} \times 100\%$</p>	Laporan penanganan sampah (Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)
Sasaran 3: Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidu	3.1	Persentase Kelompok/Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	%	Persentase kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dibandingkan dengan jumlah seluruh Lembaga yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Kelompok/Lembaga yg peduli terhadap kelestarian lingkungan}}{\text{Jumlah total Lembaga yang dibina}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Kelompok/ Lembaga = sekolah adiwiyata, ecopesantren dan kelompok pengelola lingkungan yang berhasil mendapatkan penghargaan</p>	Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan)
Sasaran 4: Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	4.1	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan	kcal/kap/hr	rata-rata jumlah energi pangan yang tersedia untuk dikonsumsi per kapita per hari di suatu wilayah, yang dihitung dari total ketersediaan energi pangan dibagi jumlah penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan Energi}}{\sum \text{Penduduk}} \times \frac{1000}{\sum \text{penduduk}} \times \frac{1000}{365}$ <p>Keterangan : Ketersediaan Energi = total energi yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu wilayah \sum Penduduk Tengah Tahun = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun \sum Penduduk = Jumlah total penduduk selama satu tahun</p>	Laporan Analisis Konsumsi Pangan (Bidang Pangan)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	4.2	Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan	gr/kap/hr	Rata-rata jumlah protein pangan yang tersedia untuk dikonsumsi per kapita per hari di suatu wilayah, berdasarkan total ketersediaan protein dan jumlah penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan protein}}{\sum \text{Penduduk tengah tahun}} \times \frac{1000}{\sum \text{penduduk}} \times \frac{1000}{365}$ <p>Keterangan : Ketersediaan Protein = total protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu wilayah \sum Penduduk Tengah Tahun = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun \sum Penduduk = Jumlah total penduduk selama satu tahun</p>	Laporan Analisis Konsumsi Pangan (Bidang Pangan)
Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	5.1	Angka Skor Pola Pangan Harapan terhadap target ketetapan	Skor	Nilai keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat	$\sum \text{Skor PPH Kelompok Pangan } X1...Xi$ <p>Keterangan: Skor PPH Konsumsi = presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dikali dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan</p>	Laporan Analisis Konsumsi Pangan (Bidang Pangan)
Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	6.1	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai	Evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	Nilai SAKIP <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 	Inspektorat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					<p>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan auan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE <p>LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p>	
	6.2	Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Skor	Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	<p>Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$</p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Laporan SKM Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati Magetan
Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD) : Magetan Nyaman, Maju, Dan Berkelanjutan
Misi (RPJMD) ke-7 : Membangun Kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
Tujuan (RPJMD) ke-2 : Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none">• Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran (RPJMD) ke-2.4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none">• Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan (Renstra) ke-1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah <ul style="list-style-type: none">• Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sasaran (Renstra) ke-1 : Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none">• Indikator : Indeks Kualitas Air (IKA)• Indikator : Indeks Kualitas Udara (IKU)• Indikator : Indeks Kualitas Lahan (IKL)• Indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]
Misi (RPJMD) ke-2 : Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
Tujuan (RPJMD) ke-2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none">• Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran (RPJMD) ke-2.3 : Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan

• Indikator: Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
Misi (RPJMD) ke-4 : Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan
Tujuan (RPJMD) ke-4 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat • Indikator: Angka Kemiskinan
Sasaran (RPJMD) ke-4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat • Indikator: Indeks Kesejahteraan Sosial
Tujuan (Renstra) ke-1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah Indikator : Indeks Ketahanan Pangan
Sasaran (Renstra) ke-2 : Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan • Indikator : Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan • Indikator : Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment) • Indikator : Skor PPH Konsumsi

Misi (RPJMD) ke-3 : Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
Tujuan (RPJMD) ke-3 : Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan • Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran (RPJMD) ke-3.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah • Indikator: Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Sasaran (RPJMD) ke-3.4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik • Indikator: Indeks Pelayanan Publik
Tujuan (Renstra) ke-1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah • Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) • Indikator : Indeks Ketahanan Pangan
Sasaran (Renstra) ke-3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan • Indikator : Nilai SAKIP • Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator

dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan periode 2025-2029. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025 - 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70,71	70,79	70,87	70,94	71,02	71,10	
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75,34	75,76	76,23	76,71	77,19	77,67	
		1.1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	69,88	69,98	70,08	70,18	70,28	70,38
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80,88	80,98	81,08	81,18	81,28	81,38
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,34
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks	72,420	72,430	72,440	72,445	72,450	72,460
		1.2	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	%	110	110	110	110	110	110
				Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	Skor	7,81	7,50	7,18	6,87	6,56	6,25
				Skor PPH Konsumsi	Skor	93,90	94,30	94,60	94,90	95,40	95,80
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP	Nilai	93,35	93,36	93,37	93,38	93,39	93,40
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83,03	83,04	83,05	83,06	83,07	83,08

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan periode 2025-2029

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan

arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025 – 2029

VISI : Magetan Nyaman, Maju, Dan Berkelanjutan			
MISI ke- 2 : Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan			
MISI ke- 3 : Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan			
MISI ke- 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
MISI ke- 7 : Membangun Kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah	1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem tata kelola lingkungan hidup dan manajemen persampahan yang inklusif dan partisipatif 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku tata kelola lingkungan hidup dan masyarakat 3. Penguatan dan penegakan regulasi melalui pencegahan dan penindakan oleh lembaga yang didukung SDM aparatur yang kompeten 4. Integrasi teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan dalam implementasi lingkungan hidup pada sistem manajemen lingkungan hidup dan persampahan berbasis partisipasi masyarakat 5. Penguatan sistem manajemen lingkungan hidup dan persampahan berbasis Ekonomi Sirkular secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Konservasi lahan kritis untuk menopang sumber air dan peningkatan tutupan lahan. • Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri • Mengembangkan pengelolaan TPS 3R dan bank sampah untuk ekonomi sirkular masyarakat • Meningkatkan kondisi lingkungan agar memenuhi kriteria kota bersih dan berkelanjutan • Pembinaan dan pengawasan pada usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah. • Peningkatan fasilitas daur ulang sampah dan TPST serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk 3R • Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah melalui pengembangan teknologi pemrosesan akhir • Optimalisasi TPA Milangasri dengan konsep <i>Landfill Mining</i>. • Peningkatan kerjasama dengan Swasta, Perguruan Tinggi, LSM, Media dan Asosiasi/Paguyuban dalam Pengelolaan Sampah. • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah melalui TPS3R dan Bank Sampah • Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui pemenuhan sarpras persampahan • Pengembangan sistem ekonomi sirkular pada manajemen sampah untuk meningkatkan ekonomi warga dan mengurangi timbulan sampah • Penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai dan sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif di kawasan. • Penerapan teknologi pengelolaan

			<p>sampah menjadi energi terbarukan melalui teknologi ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik. • Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah • Penyusunan Dokumen Kedaruratan B3 dan Limbah B3. • Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rekomendasi lingkungan terhadap rencana tata ruang • Melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup • Penyusunan dokumen rencana aksi daerah pengurangan gas rumah kaca (GRK) • Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan daerah tangkapan air. • Penegakan hukum untuk perlindungan ekosistem di wilayah ekowisata • Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin/berkala terhadap usaha/kegiatan/industri yang menimbulkan dampak lingkungan. • Penyusunan regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup • Optimalisasi sinergi Penegakan hukum lingkungan antar sektor • Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran serta pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan • Peningkatan pengendalian dan sosialisasi kesadaran untuk menindaklanjuti ketentuan dalam persetujuan lingkungan hidup dan penanganan limbah dari kegiatan/ usaha. • Pembinaan kader/kelompok pelestarian fungsi lingkungan hidup • Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah adiwiyata dan pesantren. • Pelaksanaan uji emisi kendaraan • Peningkatan sosialisasi tentang kesadaran penghijauan dan penambahan RTH privat. • Penguatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan untuk fungsi ekologis, estetika, dan resapan air. • Pengembangan hutan kota dan taman resapan untuk meningkatkan kapasitas konservasi air tanah • Penguatan ketahanan lingkungan melalui penanaman vegetasi konservasi pada daerah rawan longsor, daerah aliran sungai (DAS), sempadan sungai, embung, dan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas dan kuantitas air
	Terwujudnya	1. Pemerataan akses	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin ketersediaan pangan

	Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	<p>kecukupan pangan bergizi bagi keluarga dan penuntasan daerah rawan pangan melalui diverifikasi pangan alternatif lokal</p> <p>2. Penguatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi, energi dan protein bagi masyarakat berbasis pangan alternatif lokal</p> <p>3. Peningkatan kapasitas masyarakat RT secara inklusif dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan sekitar utk pemenuhan pangan bergizi dan aman</p> <p>4. Penguatan cadangan pangan secara inklusif melalui partisipasi pertanian masyarakat yang intensif dan berkelanjutan</p> <p>5. Penguatan sistem tata kelola pangan bergizi dan aman bagi keluarga secara mandiri dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan pangan berbasis sumberdaya lokal dan pola konsumsi pangan masyarakat • Sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas RT untuk keragaman pangan alternatif berbasis potensi lokal • Pembangunan Sektor pangan secara inklusif • Menjamin keterjangkauan pangan • Penanganan kerawanan pangan secara inklusif • Implementasi teknologi informasi untuk basis data dan informasi pangan • Menjamin keamanan dan mutu pangan
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik urusan pemerintahan daerah

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
 tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN																																
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																														
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	Kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ <p>Keterangan : Nilai IKA dihitung dari 8 parameter yaitu padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Nitrat (NO₃-N), total fosfat (T-P) dan fecal coliform (Fecal Coli)</p> $IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$ <p>W = Faktor Pembobot I = Sub- Indeks</p> <p>Faktor Pembobot masing-masing Parameter untuk perhitungan IKA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Parameter</th> <th>Faktor Pembobot (w)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>pH</td> <td>0,137</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BOD</td> <td>0,133</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>COD</td> <td>0,140</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>TSS</td> <td>0,086</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>DO</td> <td>0,167</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>NO₃-N</td> <td>0,081</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>T-P</td> <td>0,100</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Fecal Coli</td> <td>0,157</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</p>	No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)	1.	pH	0,137	2.	BOD	0,133	3.	COD	0,140	4.	TSS	0,086	5.	DO	0,167	6.	NO ₃ -N	0,081	7.	T-P	0,100	8.	Fecal Coli	0,157	Total		1,000	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup
No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)																																		
1.	pH	0,137																																		
2.	BOD	0,133																																		
3.	COD	0,140																																		
4.	TSS	0,086																																		
5.	DO	0,167																																		
6.	NO ₃ -N	0,081																																		
7.	T-P	0,100																																		
8.	Fecal Coli	0,157																																		
Total		1,000																																		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					<p>Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</p>	
	1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	<p>Kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu</p>	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } PM_{2,5}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$ $\text{Indeks } PM_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata } PM_{2,5}}{\text{Baku Mutu } INA}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin • SO2 mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya • Particulate Matter 2,5 (PM2,5) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan dan konstruksi <p>Baku Mutu INA : Baku mutu udara ambien yang berlaku di Indonesia berdasarkan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> <p>NO2 = 50 µg/m3 SO2 = 45 µg/m3 PM2,5 = 15 µg/m3</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</p>	
1.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	<p>Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut</p>	$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>Keterangan: Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan (yang masuk ke dalam kelas tutupan lahan) dan memasukkan faktor koreksi gambut. IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Faktor Koreksi Gambut Kab. Magetan = 0 (karena tidak memiliki lahan gambut) TL = Tutupan Lahan C = Koefisien Kelas Tutupan Lahan</p>	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																																																																									
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																																																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kelas Tutupan</th> <th>Koefisien (C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Hutan Lahan Kering Primer</td><td rowspan="3">1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hutan Rawa Primer</td></tr> <tr><td>3</td><td>Hutan Mangrove Primer</td></tr> <tr><td>4</td><td>Hutan Lahan Kering Sekunder</td><td rowspan="3">0.9</td></tr> <tr><td>5</td><td>Hutan Rawa Sekunder</td></tr> <tr><td>6</td><td>Hutan Mangrove Sekunder</td></tr> <tr><td>7</td><td>Hutan Tanaman</td><td>0.8</td></tr> <tr><td>8</td><td>Belukar Rawa</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>9</td><td>Belukar</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>10</td><td>Perkebunan</td><td>0.45</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pertanian Lahan Kering Campur</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pertanian Lahan Kering</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>13</td><td>Rawa</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sawah</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>15</td><td>Savanna</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>16</td><td>Transmigrasi</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>17</td><td>Bandara/Pelabuhan</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>18</td><td>Tambak</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>19</td><td>Tubuh Air</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>20</td><td>Tanah Terbuka</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>21</td><td>Permukiman/Lahan Terbangun</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>22</td><td>Pertambangan</td><td>0.05</td></tr> <tr><td>23</td><td>RTH</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>24</td><td>RHL</td><td>0.6</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</i></p>	No.	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	1	Hutan Lahan Kering Primer	1	2	Hutan Rawa Primer	3	Hutan Mangrove Primer	4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9	5	Hutan Rawa Sekunder	6	Hutan Mangrove Sekunder	7	Hutan Tanaman	0.8	8	Belukar Rawa	0.6	9	Belukar	0.4	10	Perkebunan	0.45	11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	12	Pertanian Lahan Kering	0.35	13	Rawa	0.35	14	Sawah	0.35	15	Savanna	0.2	16	Transmigrasi	0.2	17	Bandara/Pelabuhan	0.15	18	Tambak	0.1	19	Tubuh Air	0.1	20	Tanah Terbuka	0.1	21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1	22	Pertambangan	0.05	23	RTH	0.6	24	RHL	0.6	
No.	Kelas Tutupan	Koefisien (C)																																																																										
1	Hutan Lahan Kering Primer	1																																																																										
2	Hutan Rawa Primer																																																																											
3	Hutan Mangrove Primer																																																																											
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9																																																																										
5	Hutan Rawa Sekunder																																																																											
6	Hutan Mangrove Sekunder																																																																											
7	Hutan Tanaman	0.8																																																																										
8	Belukar Rawa	0.6																																																																										
9	Belukar	0.4																																																																										
10	Perkebunan	0.45																																																																										
11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4																																																																										
12	Pertanian Lahan Kering	0.35																																																																										
13	Rawa	0.35																																																																										
14	Sawah	0.35																																																																										
15	Savanna	0.2																																																																										
16	Transmigrasi	0.2																																																																										
17	Bandara/Pelabuhan	0.15																																																																										
18	Tambak	0.1																																																																										
19	Tubuh Air	0.1																																																																										
20	Tanah Terbuka	0.1																																																																										
21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1																																																																										
22	Pertambangan	0.05																																																																										
23	RTH	0.6																																																																										
24	RHL	0.6																																																																										
	1.4 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks	Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik tentang pencapaian pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dihitung berdasarkan aspek: 1. Kebijakan Pengelolaan Sampah 2. SDM Pengelola Sampah 3. Sarana Dan Prasarana (Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah)	Laporan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan																																																																							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				dan sebagai Instrument untuk mengukur keberhasilan Pemerintah daerah dalam mengelola sampah	4. Anggaran Pengelolaan Sampah 5. Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah 6. Acceptability & Implementasi 7. Capaian Terhadap Target Dan Kapasitas 8. Efisiensi Anggaran (Rasio Incremental Capaian Dan Target Per Kelas Anggaran) 9. Kota Bersih (Penilaian Adipura) 10. Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen Dari IKLH. <i>Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup
Sasaran 2 : Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	2.1	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	%	Perbandingan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan per tahun}}{\text{Kebutuhan Pangan per tahun}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Ketersediaan pangan (TS) adalah jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu</p> $TS = O - \Delta St + M - X$ <p>dimana,</p> <p>TS = total penyediaan dalam Negeri (<i>total supply</i>) O = produksi ΔSt = stok akhir – stok awal M = impor X = ekspor</p> <p>Kebutuhan pangan (TU) adalah jumlah pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat agar tercapai pola konsumsi pangan yang cukup, bergizi, dan seimbang sesuai standar gizi</p>	Laporan Neraca Bahan Makanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					<p>TU = F + S + I + W + Fd + Rou dimana, TU = Total penggunaan (<i>total utilization</i>) F = Pakan S = Bibit I = Industry W = Tercecer Fd = Ketersediaan bahan makanan Rou = Penggunaan lain</p> <p>- Rasio $\geq 100\%$ = ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan penduduk. - Rasio $< 100\%$ = menunjukkan potensi kekurangan pangan.</p>	
	2.2	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	Skor	Proporsi penduduk di suatu wilayah sampai level Kabupaten/ Kota yang mengonsumsi kalori kurang dari yang dibutuhkan berdasarkan standa kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase	<p>Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment) adalah Proporsi penduduk yang tidak mendapatkan asupan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat hidup sehat dan aktif</p> $PoU = \int_{x < MDER}^s f(x) d(x)$ $CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$ <p>Keterangan: $f(x)$ = fungsi densitas $CV(x)$ = total simpangan baku $CV(x/v)$ = simpangan baku konsumsi kalori per kapita $CV(x/r)$ = komponen tetap, bernilai 0,179 Sumber : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018)</p>	Laporan Analis Konsumsi Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	2.3	Skor PPH Konsumsi	Skor	Nilai kualitas konsumsi pangan penduduk/ masyarakat, yang menggambarkan tingkat keberagaman pangan dan kecukupan gizi	Langkah dan Formulasi Perhitungan PPH Konsumsi : 1. Pengelompokan pangan 2. Konversi bentuk, jenis dan satuan 3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE) 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE 9. Menghitung Skor PPH 10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan <i>Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	Laporan Analisis Konsumsi Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	3.1	Nilai SAKIP	Nilai	Evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi	Inspektorat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)</p> <p>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</p> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakan lanjut LHE 6. LKJIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 parameter IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025:

Tabel 2.9
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89,94
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53,79
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	37,21
		Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	%	62,5
			Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	%	100
			Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	%	100
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	%	100
Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	Persentase Kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	%	55		
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,40
		Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan	kkal/kap/hr	6.308
			Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan	gr/kap/hr	151,05
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93
		Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai	93,18
			Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Indeks	80,50

Sumber: Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan:

Tabel 2.10
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN (Rp.)
			VOLUME	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Magetan	239	Ton	65.725.000,00
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi OPD pemangku Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten	100	%	65.725.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	93,40	angka	301.242.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan energy dan	6.308	kcal/kap /hr	121.522.000,00
		ketersediaan protein	151,05	gr/kap/hr	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi	1.870	kcal/kap /hr	179.720.000,00
		konsumsi protein	57,5	gr/kap/hr	
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan	100	%	518.104.000,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta FSVA	1	dokumen	15.000.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan	100	%	503.104.000,00
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan waktu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	100	%	43.918.000,00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	12	bulan	43.918.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN (Rp.)
			VOLUME	SATUAN	
		Kabupaten/Kota			
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup	82,7	Indeks	15.651.740.342,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	18	dokumen	73.125.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	93	%	6.871.651.342,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	85	orang	18.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	paket	471.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	laporan	7.695.714.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43	unit	521.250.000,00
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	100	%	65.400.000,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota yang tersusun	1	dokumen	60.400.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun	1	dokumen	5.000.000,00
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan baku mutu air	100	%	355.851.210,00
		Persentase pemenuhan baku mutu udara	100	%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN (Rp.)
			VOLUME	SATUAN	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	dokumen	72.980.210,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	laporan	72.692.000,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	dokumen	210.179.000,00
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Dengan Kondisi Baik	100	%	2.202.617.000,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan Kondisi Baik	5	laporan	2.202.617.000,00
9	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100	%	67.412.000,00
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3	2	dokumen	45.119.000,00
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	1	laporan	22.293.000,00
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	%	40.950.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	2	laporan	40.950.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN (Rp.)
			VOLUME	SATUAN	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan			
11	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase Pengelolaan Kearifan Lokal dan MHA Terkait PPLH	100	%	16.800.000,00
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	lokasi	16.800.000,00
12	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	%	162.600.000,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pendukung Kalpataru dan Adiwiyata	9	dokumen	162.600.000,00
13	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Penghargaan bidang Lingkungan Hidup	100	%	25.250.000,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	kegiatan	25.250.000,00
14	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100	%	22.950.000,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1	dokumen	22.950.000,00
15	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah yang terkelola	100	%	6.045.411.000,00
	Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Pencapaian Target	12	laporan	6.026.060.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN (Rp.)
			VOLUME	SATUAN	
		retribusi persampahan/kebersihan			
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1	dokumen	19.351.000,00
JUMLAH					25.585.970.552,00

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	%	64,5
		Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	%	100
		Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	%	100
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	%	100
3.	Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	Persentase kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	%	55
4.	Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan	kcal/kap/hr	6.310
		Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan	gr/kap/hr	151,05
5.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,65

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai	93,18
		Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Indeks	83,05

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025

D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.12
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			KETERANGAN
			(TUJUAN/ SASARAN)	RENJA 2025	P-RENJA 2025	AKHIR RENSTRA	
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks		70,71	71,10	Renstra 2025-2029
			Indeks Ketahanan Pangan Indeks	86,4	86,4	86,42	Renstra 2025-2029
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah-	Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks	89,94	80,88	81,38	Renstra 2025-2029
			Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks	53,79	69,88	70,38	Renstra 2025-2029
			Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks	37,21	53,33	53,34	Renstra 2025-2029
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS] Indeks	-	72,420	72,460	Renstra 2025-2029
		Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi %	62,5	64,5	62,5	Renstra 2024-2026
			Persentase pemenuhan Baku Mutu Air %	100	100	100	Renstra 2024-2026
			Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara %	100	100	100	Renstra 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			KETERANGAN
			(TUJUAN/ SASARAN)	RENJA 2025	P-RENJA 2025	AKHIR RENSTRA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan %	100	100	100	Renstra 2024-2026
		Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	Persentase Kelompok/Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan %	55	55	57	Renstra 2024-2026
		Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan %	-	110	110	Renstra 2025-2029
			Prevalence of Undernourishment (PoU) Skor	-	7,81	6,25	Renstra 2025-2029
			Skor PPH Konsumsi Skor	-	93,9	95,8	Renstra 2025-2029
		Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan kkal/kap/hr	6.308	6.310	6.309	Renstra 2024-2026
			Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan gr/kap/hr	151.05	151.05	151.06	Renstra 2024-2026

Sumber: Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan:

**Tabel 2.13
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025**

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Magetan	Ton	239	56.707.500,00
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Persentase partisipasi OPD pemangku Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten	%	100	56.707.500,00
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	1	39.108.150,00

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	laporan	3	17.599.350,00
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	angka	93,65	349.991.200,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Ketersediaan energy dan ketersediaan protein	kcal/kap /hr	6.308	221.169.300,00
			gr/kap/hr	151,05	
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	laporan	1	36.704.625,00
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	unit	50	156.107.500,00
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	laporan	30	15.000.000,00
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	13	13.357.175,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi energi;	kcal/kap /hr	1.870	128.821.900,00
		konsumsi protein	gr/kap/hr	57,5	
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1	15.816.600,00
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	113.005.300,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan	%	100	580.414.015,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta FSVA	dokumen	1	7.828.615,00
	Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	dokumen	13	7.828.615,00
	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan	%	100	572.585.400,00

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	12	531.970.100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	laporan	12	40.615.300,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan waktu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	%	100	32.059.725,00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	32.059.725,00
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	7	17.558.225,00
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	laporan	12	14.501.500,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	%	100	54.841.185,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun	dokumen	1	50.841.185,00
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	1	50.841.185,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun	dokumen	1	4.000.000,00
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	4.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan baku mutu air	%	100	278.848.860,00
		Persentase pemenuhan baku mutu udara	%	100	

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	dokumen	2	40.279.060,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1	15.853.250,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	24.425.810,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	laporan	2	46.401.150,00
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	1	11.790.350,00
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	titik	1	34.610.800,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	dokumen	2	192.168.650,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	dokumen	2	192.168.650,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik	%	100	2.145.761.700,00

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	laporan	5	2.145.761.700,00
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	85.262.200,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	41,7	1.189.848.950,00
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	54	711.182.500,00
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	4	159.468.050,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang diselesaikan	%	100	26.328.080,00
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3	dokumen	2	18.334.100,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	8.601.300,00
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	1	9.732.800,00
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	7.993.980,00

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	dokumen	1	7.993.980,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	25.409.600,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	laporan	2	25.409.600,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	1	7.283.500,00
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	11	18.126.100,00
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH	%	100	5.570.400,00
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	lokasi	1	5.570.400,00

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	dokumen	1	5.570.400,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	109.335.300,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata	dokumen	10	109.335.300,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	8	73.196.250,00
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	2	36.139.050,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	18.756.050,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	kegiatan	1	18.756.050,00
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	18.756.050,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	%	100	12.406.200,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	dokumen	1	12.406.200,00

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	pengaduan	8	12.406.200,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola	%	100	2.093.444.101,00
	Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan	laporan	12	2.088.486.886,00
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	430	45.170.325,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	dokumen	1	27.392.450,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	1	279.946.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	1	8.845.250,00
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	41	1.703.132.361,00
	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	laporan	12	24.000.500,00

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	dokumen	1	4.957.215,00
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	laporan	1	4.957.215,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	82,7	15.732.808.991,96
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	dokumen	18	57.255.350,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	11	42.093.400,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	7	15.161.950,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	%	94	7.242.016.851,96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	952	7.235.911.601,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	5	6.105.250,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	orang	85	16.500.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5	16.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket	7	449.667.090,00

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	15.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	283.493.991,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	6.500.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	14.400.559,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	paket	1	31.452.540,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	5.820.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	93.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	3	7.592.553.100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	178.638.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	28.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	7.385.915.100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	43	374.816.600,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	42	250.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	124.816.600,00
JUMLAH					21.522.682.907,96

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 3 bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	69,88
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80,88
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	53,33
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks	72,420
2.	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	%	110
		Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	Skor	7,81
		Skor PPH Konsumsi	Skor	93,90
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai	93,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Indeks	83,03

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kab.Magetan Tahun 2025

Beberapa perubahan kebijakan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan adalah:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja (Induk) tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	64,5%	64,5%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	Persentase kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	55%	58%	105,45%	Sangat Berhasil
Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan	6.310 kkal/kap/hr	6.771,37 kkal/kap/hr	107,31%	Sangat Berhasil
	Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan	151,05 gr/kap/hr	162,49 gr/kap/hr	107,57%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	93,65	93,92	100,29%	Sangat Berhasil
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	93,18	93,35	100,18%	Sangat Berhasil
	Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	83,05	86,89	104,62%	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	69,88	79,16	113,28%	Sangat Berhasil
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,88	79,30	98,05%	Berhasil
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,33	54,63	102,44%	Sangat Berhasil
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	72,420	71,1	98,18%	Berhasil
Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	110%	110%	100%	Sangat Berhasil
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	7,81	8,77	89,05%	Sangat Berhasil
	Skor PPH Konsumsi	93,90	93,92	100,02%	Sangat Berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	93,35	93,35	100%	Sangat Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	83,03	86,89	104,62%	Sangat Berhasil

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah						
	▪ Indeks Kualitas Air (IKA)				69,88	79,16	113,28%
	▪ Indeks Kualitas Udara (IKU)				80,88	79,3	98,05%
	▪ Indeks Kualitas Lahan (IKL)				53,33	54,63	102,44%
	▪ Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]				72,420	71,1	98,18%
	Program (1.1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup	54.841.185,00	54.625.468,00	99,61%			
	Sasaran Program (1.1.) <i>(outcome) Meningkatnya tata kelola pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>						
	Indikator Kinerja Program: ▪ Persentase dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan						
	Kegiatan (1.1.1.) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	50.841.185,00	50.794.769,00	99,91%			
	Sasaran Kegiatan (1.1.1.) <i>(Output)</i> <i>Tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.1.1.1. Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	50.841.185,00	50.794.769,00	99,91%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan (1.2.1.) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	4.000.000,00	3.830.699,00	95,77%			
	Sasaran Kegiatan (1.2.1.) <i>(Output)</i> <i>Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)				1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kabupaten/ Kota yang tersusun						
	1.2.1.1. Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	4.000.000,00	3.830.699,00	95,77%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Program (1.2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	278.848.860,00	277.790.571,00	99,62%			
	Sasaran Program (1.2.) <i>(outcome) Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>						
	Indikator Kinerja Program: Persentase pemenuhan baku mutu air				100 %	100%	100%
	Persentase pemenuhan baku mutu Udara				100 %	100%	100%
	Kegiatan (1.2.1.) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40.279.060,00	40.099.399,00	99,55%			
	Sasaran Kegiatan (1.2.1.) <i>(Output) Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.2.1.2.1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,	15.853.250,00	15.743.149,00	99,31%	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Udara, dan Laut						
	1.2.1.2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	24.425.810,00	24.356.250,00	99,72%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan (1.2.2.) Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	46.401.150,00	45.917.101,00	98,96%			
	Sasaran Kegiatan (1.2.2.) <i>(Output) Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan				2 laporan	2 laporan	100%
	1.2.2.1. Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	11.790.350,00	11.517.400,00	97,68%	1 laporan	1 laporan	100%
	1.2.2.2. Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	34.610.800,00	34.399.701,00	99,39%	1 titik	1 titik	100%
	Kegiatan (1.2.3.) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	192.168.650,00	191.774.071,00	99,79%			
	Sasaran Kegiatan (1.2.3.) <i>(Output) Terlaksananya Pemulihan</i>						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<i>Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 				2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.2.3.1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	192.168.650,00	191.774.071,00	99,79%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Program (1.3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.145.761.700,00	2.048.858.759,00	95,48%			
	Sasaran Program (1.3.) <i>(outcome) Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati</i>						
	Indikator Kinerja Program: Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik				100%	100%	100%
	Kegiatan (1.3.1.) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.145.761.700,00	2.048.858.759,00	95,48%			
	Sasaran Kegiatan (1.3.1.) <i>(Output) Terlaksananya Pengelolaan keanekaragaman hayati</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan:				5 laporan	5 laporan	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan						
	1.3.1.1 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.3.1.2. Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				41,7 Ha	41,7 Ha	100%
	1.3.1.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				54 Unit	54 Unit	100%
	1.3.1.4. Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	100%
	Program (1.4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	26.328.080,00	17.875.806,00	67,90%			
	Sasaran Program (1.4.) <i>(outcome) Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</i>						
	Indikator Kinerja Program: Prosentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang diselesaikan				100%	100%	100%
	Kegiatan (1.4.1.) Penyimpanan	18.334.100,00	11.458.626,00	62,50%			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Sementara Limbah B3						
	Sasaran Kegiatan (1.4.1.) <i>(Output)</i> <i>Terlaksnaanya kegiatan</i> <i>Penyimpanan</i> <i>Sementara Limbah B3</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3				2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 dokumen	1 dokumen	100%
	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 laporan	1 laporan	100%
	Kegiatan (1.4.2.) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.993.980,00	6.417.180,00	80,28%			
	Sasaran Kegiatan (1.4.2.) <i>(Output)</i> <i>Terlaksananya kegiatan</i> <i>Pengumpulan Limbah B3</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	100%
	1.4.2.1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi	7.993.980,00	6.417.180,00	80,28%	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya						
	Program (1.5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	25.409.600,00	24.968.218,00	98,26%			
	Sasaran Program (1.5.) <i>(outcome) Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH</i>						
	Indikator Kinerja Program: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				100%	100%	100%
	Kegiatan (1.5.1.) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.409.600,00	24.968.218,00	98,26%			
	Sasaran Kegiatan (1.5.1.) <i>(Output) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau</i>						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<i>Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan				2 laporan	2 laporan	100%
	1.5.1.1. Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	7.283.500,00	7.088.368,00	97,32%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.5.1.2. Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	18.126.100,00	17.879.850,00	98,64%	11 badan usaha	13 badan usaha	118,18%
	Program (1.6) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	5.570.400,00	5.389.232,00	96,75%			
	Sasaran Program (1.6.) <i>(outcome) Terlaksananya pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH</i>						
	Indikator Kinerja Program: Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH						
	Kegiatan (1.6.1.) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan	5.570.400,00	5.389.232,00	96,75%			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH						
	Sasaran Kegiatan (1.6.1.) <i>(Output)</i> <i>Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				1 lokasi	1 lokasi	100%
	1.6.1.1. Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5.570.400,00	5.389.232,00	96,75%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Program (1.7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	109.335.300,00	106.748.843,00	97,63%			
	Sasaran Program (1.7.) <i>(outcome)</i> <i>Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>						
	Indikator Kinerja Program: Persentase pendidikan,				100%	100%	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat						
	Kegiatan (1.7.1.) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	109.335.300,00	106.748.843,00	97,63%			
	Sasaran Kegiatan (1.7.1.) <i>(Output)</i> <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata				10 dokumen	10 dokumen	100%
	1.7.1.1 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	73.196.250,00	71.301.986,00	97,41%	8 dokumen	8 dokumen	100%
	1.7.1.2. Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	36.139.050,00	35.446.857,00	98,08%	2 lembaga	2 lembaga	100%
	Program (1.8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	18.756.050,00	18.006.198,00	96,00%			
	Sasaran Program (1.8.) <i>(outcome) Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Indikator Kinerja Program: Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup						
	Kegiatan (1.8.1.) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.756.050,00	18.006.198,00	96,00%			
	Sasaran Kegiatan (1.8.1.) <i>(Output)</i> <i>Terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	1.8.1.1. Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18.756.050,00	18.006.198,00	96,00%	1 entitas	1 entitas	100%
	Program (1.9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.406.200,00	12.132.982,00	97,80%			
	Sasaran Program (1.9.) <i>(outcome)</i> <i>Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup</i>						
	Indikator Kinerja Program: Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup				100%	100%	100%
	Kegiatan (1.9.1.) Penyelesaian Pengaduan	12.406.200,00	12.132.982,00	97,80%			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						
	Sasaran Kegiatan (1.9.1.) <i>(Output) Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota				1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.9.1.1. Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12.406.200,00	12.132.982,00	97,80%	8 pengaduan	20 pengaduan	250%
	Program (1.10) Program Pengelolaan Persampahan	2.093.444.101,00	1.832.758.139,00	87,55%			
	Sasaran Program (1.10.) <i>(outcome) Meningkatnya Tata Kelola Persampahan</i>						
	Indikator Kinerja Program: Persentase sampah yang terkelola				100%	100%	100%
	Kegiatan (1.10.1.) Pengelolaan Sampah	2.093.444.101,00	1.832.758.139,00	87,55%			
	Sasaran Kegiatan (1.9.1.) <i>(Output) Terlaksananya pengelolaan sampah</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target				12 laporan	12 laporan	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	retribusi persampahan/kebersihan						
	1.9.1.1. Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				430 kelompok	430 kelompok	100%
	1.9.1.2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.9.1.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 unit	1 unit	100%
	1.9.1.4. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.9.1.5. Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				41 unit	41 unit	100%
	1.9.1.6. Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				12 laporan	12 laporan	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2.	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan						
	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan				110%	110%	100%
	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)				7,81	8,77	89,05%
	Skor PPH Konsumsi				93,90	93,92	100,02%
	Program (2.1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	56.707.500,00	55.071.349,00	97,11%			
	Sasaran Program (2.1.) <i>(outcome) Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</i>						
	Indikator Kinerja Program: Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Magetan				239 ton	239 ton	100%
	Kegiatan (2.1.1.) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	56.707.500,00	55.071.349,00	97,11%			
	Sasaran Kegiatan (2.1.1.) <i>(Output)</i> <i>Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase partisipasi OPD pemangku Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten				100%	100%	100%
	2.1.1.1. Jumlah	39.108.150,00	37.846.999,00	96,78%	1 unit	1 unit	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia						
	2.1.1.2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	17.599.350,00	17.224.350,00	97,87%	3 laporan	3 laporan	100%
	Program (2.2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	349.991.200,00	344.566.102,00	98,45%			
	Sasaran Program (2.2.) <i>(outcome) Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</i>						
	Indikator Kinerja Program: Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan				93,65%	93,67%	100,02%
	Kegiatan (2.2.1.) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	221.169.300,00	218.780.752,00	98,92%			
	Sasaran Kegiatan (2.2.1.) <i>(Output) Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Ketersediaan energy				6.308 kkal/kap/hr	6771,37 kkal/kap/hr	107,35%
	ketersediaan protein				151,05 gr/kap/hr	162,49 gr/kap/hr	107,57%
	2.2.1.1. Pangan	36.704.625,00	36.649.100,00	99,85%	1 laporan	1 laporan	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia						
	2.2.1.2. Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	156.107.500,00	153.892.750,00	98,58%	50 unit	50 unit	100%
	2.2.1.3. Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	100%	30 laporan	30 laporan	100%
	2.2.1.4. Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13.357.175,00	13.238.902,00	99,11%	13 dokumen	13 dokumen	100%
	Kegiatan (2.2.2.) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	128.821.900,00	125.785.350,00	97,64%			
	Sasaran Kegiatan (2.2.2.) <i>(Output) Tercapainya Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Konsumsi energy				1.870 kkal/kap/hr	2.051,34 gr/kap/hr	109,70%
	Konsumsi protein				57,5 kkal/kap/hr	69,7 gr/kap/hr	121,22%
	2.2.2.1. Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	15.816.600,00	15.796.250,00	99,87%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2.2.2.2. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	113.005.300,00	109.989.100,00	97,33%	1 laporan	1 laporan	100%
	Program (2.3) Program Penanganan Kerawanan Pangan	580.414.015,00	565.606.395,00	97,45%			
	Sasaran Program (2.3.) <i>(outcome) Meningkatnya</i>						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<i>penanganan kerawanan pangan</i>						
	Indikator Kinerja Program: Penanganan daerah rawan pangan				100%	100%	100%
	Kegiatan (2.3.1.) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	7.828.615,00	7.599.995,00	97,08%			
	Sasaran Kegiatan (2.3.1.) <i>(Output) Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya peta FSVA				1 dokumen	1 dokumen	100%
	2.3.1.1. Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan				13 dokumen	13 dokumen	100%
	Kegiatan (2.3.2.) Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	572.585.400,00	558.006.400,00	97,45%			
	Sasaran Kegiatan (2.3.2.) <i>(Output) Tertanganinya kerawanan pangan di Kabupaten Magetan</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase intervensi daerah rentan dan rawan panga				100%	100%	100%
	2.3.2.1. Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	531.970.100,00	519.061.850,00	97,57%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	2.3.2.2. Jumlah koordinasi dan	40.615.300,00	38.944.550,00	95,89%	12 laporan	12 laporan	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota						
	Program (2.4) Program Pengawasan Keamanan Pangan	32.059.725,00	31.187.450,00	97,28%			
	Sasaran Program (2.4.) <i>(outcome) Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan</i>						
	Indikator Kinerja Program: Cakupan waktu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan				100%	100%	100%
	Kegiatan (2.4.1.) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	32.059.725,00	31.187.450,00	97,28%			
	Sasaran Kegiatan (2.4.1.) <i>(Output) Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				12 bulan	12 bulan	100%
	2.4.1.1. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.558.225,00	17.234.950,00	98,16%	7 dokumen	7 dokumen	100%
	2.4.1.2. Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	14.501.500,00	13.952.500,00	96,21%	12 laporan	12 laporan	100%
3.	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan				93,35	93,35	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan				83,03	86,89	104,62%
	Program (4.1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.732.808.991,96	15.150.876.629,00	96,30%			
	Sasaran Program (4.1.) <i>(outcome) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup</i>						
	Indikator Kinerja Program: Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup				82,7	82,71	96,30
	Kegiatan (4.1.1.) Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.255.350,00	53.496.352,00	93,43%			
	Sasaran Kegiatan (4.1.1.) <i>(Output) Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu				18 dokumen	18 dokumen	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	4.1.1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.093.400,00	38.447.364,00	91,34%	11 dokumen	11 dokumen	100%
	4.1.1.2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.161.950,00	15.048.988,00	99,25%	7 laporan	7 laporan	100%
	Kegiatan (4.1.2.) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.242.016.851,96	6.926.873.913,00	95,65%			
	Sasaran Kegiatan (4.1.2.) <i>(Output) Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan sesuai dengan Aturan yang Berlaku</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah				94%	95,46%	101,55%
	4.1.2.1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.235.911.601,96	6.920.861.750,00	95,65%	952 orang/bulan	938 orang/bulan	98,53%
	4.1.2.2. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.105.250,00	6.012.163,00	98,48%	5 laporan	5 laporan	100 %
	Kegiatan (4.1.3.) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.500.000,00	16.421.606,00	99,52%			
	Sasaran Kegiatan (4.1.3.) <i>(Output) Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kepegawaian sesuai Prosedur						
	4.1.3.1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000,00	16.421.606,00	99,52%	5 orang	5 orang	100%
	Kegiatan (4.1.4.) Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Sasaran Kegiatan (4.1.4.) <i>(Output) Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.667.090,00	440.716.238,00	98,01	7 paket	7 paket	100%
	4.1.4.1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.000.000,00	14.989.650,00	99,93	1 Paket	1 Paket	100%
	4.1.4.2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	283.493.991,00	275.950.434,00	97,34	1 Paket	1 Paket	100%
	4.1.4.3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.500.000,00	6.499.400,00	99,99	1 Paket	1 Paket	100%
	4.1.4.4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.400.559,00	14.382.300,00	99,87	1 Paket	1 Paket	100%
	4.1.4.5. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	31.452.540,00	30.109.440,00	95,73	1 Paket	1 Paket	100%
	4.1.4.6. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.820.000,00	5.820.000,00	100,00	1 Paket	1 Dokumen	100%
	4.1.4.7. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	93.000.000,00	92.965.014,00	99,96	1 Paket	1 Laporan	100%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Konsultasi SKPD						
	Kegiatan (4.1.5.) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.592.553.100,00	7.378.395.626,00	97,18%			
	Sasaran Kegiatan (4.1.5.) <i>(Output) Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>						
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 laporan	3 laporan	100%
	4.1.5.1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	178.638.000,00	175.767.558,00	98,39%	1 laporan	1 laporan	100%
	4.1.5.2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28.000.000,00	27.978.000,00	99,92%	1 laporan	1 laporan	100%
	4.1.5.3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.385.915.100,00	7.174.650.068,00	97,14%	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan (4.1.6.) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.816.600,00	334.972.894,00	89,37%			
	Sasaran Kegiatan (4.1.6.) <i>(Output) Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				43 unit	43 unit	100%
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-					

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pemerintahan Daerah						
	4.1.6.1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250.000.000,00	212.971.663,00	85,19%	42 unit	42 unit	100%
	4.1.6.2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	124.816.600,00	122.001.231,00	97,74%	1 unit	1 unit	100%

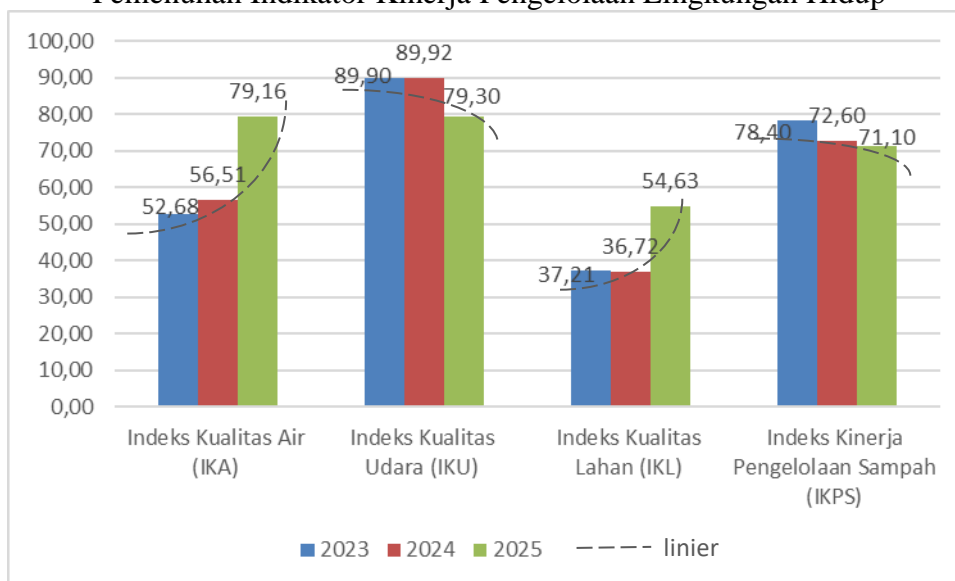
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

**Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,59	52,86	98,64	53,69	56,51	105,25	69,88	79,16	113,28
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,62	89,90	101,44	89,92	93,82	104,34	80,88	79,30	98,05
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	34,77	37,21	107,02	37,22	36,72	98,67	53,33	54,63	102,44
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]		78,4			72,6		72,420	71,1	98,18
Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan							110	110	100
	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)		9,29			11,19		7,81	8,77	89,05
	Skor PPH Konsumsi	89,9	93,4	103,89	93,4	93,6	100,21	93,90	93,92	100,02
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	89	89,45	100,51	93,17	93,16	99,99	93,35	93,35	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	80	82,68	103,35	83	83,02	100,02	83,03	86,89	104,62

a. **Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah**

Gambar 3.1
Pemenuhan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup



Gambar di atas menunjukkan capaian kinerja pada sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah indikator sebanyak 4 buah yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan dan indeks kinerja pengelolaan sampah. Capaian kinerja 4 (empat) indikator pemenuhan kinerja lingkungan hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan menunjukkan tren kenaikan kinerja yang terus meningkat secara moderat dalam 3 tahun terakhir.

- **Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air (IKA)**

Capaian Indeks Kualitas Air menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sepanjang periode 2023–2025. Pada tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Air sebesar 52,68 dan meningkat menjadi 56,51 pada tahun 2024, kemudian di tahun 2025 meningkat menjadi 79,16 (kategori sedang). Secara kumulatif, terjadi kenaikan sebesar 26,48 poin dalam dua tahun, dengan rata-rata peningkatan sekitar 13,24 poin per tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pengelolaan dan pengendalian kualitas air secara berkelanjutan.

Status mutu air digambarkan dengan indeks pencemaran (pollution index) yang merupakan indeks yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diijinkan. Indeks pencemaran dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas air serta

melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki kualitas air jika terjadi penurunan kualitas akibat terdapatnya senyawa pencemar.

Capaian Indeks Kualitas Air menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sepanjang periode 2023–2025. Pada tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Air sebesar 52,68 dan meningkat menjadi 56,51 pada tahun 2024, kemudian di tahun 2025 meningkat menjadi 79,16 (kategori sedang). Secara kumulatif, terjadi kenaikan sebesar 26,48 poin dalam dua tahun, dengan rata-rata peningkatan sekitar 13,24 poin per tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pengelolaan dan pengendalian kualitas air secara berkelanjutan.

Capaian tersebut dikarenakan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation – Water Quality Index (NSF-WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Perhitungan nilai IKA dilakukan dengan mentransformasikan 8 parameter (TSS, DO, pH, BOD, COD, NO₃-N T-P, dan Fecal Coli) ke dalam kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya. Perbedaan pembobotan yang berbeda dari tahun sebelumnya menyebabkan nilai IKA menjadi tinggi. Pemantauan kualitas air dilakukan pada 6 sungai besar di Kabupaten Magetan dengan total pengambilan 96 titik sampel setahun.

Tabel 3.1.1
Lokasi Titik Pantau Pengendalian Pencemaran Air di Kab.Magetan Tahun 2025

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Keterangan
			Lintang	Bujur	
1.	Sungai Gandong	Jembatan Compok Dadi	S 07 °40'58.20"	E : 111°13'45.25"	4 kali pemantauan
2.	Sungai Gandong	Jembatan Dk. Guritan Ds. Sidomukti	S:07 °41'17.25"	E : 111°16'16.69"	4 kali pemantauan
3.	Sungai Gandong	Jembatan Kedung Kalang Sakti	S:07 °39'54.73"	E : 111°18'01.68"	4 kali pemantauan
4.	Sungai Gandong	Jembatan Tempuran Mojopurno	S:07 °39' 52.31"	E : 111°21'59.45"	4 kali pemantauan
5.	Sungai Gandong	Jembatan Darmo Kawedanan	S:07 °40'1.73"	E : 111°25'18.54"	4 kali pemantauan
6.	Sungai Gandong	DAM Gandong Kerik	S:07 °39'35.87"	E : 111°27'27.77"	4 kali pemantauan
7.	Sungai Gandong	Jembatan Madigondo	S:07 °38'55.68"	E : 111°30'35.40"	4 kali pemantauan
8.	Sungai Purwodadi	Jembatan Gangging	S:07 °39'17.18"	E : 111°16'19.40"	4 kali pemantauan
9.	Sungai Purwodadi	Sungai Sadon	S:07 °38'01.88"	E : 111°18'34.54"	4 kali pemantauan
10.	Sungai Purwodadi	Jembatan Temboro	S:07 °35'20.51"	E : 111°24'09.00"	4 kali pemantauan
11.	Sungai Purwodadi	Jembatan Wates	S:07 °37' 0.24"	E : 111°20' 3.64"	4 kali pemantauan
12.	Sungai Purwodadi	DAM Purwodadi	S:07 °33'41.199"	E : 111°26'45.100"	4 kali pemantauan
13.	Sungai Purwodadi	Jembatan PG. Purwodadi	S:07 °34'24.71"	E : 111°25'25.55"	4 kali pemantauan

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Keterangan
			Lintang	Bujur	
14.	Sungai Purwodadi	Jembatan Jurang Tugel Karangmojo/Kartoharjo	S:07 °31'45.42"	E : 111°27'24.63"	4 kali pemantauan
15.	Sungai Beringin	Jembatan Randu Gede	S:07 °41'23.44"	E : 111°17'25.43"	4 kali pemantauan
16.	Sungai Beringin	Jembatan Ngrawuh	S:07 °41'7.83"	E : 111°18'43.59"	4 kali pemantauan
17.	Sungai Beringin	Jembatan Ngrini	S:07 °41'17.85"	E : 111°20'22.11"	4 kali pemantauan
18.	Sungai Beringin	Sungai Banjarejo	S:07 °40'07.11"	E : 111°22' 53.65"	4 kali pemantauan
19.	Sungai Beringin	DAM Bringin	S:07 °41'40.28"	E : 111°25'04.34"	4 kali pemantauan
20.	Sungai Beringin	Jembatan Toro-Takeran	S:07 °42'42.00"	E : 111°28'12.17"	4 kali pemantauan
21.	Sungai Trinil	Jembatan Ploso Trinil	S:07 °62'42.08"	E : 111°30'32.39"	1 kali pemantauan
22.	Sungai Trinil	Jembatan Sedran	S:07 °61'74.98"	E : 111°32'33.1"	1 kali pemantauan
23.	Sungai Trinil	Jembatan Ginuk	S:07 °58'45.66"	E : 111°35'54.19"	1 kali pemantauan
24.	Sungai Trinil	Jembatan Taji	S:07 °58'22.43"	E : 111°36'61.52"	1 kali pemantauan
25.	Sungai Trinil	Jembatan Kuwon	S:07 °56'70.94"	E : 111°37'75.11"	1 kali pemantauan
26.	Sungai Trinil	Jembatan Sumursongo	S:07 °54'72.88"	E : 111°39'74.09"	1 kali pemantauan
27.	Sungai Cangkring	Bendung Jambu	S:07 °71' 75.05"	E : 111°37' 14.56"	1 kali pemantauan
28.	Sungai Cangkring	Jembatan Krowe	S:07 °72' 91.58"	E : 111°36' 83.62"	1 kali pemantauan
29.	Sungai Cangkring	Jembatan Tapen	S:07 °74' 05.68"	E : 111°38' 10.07"	1 kali pemantauan
30.	Sungai Cangkring	Jembatan Kenteng	S:07 °73' 18.6"	E : 111°41' 51.2"	1 kali pemantauan
31.	Sungai Gonggang	Sungai Cileng	S:07 °73' 26"	E : 111° 29' 08.02"	1 kali pemantauan
32.	Sungai Gonggang	Jembatan Tunggur	S:07 °74' 45,24"	E : 111° 32' 55,29"	1 kali pemantauan
33.	Sungai Gonggang	Jembatan Tamanarum	S:07 °74' 82,93"	E : 111° 32' 46,88"	1 kali pemantauan
34.	Sungai Gonggang	Jembatan Kediren	S:07 °75' 82,6"	E : 111° 36' 94,18"	1 kali pemantauan
35.	Sungai Gonggang	Jembatan Lembeyan	S:07 °76' 24,35"	E : 111° 39' 95,43"	1 kali pemantauan
36.	Sungai Gonggang	Jembatan Semen	S:07 °73' 88,6"	E : 111° 44' 97,6"	1 kali pemantauan

Sumber : Analisis Data Primer, 2025

Data Kualitas Air di Kabupaten Magetan Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Laboratorium Kualitas Air Sungai Kabupaten Magetan.

Tabel 3.1.2
Data Kualitas Air di Kabupaten Magetan Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Laboratorium Kualitas Air Sungai Kabupaten Magetan

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang Memenuhi Mutu Air	Baik
Sangat Baik	-	0%
Baik	87	90,6%
Sedang	9	9,4%
Kurang	-	0%
Sangat Kurang	-	0%
Jumlah	96	100%

Sumber : Analisis Data Primer, 2025

Nilai Indeks Kualitas Air yang telah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dari hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air (Pij) di Kabupaten Magetan dihitung dengan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air kelas II diketahui bahwa pada umumnya sungai-sungai di Kabupaten Magetan dari 96 titik sampling tersebut terindikasi memenuhi kategori baik di 87 titik sampling, sebanyak 9 titik sampling masuk kategori sedang, tidak ada titik sampling yang masuk ke dalam kategori kurang dan sangat kurang. Hal ini membuktikan terdapat upaya peningkatan kualitas air di Kabupaten Magetan.

Indeks kualitas air didukung oleh adanya upaya pengelolaan dan pemantauan pencemaran air sungai atau air permukaan di Kabupaten Magetan. Kedepannya, akan terus dilakukan upaya untuk mempertahankan kualitas air dengan meningkatkan pembinaan terhadap usaha/kegiatan skala kecil, menyebarluaskan aksi kali bersih dan mencegah air limbah domestik langsung masuk ke saluran air.

- Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada periode 2023–2025 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2023, IKU tercatat sebesar 89,90 dan meningkat menjadi 93,82 pada tahun 2024 (naik 3,92 poin). Namun, pada tahun 2025 capaian IKU sebesar 79,30 (kategori sedang), terdapat penurunan sebesar 14,52 poin dibandingkan tahun 2024. Penurunan capaian tersebut dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan berdasarkan Berita Acara nomor : BA-16/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL tahun 2024 mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025-2045 dengan Provinsi Jawa Timur.

Pada perhitungan tahun sebelumnya parameter IKU menggunakan 2 parameter yaitu SO₂ dan NO₂. Mulai tahun 2025 perhitungan IKU mengalami perubahan menjadi 3 parameter dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron (PM_{2,5}). Terbatasnya sarana dan sistem pemantauan kualitas udara yaitu alat pengujian kualitas udara parameter PM_{2,5} sehingga data parameter PM_{2,5} bersumber dari citra satelit yang diolah oleh BRIN dengan rata-rata hasilnya melebihi baku mutu.

Secara parameter kualitas udara untuk SO₂ dan NO₂ berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara telah memenuhi baku mutu. Namun demikian, nilai

PM2.5 yang masih melebihi baku mutu memberikan kontribusi terhadap penurunan nilai IKU secara keseluruhan. Konsentrasi PM2,5 yang melebihi baku mutu umumnya dipengaruhi oleh emisi kendaraan bermotor, aktivitas pembakaran (sampah dan biomassa), kegiatan industri/usaha serta debu jalan.

NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya sedangkan Particulate Matter 2.5 (PM2.5) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan, dan konstruksi.

Kondisi penurunan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2025 merupakan pola yang relatif terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang menyampaikan bahwa dengan diberlakukannya metode perhitungan IKU terbaru (penambahan parameter PM2.5) terdapat potensi kerawanan penurunan nilai IKU pada tahun-tahun selanjutnya.

Penurunan nilai IKU tersebut perlu dipahami sebagai dampak dari pengetatan indikator penilaian kualitas udara, bukan semata-mata mencerminkan penurunan kinerja daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan pada penguatan pengendalian sumber emisi, khususnya untuk parameter PM2.5, dan juga mempertahankan capaian parameter SO₂ dan NO₂ yang telah memenuhi baku mutu.

- Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada periode 2023–2025 menunjukkan kenaikan, nilai IKL pada tahun 2023 sebesar 37,21 dan relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 36,72. Pada tahun 2025 terdapat kenaikan capaian IKL menjadi 54,63. Kenaikan tersebut dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan berdasarkan Berita Acara nomor : BA-16/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL tahun 2024 mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025-2045 dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu seluruh kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Dengan diberlakukannya metode perhitungan baru tersebut, capaian IKL tahun 2024 sebesar 36,72 dikonversikan menjadi 53,33 dan ditetapkan sebagai target tahun 2025. Capaian IKL

tahun 2025 sebesar 54,63 menunjukkan kinerja yang melampaui target sekaligus mengalami peningkatan sebesar 1,30 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya setelah konversi.

Perubahan metodologi ini berdampak pada keterbandingan data antar tahun, sehingga peningkatan nilai IKL pada tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan kondisi lahan secara faktual, tetapi juga dipengaruhi oleh penyesuaian cakupan dan bobot penilaian indikator. Karena hasil dari penanaman tidak serta merta dapat menambah luasan tutupan lahan, diperlukan kurang lebih 5 (lima) tahun dalam menambah capaian tutupan lahan.

Dalam rangka peningkatan tutupan lahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan tetap berupaya melakukan penanaman dalam rangka penambahan tutupan lahan setiap tahunnya melalui penambahan dan revitalisasi taman kota serta jalur hijau, optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai RTH, penguatan pengendalian alih fungsi lahan dan kewajiban RTH privat, mendorong pelaksanaan kegiatan gerakan wajib menanam melibatkan masyarakat, sekolah, instansi pemerintah (ASN naik pangkat, CPNS dan P3K), pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala berbasis data tutupan lahan guna meningkatkan capaian IKL pada tahun berikutnya serta diperlukan penguatan kebijakan, perencanaan, dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan secara berkelanjutan

- Capaian kinerja indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari aspek pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumber, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. IKPS menjadi salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pengelolaan sampah di daerah.

Pada periode 2023–2025, capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) mengalami penurunan dari 78,4 menjadi 71,1. Penurunan capaian IKPS pada tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja pengelolaan sampah di daerah, melainkan dipengaruhi oleh perubahan komponen penilaian indikator. Pada tahun 2025, indikator kota bersih tidak dimasukkan dalam perhitungan IKPS karena pada tahun 2025 tidak terdapat penilaian Kota Bersih oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Evaluasi kinerja selanjutnya difokuskan pada penguatan pengurangan dan pengolahan sampah serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Terdapat 10 indikator dalam penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yaitu Kebijakan, Sumber daya Manusia, Sarana dan prasarana, Anggaran, Sosialisasi dan Pemahaman, Acceptability dan Implementasi, Capaian Terhadap Target dan Kapasitas, Efisiensi Anggaran, Kota Bersih (Penilaian Adipura), Nilai Indeks Kualitas Air. Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) ini disusun juga berdasarkan data dan hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Dengan demikian, capaian IKPS merefleksikan kinerja pengelolaan sampah daerah yang dilaporkan secara periodik melalui SIPSN dan telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.3
Capaian Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan

Indikator	Realisasi		
	2023	2024	2025
Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	99,91%	99,93%	100 %

Sumber : <https://sipsn.kemenvh.go.id/>

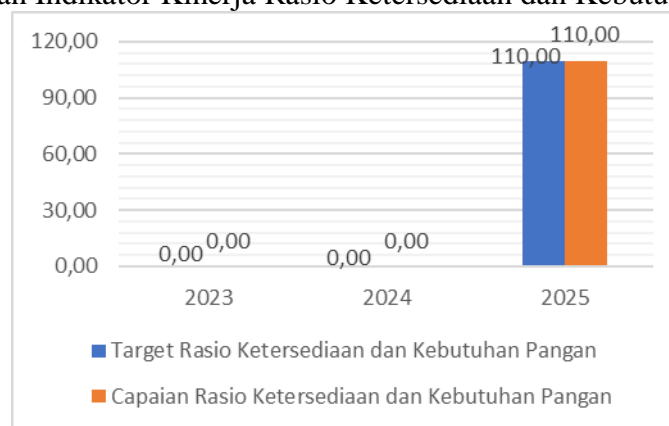
Berdasarkan tabel di atas capaian persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam pengelolaan sampah yang terdiri dari penanganan sampah dan pengurangan sampah. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diukur dengan besaran jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan didapat dari volume sampah yang ditangani di Kecamatan Magetan dibanding dengan Volume Timbulan Sampah Kecamatan Magetan. Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diukur dengan indikator besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengurangan sampah adalah jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat. Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diukur dengan indikator besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah dan yang memanfaatkan kembali di sumber sampah.

Peningkatan pengelolaan sampah menunjukkan terdapat peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber sampah serta kelompok pengelola sampah di Kecamatan Kota Kabupaten Magetan sudah mulai aktif beroperasi melaksanakan pengelolaan sampah, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA berkurang.

b. Sasaran 2. Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan

Gambar 3.2

Pemenuhan Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan

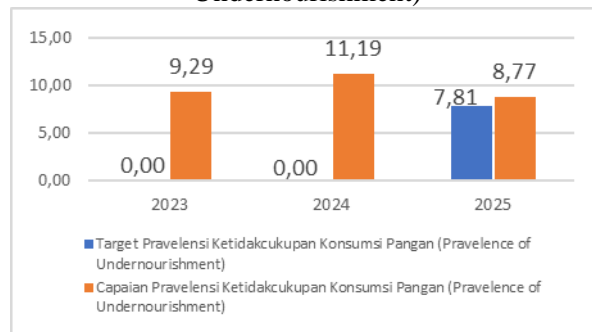


Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kecukupan ketersediaan pangan terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah. Indikator ini mulai ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029, sehingga pada tahun 2023–2024 belum terdapat target maupun capaian kinerja untuk indikator dimaksud.

Pada tahun 2025, sebagai tahun awal penerapan indikator dalam Renstra 2025–2029, ditetapkan target Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan sebesar 110%, dan capaian kinerja tahun 2025 juga tercatat sebesar 110%, sehingga target kinerja pada tahun pertama penerapan indikator dapat tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan daerah secara umum berada pada tingkat yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Untuk selanjutnya, pemantauan dan evaluasi Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan stabilitas ketersediaan pangan serta sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan ketahanan pangan daerah pada periode Renstra 2025–2029.

Gambar 3.3
Pemenuhan Indikator Kinerja Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)



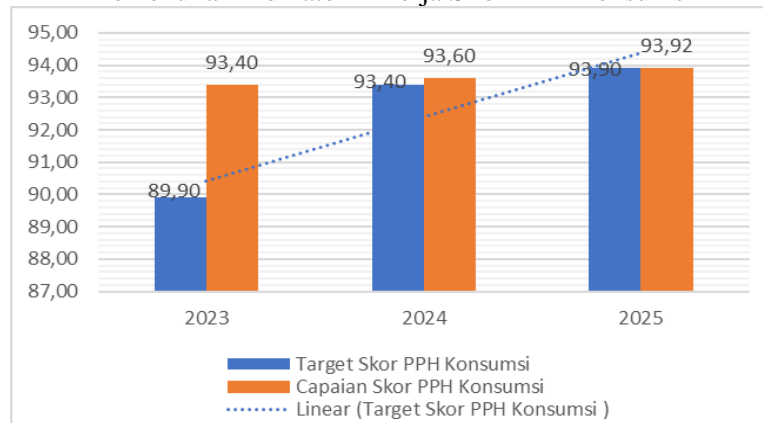
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk yang tingkat konsumsi energinya berada di bawah kebutuhan minimum. Indikator ini digunakan untuk memantau kondisi ketahanan dan kerentanan pangan masyarakat.

Pada periode 2023–2025, capaian indikator menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2023, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tercatat sebesar 9,29%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 11,19%, yang mengindikasikan peningkatan proporsi penduduk dengan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum. Pada tahun 2025, capaian menurun menjadi 8,77%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator ini mulai ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029, sehingga pada tahun 2023–2024 belum terdapat target kinerja. Pada tahun 2025, sebagai tahun awal penetapan target dalam Renstra 2025–2029, ditetapkan target sebesar 7,81%. Capaian tahun 2025 sebesar 8,77% menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai, meskipun telah terjadi perbaikan dibandingkan capaian tahun 2024.

Peningkatan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah meningkatnya angka kemiskinan yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Meskipun pada tahun 2025 terjadi perbaikan capaian, penguatan upaya penurunan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tetap diperlukan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta sinergi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan daerah

Gambar 3.4
Pemenuhan Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi



Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi penyediaan, atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas, maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan hewani, Minyak dan lemak, Buah/biji berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Sayur dan buah.

Pada periode 2023–2025, capaian Skor PPH Konsumsi menunjukkan kinerja yang konsisten berada di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, target Skor PPH Konsumsi sebesar 89,90 dengan capaian 93,40, sehingga target terlampaui. Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 93,40 dengan capaian 93,60, dan pada tahun 2025 target sebesar 93,90 dengan capaian 93,92.

Tabel 3.1.4
Rekap Skor PPH Menurut Kelompok Pangan Tahun 2025

No	Nama Desa/Kecamatan	Skor Pola Pangan Harapan									
		Padi-Padian	Umbi-Umbian	Pangan Hewani	Minyak/Lemak	Buah/Biji Berminyak	Kacang-kacangan	Gula	Sayur/Buah	Lain-lain	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MAGETAN	21,5	2,5	24,0	4,1	1,0	10,0	0,9	30,0	0,0	93,9
1	Parang	23,4	2,5	9,0	5,0	1,0	9,8	0,0	16,8	0,0	67,5
2	Kartoharjo	22,3	1,6	8,2	1,8	1,0	2,9	0,5	30,0	0,0	68,2
3	Plaosan	25,0	2,5	24,0	5,0	1,0	10,0	0,4	30,0	0,0	97,9
4	Karas	25,0	1,2	24,0	0,0	0,2	10,0	0,0	26,1	0,0	86,6
5	Magetan	19,4	2,5	24,0	1,1	1,0	10,0	0,5	30,0	0,0	88,5
6	Nguntoronadi	11,6	2,5	24,0	0,0	1,0	10,0	0,5	30,0	0,0	79,6
7	Poncol	25,0	2,5	15,7	3,0	0,4	10,0	1,2	30,0	0,0	87,7
8	Lembeyan	16,4	2,5	24,0	5,0	1,0	10,0	2,5	30,0	0,0	91,4
9	Takeran	17,5	2,5	20,1	5,0	0,6	9,5	2,1	30,0	0,0	87,3
10	Kawedanan	18,6	2,5	24,0	3,5	1,0	10,0	1,0	30,0	0,0	90,6
11	Ngariboyo	25,0	2,5	24,0	0,0	0,4	10,0	0,0	27,4	0,0	89,3
12	Sidorejo	19,1	2,5	24,0	3,4	1,0	10,0	1,3	30,0	0,0	91,3
13	Pamekan	19,2	2,5	24,0	2,1	1,0	10,0	2,2	27,8	0,0	88,8
14	Sukomoro	23,2	1,4	12,1	5,0	1,0	10,0	1,6	19,1	0,0	73,3
15	Bendo	25,0	2,3	14,3	5,0	0,2	10,0	0,6	14,7	0,0	72,1
16	Maospati	14,4	2,5	24,0	0,0	0,0	7,4	0,0	30,0	0,0	78,3
17	Karangrejo	25,0	1,2	20,8	1,6	0,2	10,0	0,7	15,5	0,0	75,0
18	Barat	21,9	0,4	15,6	5,0	0,7	10,0	1,1	14,2	0,0	69,0
	IDEAL	25,0	2,5	24,0	5,0	1,0	10,0	2,5	30,0	0,0	100,0

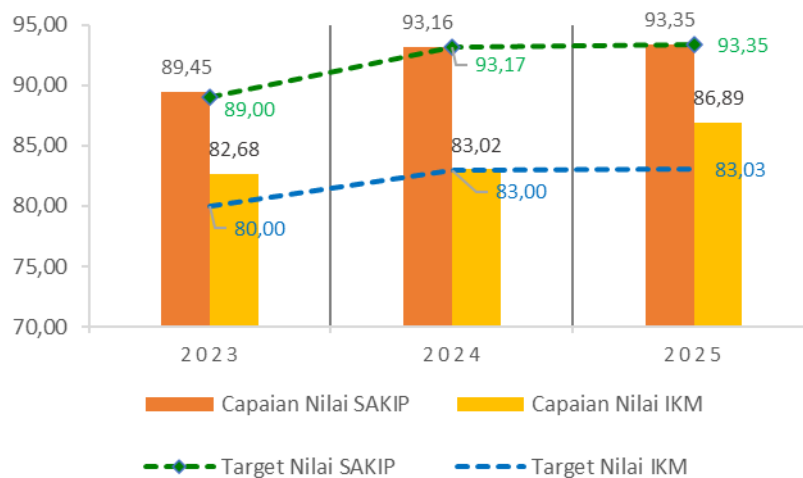
Berdasarkan hasil rekapitulasi skor PPH menurut kelompok pangan di 18 Kecamatan lokasi sampel analisis pangan di Kabupaten Magetan tahun 2025, menunjukkan bahwa nilai skor PPH beberapa jenis komoditi pangan telah memenuhi titik ideal yaitu umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan sayur buah. Sehingga secara umum berdasarkan kelompok pangan telah memenuhi standar ideal, hanya tiga komoditas kelompok pangan yang masih di bawah standar ideal antara lain padi2an, minyak lemak dan gula. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan program penganekaragaman pangan dan pengurangan konsumsi beras maka kegiatan-kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan promosi seperti kegiatan dalam penetapan lokusnya harus tepat sasaran pada Kecamatan yang nilai skor PPHnya masih rendah

Capaian Skor PPH Konsumsi yang secara konsisten melampaui target tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat relatif terjaga dan mengalami perbaikan. Tren target yang meningkat dari tahun ke tahun juga mencerminkan adanya peningkatan standar kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mendorong pola konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi seimbang, dan berkelanjutan.

c. Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Gambar 3.5

Pemenuhan Indikator Kinerja Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan



Indikator kinerja dari Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan terdiri dari Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan serta Indeks kepuasan masyarakat Dinas

Lingkungan Hidup dan Pangan. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dari target yang telah ditetapkan sebesar 93,35, mendapat nilai sebesar 93,35, dengan capaian 100% masuk kedalam kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja **AA (Sangat Memuaskan)** dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Naik dari capaian tahun sebelumnya dengan nilai 93,16.

Peningkatan nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan tahun 2025, terletak pada komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Sedangkan pada komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja mengalami penurunan penilaian. Berdasarkan hasil LHE SAKIP tersebut, akan dilakukan upaya peningkatan khususnya pada poin yang mengalami penurunan penilaian, dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja internal, antara lain melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Nilai Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dari target yang telah ditetapkan yaitu 83,03, mendapatkan hasil sebesar 86,89, sehingga capaian sebesar 104,62%. Survey kepuasan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, dilaksanakan pada Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Pelayanan Penanganan Sampah. Dengan rincian Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Tahun 2025 adalah 87,97 (BAIK), sedangkan Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Tahun 2025 adalah 85,81 (BAIK). Hasil yang didapatkan secara umum pelayanan di Dinas lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan sudah cukup baik dan lebih meningkat dari tahun sebelumnya terutama pada unsur pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan, biaya/ tarif serta sistem, mekanisme dan prosedur.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	79,16	70,38	112,48
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,30	81,38	97,44
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	54,63	53,34	102,42
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	71,1	72,460	98,12
2.	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	110%	110%	100
		Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	8,77	6,25	71,27
		Skor PPH Konsumsi	93,92	95,80	98,04
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	93,35	93,40	99,95
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	86,89	83,08	104,59

Sasaran Strategis 1, Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah. Capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir Renstra menunjukkan hasil yang relatif baik dengan tingkat kemajuan yang bervariasi pada masing-masing indikator. Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 79,16 atau 112,48% dari target akhir Renstra (70,38), yang menunjukkan capaian telah melampaui target. Indeks Kualitas Lahan (IKL) mencapai 54,63 atau 102,42% dari target akhir Renstra (53,34), sehingga target akhir Renstra juga telah terlampaui.

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai 79,30 atau 97,44% dari target akhir Renstra (81,38), kurang 2,08 poin untuk mencapai target akhir renstra. Sedangkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) mencapai 71,10 atau 98,12% dari target akhir Renstra (72,46), sehingga kurang 1,36 poin untuk melampaui target akhir Renstra. Kedua indikator tersebut menunjukkan capaian yang mendekati

target akhir Renstra, namun masih memerlukan penguatan upaya untuk mencapai target sepenuhnya. Capaian IKU dipengaruhi oleh pengetatan metode perhitungan dengan penambahan parameter PM2.5, sedangkan capaian IKPS dipengaruhi oleh perubahan komponen penilaian, yaitu tidak dimasukkannya indikator kota bersih pada tahun 2025.

Sasaran Strategis 2, Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan. Pada sasaran ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan, Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan pada tahun 2025 telah mencapai 110% atau 100% dari target akhir Renstra, yang menunjukkan bahwa target akhir Renstra telah tercapai.

Untuk indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, capaian tahun 2025 sebesar 8,77 dibandingkan target akhir Renstra 6,25, sehingga tingkat kemajuan mencapai 71,27%, kurang 2,52 poin dari target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa target penurunan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan belum tercapai dan masih memerlukan penguatan intervensi, khususnya pada kelompok rentan.

Sementara itu, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mencapai 93,92 atau 98,04% dari target akhir Renstra (95,80), sehingga kurang 1,88 poin dari target akhir Renstra, hal tersebut menunjukkan capaian mendekati target akhir dan memerlukan peningkatan berkelanjutan dalam upaya diversifikasi dan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan. Pada sasaran peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik, Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan mencapai 93,35 atau 99,95% dari target akhir Renstra (93,40), yang menunjukkan capaian sangat mendekati target akhir Renstra, sehingga perlu meningkatkan nilai sebesar 0,05 poin.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan mencapai 86,89 atau 104,59% dari target akhir Renstra (83,08), sehingga target akhir Renstra telah terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah dirasakan baik oleh masyarakat.

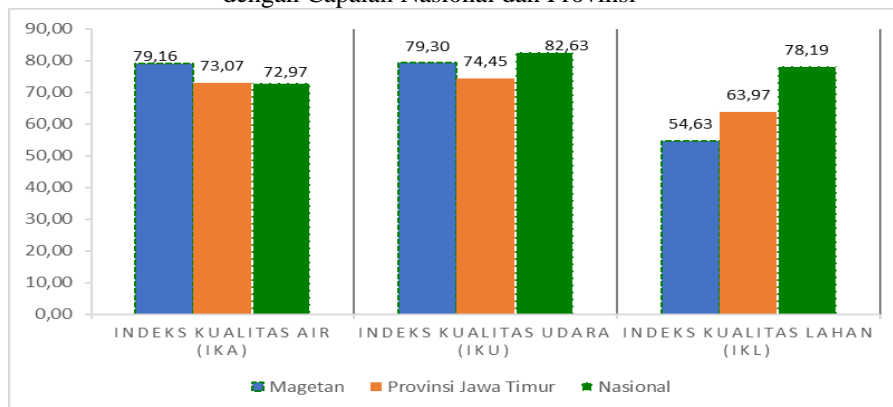
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	79,16	72,97	108,48
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,30	82,63	95,97
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	54,63	78,19	69,87
2.	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	8,77	7,89	89,97
		Skor PPH Konsumsi	93,92	95,1	98,76

Sasaran Strategis 1, Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah.

Gambar 3.6
Perbandingan nilai IKA, IKU dan IKL tahun 2025 dengan Capaian Nasional dan Provinsi



Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magetan pada tahun 2025 adalah sebesar 79,16 masuk dalam kategori “baik”. Nilai indeks kualitas air diatas capaian Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sebesar 73,07 dan capaian Nasional tahun 2025 sebesar 72,97. Nilai IKA Provinsi atau Kabupaten/ Kota diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya. Sedangkan nilai IKA Nasional diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian IKA Provinsi dengan faktor koreksi berupa proporsi luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing

Provinsi dibandingkan dengan wilayah dan jumlah penduduk Nasional. Jadi dalam perhitungan IKA dilakukan tahap-tahap kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk atau situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Magetan pada tahun 2025 adalah sebesar 79,30 dengan status “Sedang”. Capaian tersebut diatas capaian IKU Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yaitu 74,45 namun dibawah capaian IKU Nasional tahun 2025 yaitu 82,63. Nilai IKU mulai tahun 2025 dihitung berdasarkan 3 parameter yaitu SO₂, NO₂ dan PM_{2,5}. Dimana data parameter PM_{2,5} bersumber dari citra satelit yang diolah oleh BRIN dengan rata-rata hasilnya di melebihi mutu. Di Jawa Timur hampir seluruh Kabupaten/ Kota termasuk Provinsi Jawa Timur nilai IKU tidak mencapai target yang ditentukan, hanya 3 daerah saja yang mencapai target yaitu Lamongan, Malang dan Pasuruan.

Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO₂, NO₂ dan PM_{2,5} tahunan Provinsi dengan cara menghitung rata-rata konsentrasi tahunan Kabupaten/ Kota, sedangkan menghitung nilai IKU Nasional dengan cara mengalikan nilai IKU provinsi dengan bobot provinsi yang merupakan perbandingan kontribusi luas daerah provinsi dan jumlah penduduk provinsi dibanding luas wilayah Indonesia dan jumlah total penduduk Indonesia. Nilai indeks kualitas udara Provinsi/ Nasional merupakan nilai komulatif dari Kabupaten/ Kota. Jika nilai indeks kualitas udara di Kabupaten/ Kota rendah, nilai indeks kualitas udara Provinsi dan Nasional juga rendah. Artinya kombinasi nilai indeks kualitas udara di Kabupaten/ Kota mempengaruhi tinggi rendahnya nilai IKU Provinsi dan Nasional.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Magetan Tahun 2025 sebesar 54,63, masih dibawah capaian Indeks Kualitas Lahan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yaitu 63,97 dan IKL Nasional pada tahun 2025 yaitu 69,87. Namun nilai IKL Kabupaten Magetan meningkat dari tahun 2024 sebesar 1,30 poin, dengan capaian sebelumnya yaitu 53,33 (hasil konversi dari capaian sebesar 36,72). Nilai IKL Nasional dihitung berdasarkan wilayah hutan Negara sedangkan wilayah Kabupaten/ Kota dihitung berdasarkan tutupan lahan di luar kawasan hutan/ ruang terbuka hijau. Selain itu terdapat perubahan metode perhitungan yaitu semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Dalam upaya peningkatan tutupan lahan/ vegetasi dampak yang diperoleh tidak

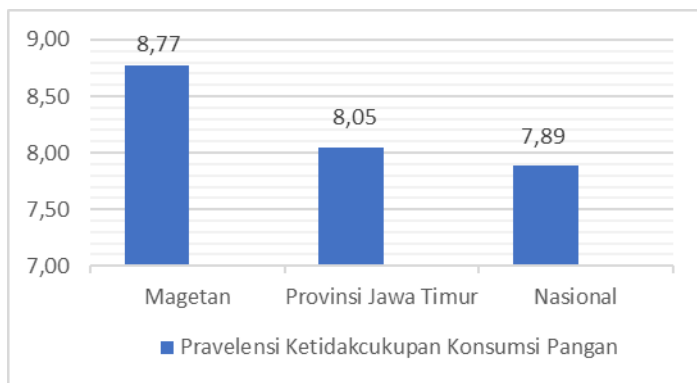
secara langsung dirasakan dan membutuhkan waktu untuk menambah nilai kualitas tutupan lahan.

Sasaran Strategis 2, Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan.

a. Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)

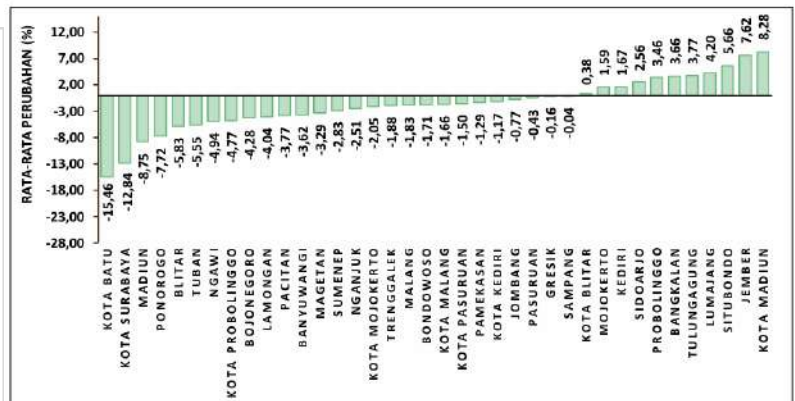
Gambar 3.6

Perbandingan Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment) dengan Capaian Nasional dan Provinsi



Gambar 3.7

Persentase Rata-Rata Perubahan Angka PoU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2025



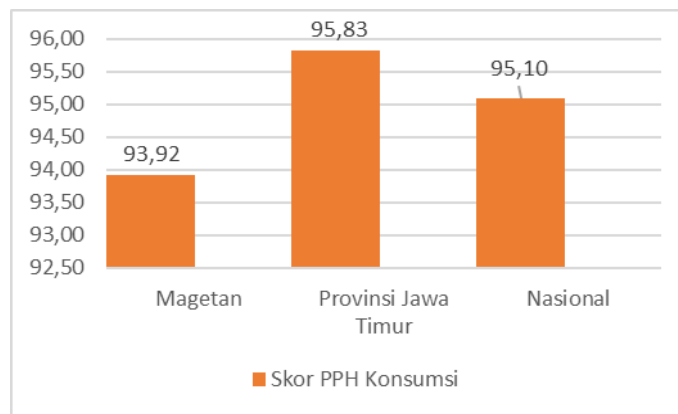
Pada tahun 2025, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Magetan yaitu sebesar 8,77. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Magetan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 8,05 maupun angka nasional sebesar 7,89. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja ketahanan konsumsi pangan di Kabupaten Magetan masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, kinerja Kabupaten Magetan berada pada kelompok menengah. Daerah dengan capaian terbaik (PoU terendah) adalah Kota Surabaya sebesar 1,90%, yang menunjukkan akses dan kecukupan konsumsi pangan masyarakat relatif sangat baik. Sedangkan PoU tertinggi di Provinsi Jawa Timur terdapat di Kabupaten Situbondo sebesar 17,22%, yang mengindikasikan tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Dibandingkan dengan kedua daerah tersebut, posisi Kabupaten Magetan dengan PoU 8,77% berada di atas capaian terbaik (Surabaya) namun masih lebih baik dibandingkan daerah dengan PoU tertinggi (Situbondo). Secara komparatif, capaian Kabupaten Magetan berada pada posisi menengah di antara kabupaten/kota di Jawa Timur, masih di atas daerah dengan PoU tertinggi namun belum menyamai capaian daerah dengan PoU terendah

Peningkatan PoU di Kabupaten Magetan tidak terlepas dari faktor sosial ekonomi, antara lain meningkatnya angka kemiskinan yang berdampak pada menurunnya daya beli dan keterjangkauan pangan rumah tangga, khususnya pada kelompok rentan. Kondisi ini berkontribusi terhadap masih tingginya proporsi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan

b. Skor PPH Konsumsi

Gambar 3.8
Perbandingan Skor PPH Konsumsi dengan Capaian Nasional dan Provinsi



Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberagaman dan keseimbangan pola konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan tabel perbandingan di atas, Skor PPH Konsumsi Kabupaten Magetan sebesar 93,92, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 95,83 dan angka nasional sebesar 95,10. Pola konsumsi energi untuk penduduk di Kabupaten Magetan berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan di Kabupaten Magetan tahun 2025 sebesar 2.051,34 kkal/kapita/hari dan konsumsi protein 69,66 gr/kapita/hari. Dengan pola konsumsi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi energi masih berada *di bawah* batas nilai standar kecukupan yang diharapkan yaitu 2.150 kkal/kap/hari, sedangkan untuk konsumsi protein telah berada *di atas* kondisi ideal sesuai yang ditetapkan 57 gram/kap/hari.

Kondisi keragaman pangan Kabupaten Magetan berdasarkan analisis konsumsi pangan tahun 2025 secara umum berdasarkan kelompok pangan telah memenuhi standar ideal, hanya tiga komoditi kelompok pangan yang masih di bawah standar ideal, yaitu : padi-padian, minyak lemak, dan gula. Namun komposisi keragaman pangan di Kabupaten Magetan tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar 0,32 poin yaitu dari 93,60 menjadi 93,92, hal ini

menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Magetan relatif baik namun masih perlu ditingkatkan untuk dapat mencapai rata-rata di tingkat provinsi dan nasional. Upaya peningkatan akan difokuskan pada penguatan diversifikasi pangan lokal, edukasi gizi seimbang, serta pemantapan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan beragam

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Tabel 3.8
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	69,88	79,16	113,28%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah. 2. Penguatan peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang belum mengelola limbah secara baik. 3. Pemantauan kualitas lingkungan secara berkala sebagai upaya untuk mempertahankan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang 4. Pencegahan setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan melalui dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) 5. Meningkatkan ketaatan usaha/ kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan 6. Penertiban usaha dan/ atau kegiatan disekitar DAS 7. Pembinaan pengendalian pencemaran air kepada masyarakat dan sektor usaha dan/ atau kegiatan 8. Pengendalian pencemaran dengan pengembangan teknologi pengolah air limbah
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,88	79,30	98,05%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah penduduk/ rumah tangga mengakibatkan peningkatan aktivitas rutin seperti bahan bakar untuk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
					<p>proses produksi, pembakaran sampah, penguraian zat organik dari penumpukan sampah dan mobilisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sektor usaha/industri menyebabkan emisi polutan udara semakin besar 3. Terbatasnya sarana dan sistem pemantauan kualitas udara yaitu alat pengujian kualitas udara parameter PM2,5 4. Data parameter PM2,5 bersumber dari citra satelit yang diolah oleh BRIN dengan rata – rata hasilnya melebihi baku mutu 5. Banyaknya pemotongan pohon sepanjang jalan raya
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,33	54,63	102,44%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Integrasi isu lingkungan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga peningkatan tutupan lahan menjadi bagian dari arah pembangunan) 2. Peningkatan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati 3. Upaya peningkatan Tutupan Lahan di Kabupaten Magetan dengan penambahan pohon pada Ruang Terbuka Hijau antara lain melalui kegiatan penanaman pohon di hutan kota dan penanaman pohon di sekitar sumber mata air, kanan kiri jalan (KAKIJA), daerah tangkapan air (DTA) dan kanan kiri sungai (KAKISU) 4. Pengendalian dan pengawasan usaha yang tidak sesuai dengan tata guna lahan 5. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam peraturan daerah dan peraturan Bupati. 6. Partisipasi masyarakat dan komunitas lingkungan, termasuk kader lingkungan, sekolah, dan lembaga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
					keagamaan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi.
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	72,420	71,1	98,18%	1. Meningkatnya kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber sampah
Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	110%	110%	100%	1. Produksi pangan meningkat 2. Harga pangan tingkat produsen baik 3. Inflasi Pangan terkendali
	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	7,81	8,77	89,05%	1. Meningkatnya angka kemiskinan 2. Menurunnya daya beli masyarakat 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan
	Skor PPH Konsumsi	93,90	93,92	100,02%	1. Sumber bahan pangan tersedia melimpah dan beragam 2. Pekarangan Rumah Luas Jarang Dimanfaatkan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	93,35	93,35	100%	1. Pendampingan dan evaluasi berkala terhadap perencanaan dan pelaporan kinerja 2. Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. 3. Komitmen pimpinan dan keterlibatan aktif seluruh SDM dalam penerapan SAKIP
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	83,03	86,89	104,62%	1. Komitmen petugas layanan dalam memberikan pelayanan yang responsif dan ramah. 2. Kejelasan standar pelayanan dan alur layanan kepada masyarakat. 3. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai. 4. Koordinasi lintas bidang dalam penanganan pengaduan masyarakat. 5. Pemanfaatan media informasi dan kanal pengaduan layanan

Dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diperjanjikan tentunya tidak lepas dari adanya factor – factor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil analisis mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dicantumkan dalam tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja. Hasil analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis pertama didorong oleh penguatan pengendalian pencemaran melalui pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, pembinaan pengelolaan limbah, serta penerapan instrumen perizinan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL). Upaya ini diperkuat dengan pengendalian sumber pencemar udara, optimalisasi pengelolaan sampah, dan penambahan ruang terbuka hijau melalui penanaman pohon. Selain itu, integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan (KLHS), penguatan konservasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen kebijakan pemerintah daerah turut mendukung peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
2. Penyebab belum tercapainya kinerja sasaran strategis pertama yaitu pada indikator Indeks Kualitas Udara antara lain dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan sistem pemantauan kualitas udara yaitu alat pengujian kualitas udara parameter PM_{2,5}. Data parameter PM_{2,5} yang digunakan bersumber dari citra satelit yang diolah oleh BRIN dengan rata-rata hasilnya melebihi baku mutu. Konsentrasi PM_{2,5} yang melebihi baku mutu umumnya dipengaruhi oleh emisi kendaraan bermotor, aktivitas pembakaran (sampah dan biomassa), kegiatan industri/usaha serta debu jalan
3. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis kedua yaitu terwujudnya ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Produksi pangan yang cenderung meningkat serta harga pangan di tingkat produsen yang relatif baik mendorong keberlanjutan usaha tani dan menjaga pasokan pangan daerah. Kondisi ini turut memperkuat ketersediaan pangan yang berada pada tingkat baik dan relatif tinggi.

Selain itu, inflasi pangan yang terkendali berkontribusi terhadap terjaganya keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, sehingga akses masyarakat terhadap pangan pokok tetap terpelihara. Ketersediaan bahan pangan yang melimpah dan beragam, didukung oleh keragaman sumber daya pangan yang dapat dibudidayakan, memperkuat diversifikasi produksi pangan daerah serta memperluas pilihan konsumsi pangan masyarakat.

Kombinasi antara peningkatan produksi, stabilitas harga, keterkendalian inflasi pangan, serta ketersediaan sumber pangan yang beragam menjadi faktor utama yang mendorong terwujudnya ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan di daerah.

4. Penyebab belum tercapainya kinerja indikator sasaran strategis kedua yaitu Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Meningkatnya angka kemiskinan berdampak langsung pada keterbatasan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat berada pada kelompok rentan pangan.

Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat akibat tekanan kondisi ekonomi turut memengaruhi akses terhadap pangan, khususnya pangan bergizi yang relatif memiliki harga lebih tinggi. Hal ini berdampak pada pemenuhan kecukupan konsumsi pangan yang belum optimal, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah.

Faktor lainnya adalah masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Pola konsumsi yang belum seimbang berkontribusi terhadap terjadinya ketidakcukupan konsumsi pangan, meskipun ketersediaan pangan di tingkat wilayah relatif memadai.

Kombinasi faktor sosial ekonomi dan perilaku konsumsi tersebut menjadi penyebab utama belum optimalnya penurunan angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di daerah, sehingga diperlukan penguatan intervensi terpadu melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat, serta edukasi pola konsumsi pangan B2SA secara berkelanjutan

5. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, didukung oleh pendampingan dan evaluasi berkala terhadap

perencanaan dan pelaporan kinerja, serta ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, sehingga penerapan SAKIP semakin optimal. Hal ini diperkuat oleh komitmen pimpinan dan keterlibatan aktif seluruh SDM dalam membangun budaya kinerja yang akuntabel.

Dari sisi pelayanan publik, capaian kinerja didorong oleh komitmen petugas layanan yang responsif dan ramah, kejelasan standar dan alur pelayanan, serta dukungan sarana prasarana, koordinasi lintas bidang dalam penanganan pengaduan, dan pemanfaatan media informasi layanan.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku masyarakat yang belum ramah lingkungan. 2. Rendahnya pengelolaan limbah domestik. 3. Berkembangnya aktivitas usaha dan industri yang belum mengelola limbah secara memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala sebagai upaya untuk mempertahankan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang 2. Melakukan pencegahan setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan melalui dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) 3. Meningkatkan ketaatan usaha/ kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki 4. Penertiban usaha dan/ atau kegiatan disekitar DAS 5. Pembinaan pengendalian pencemaran air kepada masyarakat dan sektor usaha dan/ atau kegiatan 6. Melakukan program peningkatan kinerja bagi usaha dan/ atau kegiatan yang mengacu pada produksi bersih 7. Pengendalian pencemaran dengan pengembangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah penduduk/ rumah tangga mengakibatkan peningkatan aktivitas rutin seperti bahan bakar untuk proses produksi, pembakaran sampah, penguraian zat organik dari penumpukan sampah dan mobilisasi 2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sektor usaha/industri menyebabkan emisi polutan udara semakin besar 3. Terbatasnya sarana dan sistem pemantauan kualitas udara yaitu alat pengujian kualitas udara parameter PM 2,5 4. Data parameter PM 2,5 bersumber dari citra satelit yang diolah oleh BRIN dengan rata – rata hasilnya melebihi baku mutu 5. Banyaknya pemotongan pohon sepanjang jalan raya 	<p>teknologi pengolah air limbah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian rutin terhadap usaha dan/ atau kegiatan penyumbang pencemaran udara 2. Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala 3. Pembinaan pengendalian pencemaran udara 4. Pengelolaan sampah secara optimal agar tidak ada open burning
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas Industri dan Pembangunan Infrastruktur yang tidak sesuai dengan tata ruang, menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk melindungi air dan tanah 2. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan kaidah konservasi 3. Tekanan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang seringkali lebih diprioritaskan dibandingkan fungsi perlindungan lahan dan konservasi. 4. Keterbatasan ketersediaan lahan publik, terutama di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2. Peningkatan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati 3. Upaya peningkatan Tutupan Lahan di Kabupaten Magetan dengan penambahan pohon pada Ruang Terbuka Hijau antara lain di taman, hutan kota dan penanaman pohon di sekitar sumber mata air, bahu jalan dan bantaran sungai 4. Pengendalian dan pengawasan usaha yang tidak sesuai dengan tata guna lahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
		<p>wilayah perkotaan untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</p> <p>5. Pemeliharaan tanaman yang belum optimal, sehingga tingkat keberhasilan penanaman dan keberlanjutan tutupan lahan masih belum maksimal.</p> <p>6. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya tutupan vegetasi dan fungsi ekologis lahan, khususnya di kawasan permukiman dan lahan privat.</p> <p>7. Dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim dan kekeringan, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penanaman dan pertumbuhan vegetasi.</p>	
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	<p>1. Berubahnya gaya hidup/konsumerisme masyarakat akan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan</p> <p>2. Berkembangnya jumlah penduduk berdampak produksi sampah akan semakin meningkat</p> <p>3. Kondisi TPA Milangasri yang sudah overload</p>	<p>1. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dengan meningkatkan pengolahan sampah melalui pemilahan dan composting</p> <p>2. Penutupan TPS yang berada di pinggir jalan dalam kota dan di lokasi tertentu diganti dengan pembangunan fasilitas TPS3R/ Transfer depo/ Rumah kompos</p> <p>3. Peningkatan kapasitas kelembagaan KSM pengelola sampah dan Pembangunan TPS3R dan rumah kompos dalam rangka Penerapan Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan</p> <p>4. Layanan sampah spesifik</p> <p>5. Pengembangan RTH di TPA dengan konsep fitoremediasi</p> <p>6. Pengembangan teknologi pengolahan sampah kemasan/multilayer</p>
Terwujudnya Ketersediaan,	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan	1. Keterlambatan dalam pendataan dan analisis	<p>1. Sinergi lintas sektor dan swasta</p> <p>2. Peningkatan kapasitas SDM</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
akses, dan konsumsi Pangan	Pangan	2. Belum ada data yang menyediakan informasi ketersediaan dan kebutuhan	3. Pemanfaatan teknologi
	Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	1. Meningkatnya angka kemiskinan 2. Menurunnya daya beli masyarakat 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan	1. Kordinasi Lintas Sektor 2. Pengembangan Pekarangan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan Penyediaan CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) 3. Pengendalian Harga Pangan dan Bantuan Pangan
	Skor PPH Konsumsi	1. Keterlambatan data pendukung analisis 2. Kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi pangan B2SA masih perlu ditingkatkan	1. Sinergi Lintas Sektor 2. Diversifikasi konsumsi rumah tangga 3. Peningkatan konsumsi protein, sayur, dan buah
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kurangnya pemahaman ASN terhadap penjenjangan kinerja pada masing masing individu untuk mendukung pencapaian kinerja atasan dan organisasi	1. Peningkatan implementasi SAKIP dalam proses perencanaan dan akuntabilitas kinerja 2. Melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja ditahun mendatang 3. Memberikan bimtek/ sosialisasi kepada pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas ASN
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	1. kurangnya pemahaman pemohon mengenai kelengkapan dokumen lingkungan 2. usia kendaraan yang cukup tua sehingga membutuhkan perawatan lebih intensif serta waktu downtime saat perbaikan berlangsung. 3. dinamika kondisi lapangan dan keterbatasan pengawasan sehingga koordinasi perlu terus ditingkatkan 4. keterbatasan jangkauan sosialisasi dan beragamnya tingkat pemahaman masyarakat	1. Evaluasi Persyaratan Pengajuan Dokumen Lingkungan 2. Peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 3. Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja Petugas penanganan sampah 4. Peningkatan Edukasi Masyarakat terkait Persyaratan Sesuai SOP dan Peraturan Daerah

Berdasarkan tabel di atas, dalam pelaksanaan kinerja sasaran organisasi terdapat beberapa permasalahan dan alternatif solusi yang harus diambil dalam pencapaian target kinerja, antara lain sebagai berikut:

a. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah, terdapat permasalahan dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- Pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA), permasalahan utama yang dihadapi antara lain perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya ramah lingkungan serta rendahnya pengelolaan limbah domestik. Selain itu, berkembangnya aktivitas usaha dan industri yang belum mengelola limbah secara memadai turut memberikan tekanan terhadap kualitas badan air, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi ini berdampak pada potensi meningkatnya pencemaran air yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan, antara lain melalui pemantauan kualitas lingkungan secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan di masa mendatang. Pencegahan pencemaran dilakukan sejak tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, serta peningkatan ketaatan pelaku usaha dalam menjalankan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen yang dimiliki. Penertiban usaha di sekitar DAS, pembinaan pengendalian pencemaran air kepada masyarakat dan pelaku usaha, program peningkatan kinerja berbasis produksi bersih, serta pengembangan teknologi pengolahan air limbah menjadi strategi penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas air.

- Pada indikator Kualitas Udara (IKU), tantangan yang dihadapi yaitu seiring meningkatnya jumlah penduduk dan rumah tangga, aktivitas rutin seperti penggunaan bahan bakar untuk proses produksi, pembakaran sampah (open burning), penguraian zat organik dari timbunan sampah, serta mobilitas kendaraan bermotor berkontribusi terhadap peningkatan emisi polutan udara. Pertumbuhan sektor usaha dan industri juga turut menambah beban pencemaran udara. Di sisi lain, keterbatasan sarana pemantauan kualitas udara, khususnya alat pengujian parameter PM_{2,5}, menjadi kendala dalam memperoleh data yang akurat. Data PM_{2,5} yang bersumber dari citra satelit

dan diolah oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menunjukkan rata-rata hasil melebihi baku mutu.. ditambah lagi dengan banyaknya pemotongan pohon di sepanjang jalan raya yang mengurangi fungsi vegetasi sebagai penyerap polutan.

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan pengendalian rutin terhadap usaha dan/atau kegiatan penyumbang pencemaran udara, pemantauan kualitas udara secara berkala, serta pembinaan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pengelolaan sampah secara optimal juga harus ditingkatkan guna menghilangkan praktik pembakaran terbuka yang menjadi salah satu sumber utama pencemaran udara.

- Indeks Kualitas Lahan (IKL), permasalahan yang muncul antara lain aktivitas industri dan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga mengurangi kemampuan lahan dalam melindungi air dan tanah. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan kaidah konservasi, tekanan ekonomi yang lebih memprioritaskan pembangunan dibanding perlindungan lahan, serta keterbatasan lahan publik untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, pemeliharaan tanaman yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tutupan vegetasi, serta dampak perubahan iklim seperti cuaca ekstrem dan kekeringan turut memengaruhi tingkat keberhasilan penanaman dan keberlanjutan tutupan lahan.

Upaya peningkatan IKL dilakukan melalui penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), peningkatan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta penambahan tutupan lahan melalui penanaman pohon pada RTH seperti taman, hutan kota, sekitar sumber mata air, bahu jalan, dan bantaran sungai di Kabupaten Magetan. Pengendalian dan pengawasan terhadap usaha yang tidak sesuai dengan tata guna lahan juga menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan

- Pada Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), permasalahan antara lain dipicu oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif sehingga meningkatkan jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan jumlah penduduk juga berdampak pada peningkatan produksi

sampah. Selain itu TPA Milangasri yang telah mengalami overload sehingga memerlukan penanganan segera dan komprehensif.

- Alternatif solusi yang dapat ditempuh antara lain mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA melalui pemilahan dan pengolahan sampah (composting), penutupan TPS di pinggir jalan yang diganti dengan pembangunan fasilitas TPS3R, transfer depo, dan rumah kompos. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah serta pembangunan TPS3R dan rumah kompos perlu terus didorong dalam rangka penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Layanan sampah spesifik, pengembangan RTH di area TPA dengan konsep fitoremediasi, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah kemasan atau multilayer juga menjadi strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, peningkatan capaian IKA, IKU, IKL, dan IKPS memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan, penguatan regulasi dan pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- b. Sasaran strategis yang kedua yaitu Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja, yaitu Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment), serta Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Pada indikator Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan, permasalahan utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pendataan dan analisis, serta belum tersedianya data yang mampu memberikan informasi secara komprehensif mengenai kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya perencanaan dan pengambilan kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor dan swasta dalam penyediaan serta pengelolaan data pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang analisis pangan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung sistem pendataan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Pada indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment), permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap tingkat kecukupan konsumsi pangan rumah tangga. Alternatif solusi yang dapat dilakukan meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan Pekarangan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk menjaga stabilitas pasokan. Selain itu, pengendalian harga pangan dan penyaluran bantuan pangan kepada kelompok rentan juga menjadi langkah strategis dalam menekan angka ketidakcukupan konsumsi pangan.

Sedangkan pada indikator Skor PPH Konsumsi, permasalahan yang dihadapi adalah keterlambatan data pendukung analisis serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi pangan B2SA. Pola konsumsi yang belum beragam dan masih bertumpu pada komoditas tertentu menyebabkan skor PPH belum optimal. Untuk meningkatkan capaian indikator ini, diperlukan sinergi lintas sektor dalam edukasi dan sosialisasi, mendorong diversifikasi konsumsi pangan di tingkat rumah tangga, serta meningkatkan konsumsi sumber protein, sayur, dan buah sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang.

Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan memerlukan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah, pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Penguatan sistem data, peningkatan kapasitas SDM, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta edukasi pola konsumsi yang sehat menjadi faktor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Sasaran strategis ketiga yaitu Terwujudnya Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Nilai SAKIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan.

Pada indikator Nilai SAKIP, permasalahan yang dihadapi antara lain masih kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap perjanjian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada masing-masing individu. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian kinerja atasan maupun organisasi secara keseluruhan. Untuk

mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan implementasi SAKIP dalam proses perencanaan dan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan evaluasi capaian kinerja secara berkala sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, serta pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pegawai guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman ASN terhadap sistem akuntabilitas kinerja.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman pemohon terhadap kelengkapan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan, usia kendaraan operasional yang cukup tua sehingga memerlukan perawatan intensif dan berpotensi mengalami downtime saat perbaikan berlangsung, dinamika kondisi lapangan serta keterbatasan pengawasan yang memerlukan koordinasi lebih intensif, serta keterbatasan jangkauan sosialisasi yang menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan layanan belum merata.

Sebagai langkah perbaikan, perlu dilakukan evaluasi persyaratan pengajuan dokumen lingkungan agar lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, khususnya di bidang persampahan, menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran operasional layanan. Monitoring dan evaluasi sistem kerja petugas penanganan sampah juga penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Di sisi lain, peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan sesuai SOP dan peraturan daerah perlu terus dilakukan agar tercipta pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan kapasitas aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

B. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2025

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	69,88	79,16	113,28	424.916.810	420.067.826	98,86	12,73
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80,88	79,3	98,05	80.250.785	79.593.686	99,18	-1,16
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	53,33	54,63	102,44	2.145.761.700	2.048.858.759	95,48	6,79
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks	72,420	71,10	98,18	2.119.772.181	1.850.633.945	87,30	11,08
Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	%	1,10	1,10	100,00	56.707.500	55.071.349	97,11	2,89
	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	Skor	7,81	8,77	89,05	580.414.015	565.606.395	97,45	13,22
	Skor PPH Konsumsi	Skor	93,90	93,92	100,02	382.050.925	375.753.552	98,35	1,67
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai	93,35	93,35	100,00	57.255.350	53.496.352	93,43	6,57
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Indeks	83,03	86,89	104,65	15.675.553.642	15.097.380.277	96,31	7,97
Rata-Rata Kinerja dan Serapan Anggaran					100,63			95,94	
Efisiensi Kinerja									6,64

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dalam memenuhi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja adalah sebesar 6,64%. Nilai efisiensi tertinggi tercatat sebesar 13,22% pada sasaran urusan Pangan, yaitu “Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan” dengan indikator Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

(Pravelence of Undernourishment). Sementara itu, nilai efisiensi terendah sebesar - 1,16% terdapat pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah”, dengan indikator Indeks Kualitas Udara (IKU). Untuk Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kab. Magetan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
URUSAN PANGAN								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Magetan Ton	239	239	100	56.707.500	55.071.349	97,11	2,89
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Persentase partisipasi OPD pemangku Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten %	100	100	100	56.707.500	55.071.349	97,11	2,89
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan angka	94	94	100	349.991.200	344.566.102	98,45	1,57
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Ketersediaan energy dan kkal/kap/hr	6.308	6.771	107	221.169.300	218.780.752	98,92	7,85
	ketersediaan protein gr/kap/hr	151	162	108				
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi energi; kkal/kap/hr	1.870	2.051	110	128.821.900	125.785.350	97,64	10,9
	konsumsi protein gr/kap/hr	58	70	121				
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan %	100	100	100	580.414.015	565.606.395	97,45	2,55
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta FSVA dokumen	1	1	100	7.828.615	7.599.995	97,08	2,92

Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan %	100	100	100	572.585.400	558.006.400	97,45	2,55
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan waktu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan %	100	100	100	32.059.725	31.187.450	97,28	2,72
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota bulan	12	12	100	32.059.725	31.187.450	97,28	2,72
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan %	100	100	100	54.841.185	54.625.468	99,61	0,39
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun dokumen	1	1	100	50.841.185	50.794.769	99,91	0,09
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun dokumen	1	1	100	4.000.000	3.830.699	95,77	4,23
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan baku mutu air %	100	100	100	278.848.860	277.790.571	99,62	0,38
	Persentase pemenuhan baku mutu udara %	100	100	100				
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dokumen	2	2	100	40.279.060	40.099.399	99,55	0,45

Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	2	2	100	46.401.150	45.917.101	98,96	1,04
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dokumen	2	2	100	192.168.650	191.774.071	99,79	0,21
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik %	100	100	100	2.145.761.700	2.048.858.759	95,48	4,52
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	5	5	100	2.145.761.700	2.048.858.759	95,48	4,52
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang diselesaikan %	100	100	100	26.328.080	17.875.806	67,90	32,10
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 dokumen	2	2	100	18.334.100	11.458.626	62,50	37,50
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota laporan	1	1	100	7.993.980	6.417.180	80,28	19,72
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) %	100	100	100	25.409.600	24.968.218	98,26	1,73

Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan laporan	2	2	100	25.409.600	24.968.218	98,26	1,74
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH %	100	100	100	5.570.400	5.389.232	96,75	3,25
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH lokasi	1	1	100	5.570.400	5.389.232	96,75	3,25
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat %	100	100	100	109.335.300	106.748.843	97,63	2,37
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata dokumen	10	10	100	109.335.300	106.748.843	97,63	2,37
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup %	100	100	100	18.756.050	18.006.198	96,00	4,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan	1	1	100	18.756.050	18.006.198	96,00	4,00

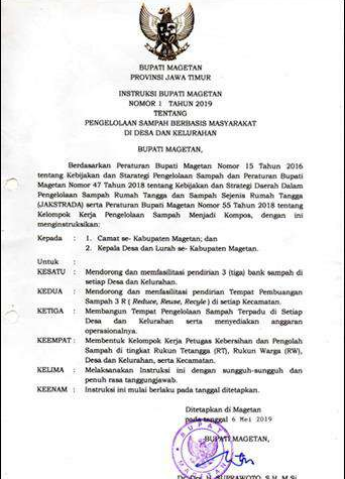

Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup %	100	100	100	12.406.200	12.132.982	97,80	2,20
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota dokumen	1	1	100	12.406.200	12.132.982	97,80	2,20
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola %	100	100	100	2.093.444.101	1.832.758.139	87,55	12,45
Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan Laporan	12	12	100	2.088.486.886	1.827.801.489	87,52	12,48
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Dokumen	1	1	100	4.957.215	4.956.650	99,99	0,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Angka	83	83	100	15.732.808.992	15.150.876.629	96,30	3,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen	18	18	100	57.255.350	53.496.352	93,43	6,57
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	94	95	102	7.242.016.852	6.926.873.913	95,65	5,81
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	85	85	100	16.500.000	16.421.606	99,52	0,48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	7	7	100	449.667.090	440.716.238	98,01	1,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan	3	3	100	7.592.553.100	7.378.395.626	97,18	2,82






Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah unit	43	43	100	374.816.600	334.972.894	89,37	10,63

Pada tabel di atas Nilai efisiensi tertinggi pada program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) sebesar 32,10% dan nilai efisiensi terendah terdapat pada Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu sebesar 0,38%.





C. INOVASI TAHUN 2025


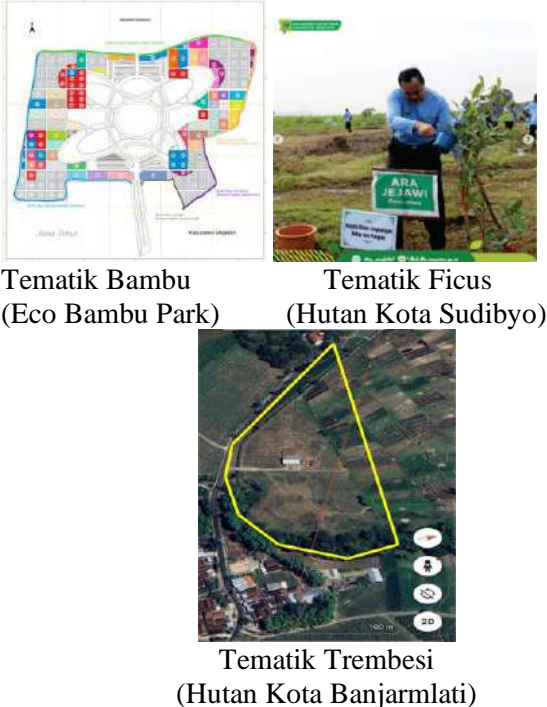


Selama Tahun 2025, inovasi yang telah dilakukan/ dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan antara lain:

No.	Inovasi	Foto
1.	Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	 <p>The image shows an official instruction document from the Bupati of Magetan, East Java. The document is titled 'INSTRUKSI BUPATI MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN'. It outlines the goals and strategies for waste management, emphasizing community-based approaches and the role of village and neighborhood committees. The document is signed by the Bupati and includes a date of issuance.</p>
2.	Jumingsih (Jum'at Minggu Bersih) yaitu clean up atau kerja bakti kebersihan lingkungan di hari Jumat untuk kawasan perkantoran dan di hari Minggu untuk kawasan permukiman.	 <p>The image contains four photographs showing community cleanup activities. The top-left photo shows two people cleaning a paved area near a building. The top-right photo shows a person cleaning a grassy area. The bottom-left photo shows a person cleaning a paved area. The bottom-right photo shows a person cleaning a paved area. The photos illustrate the 'Jumingsih' (Friday and Sunday Clean) initiative.</p>

No.	Inovasi	Foto
3.	Bank Sampah Induk (BSI) Omah Apik Kab. Magetan.	
4.	Si Jolu (Aksi Ijol Uwuh) yaitu menukar sampah dengan makanan/minuman, produk olahan sampah atau lainnya. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengolahan sampah.	
5.	Pengolahan Sampah Tertolak (Plastik Kemasan) menjadi Paving Block	
6.	<p>BIONIK (Biogas Organik) adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob</p> <p>Manfaat biogas: Mengurangi produksi gas rumah kaca metana, Mengurangi sampah organik di tempat pembuangan akhir, Memanfaatkan limbah sisa.</p>	
7.	GETAH (Geni Jelantah), api dari minyak jelantah dapat digunakan untuk memasak dengan menggunakan kompor minyak jelantah	

No.	Inovasi	Foto
8.	Si Maggot, Produk pengolahan sampah organik dengan Larva BSF	
9.	Si Tepo (Aksi Tebar Kompos) yaitu pembagian kompos gratis untuk penghijauan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	
10.	Si Jupri (Aksi Jupuk Pilah Resiki Sampah) yaitu aksi clean up pada lokasi-lokasi fasilitas umum dengan pelibatan masyarakat.	
11.	E-Waste Service, Program penjemputan Limbah B3 bertujuan mempermudah warga dan OPD dalam pengelolaan sampah elektronik (e-waste) dan Limbah B3, dengan proses pendaftaran hingga penjemputan yang mudah melalui pengisian formulir permintaan penjemputan	
12.	Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS)	
13.	Resi Nona (Retribusi Kebersihan Non Tunai) yaitu sistem pembayaran retribusi kebersihan non tunai dari wajib retribusi.	

No.	Inovasi	Foto
14.	Gotong Royong Reboisasi dan Penghijauan Magetan (GRRPM).	
15.	Si Kasih (Aksi Kali Bersih) bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sungai dari berbagai limbah.	
16.	GESID (Gerakan Edukasi Lingkungan Sedari Usia Dini) edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengenalkan anak pada lingkungan semenjak dini	
17.	GO KOHE (Gerakan Olah Kotoran Hewani) Gerakan Olah Kotoran Hewan merupakan pupuk kandang yang berasal dari hasil endapan operasional IPAL Singolangu. Pupuk kandang yang telah matang digunakan sebagai sumber nutrisi tanaman	
18.	Sistem Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Online Sebagai Upaya Ketaatan Usaha Industri (SIMPONI PASTI) bertujuan memperkuat pengawasan, mempermudah pemantauan, dan mendeteksi hambatan pengelolaan lingkungan sejak dini agar pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa dicegah lebih cepat.	

No.	Inovasi	Foto
19.	Gerakan Magetan Menanam Setiap musim penghujan dilakukan gerakan menanam pohon yang dibarengi dengan SENAM (Sekolah Menanam) dan Desa/Kelurahan Menanam	
20.	Hutan Kota Tematik	 <p>Tematik Bambu (Eco Bambu Park)</p> <p>Tematik Ficus (Hutan Kota Sudibyo)</p> <p>Tematik Trembesi (Hutan Kota Banjarnlati)</p>
21.	“si mama evra” Aksi Magetan Menanam Evra dalam rangka meningkatkan kualitas RTH Jalur Hijau	
22.	“Si Mama Rusa” Aksi Magetan Menanam Tanduk Rusa	

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan antara lain:

1. Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Utama tahun 2025 kepada RW 1 Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo dari Menteri Lingkungan Hidup/BPLH
2. Penghargaan Adiwiyata Mandiri tahun 2025 kepada SMAN 1 Maospati dari Menteri Lingkungan Hidup/BPLH

3. Penghargaan Adiwiyata Mandiri tahun 2025 kepada MIN 3 Magetan dari Menteri Lingkungan Hidup/BPLH
4. Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2025 kepada SDN Unggulan Magetan dari Menteri Lingkungan Hidup/BPLH
5. Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2025 kepada SMPN 3 Kawedanan dari Menteri Lingkungan Hidup/BPLH
6. Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2025 kepada SMPN 1 Barat dari Menteri Lingkungan Hidup/BPLH
7. Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2025 kepada SMPN 1 Plaosan dari Menteri Lingkungan Hidup/BPLH
8. Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2025 kepada SMPN 1 Poncol dari Menteri Lingkungan Hidup/BPLH
9. Penghargaan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar tahun 2025 kepada OKKPD Kabupaten Magetan dari Kepala Badan Pangan Nasional
10. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada SDN Ringinagung dari Gubernur Jawa Timur
11. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada MIN 2 Magetan dari Gubernur Jawa Timur
12. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada MIN 5 Magetan dari Gubernur Jawa Timur
13. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada MIN 6 Magetan dari Gubernur Jawa Timur
14. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada SMPN 1 Maospati dari Gubernur Jawa Timur
15. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada SMPN 1 Panekan dari Gubernur Jawa Timur
16. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada SMPN 2 Magetan dari Gubernur Jawa Timur
17. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada SMPN 2 Panekan dari Gubernur Jawa Timur
18. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada SMPN 1 Karangrejo dari Gubernur Jawa Timur
19. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada SMAN 1 Magetan dari Gubernur Jawa Timur

20. Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2025 kepada SMAN 1 Barat dari Gubernur Jawa Timur
21. Penghargaan Eco Pesantren Kategori Rintisan tahun 2025 kepada Pondok Pesantren Baitul Qur'an Al-Jahra dari Gubernur Jawa Timur
22. Penghargaan Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup Kategori Perintis Lingkungan tahun 2025 kepada Santoso dari Gubernur Jawa Timur
23. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) Kategori Pratama tahun 2025 kepada Kelurahan Magetan Kec. Magetan dari Gubernur Jawa Timur
24. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) Kategori Pratama tahun 2025 kepada Desa Wates Kec. Panekan dari Gubernur Jawa Timur
25. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) Kategori Pratama tahun 2025 kepada Desa Tanjungsari Kec. Panekan dari Gubernur Jawa Timur
26. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) Kategori Pratama tahun 2025 kepada Kelurahan Sampung Kec. Kawedanan dari Gubernur Jawa Timur
27. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) Kategori Madya tahun 2025 kepada Desa Botok Kec. Karas dari Gubernur Jawa Timur
28. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) Kategori Madya tahun 2025 kepada Desa Balegondo Kec. Ngariboyo dari Gubernur Jawa Timur
29. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada MIN 10 Magetan dari Bupati Magetan
30. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada MIN 13 Magetan dari Bupati Magetan
31. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada SMPN 3 Parang dari Bupati Magetan
32. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada MIN 12 Magetan dari Bupati Magetan
33. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada MTsN 8 Magetan dari Bupati Magetan
34. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada SDN Pojoksari 1 dari Bupati Magetan
35. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada SDN Purwosari dari Bupati Magetan

36. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada MAN 1 Magetan dari Bupati Magetan

37. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 kepada MAN 2 Magetan dari Bupati Magetan



Penghargaan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar tahun 2025



Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2025

Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Tahun 2025



Penghargaan terkait Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Tahun 2025



Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) tahun 2025 dari Gubernur Jawa Timur

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 9 (Sembilan) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah

- Sasaran ke-1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,99% (kategori Sangat Berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 10 (sepuluh) Program yang terdiri dari 11 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

- Sasaran ke-1 didukung oleh 15 (lima belas) Kegiatan terdiri dari 15 (lima belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 2: Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan

- Sasaran ke-2 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 96,36% (kategori Berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 4 (empat) Program yang terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105,73 % (kategori Sangat Berhasil)

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

- Sasaran ke-3 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,31% (kategori Sangat Berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,26 % (kategori Sangat Berhasil)

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	69,88	79,16	113,28%
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,88	79,30	98,05%
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,33	54,63	102,44%
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	72,420	71,1	98,18%
Terwujudnya Ketersediaan, akses,	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	110%	110%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
dan konsumsi Pangan	Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	7,81	8,77	89,05%
	Skor PPH Konsumsi	93,90	93,92	100,02%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	93,35	93,35	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	83,03	86,89	104,62%
Capaian Kinerja				100,63%
				SANGAT BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100,63% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 20.546.462.141,00 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 6,64%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 32%. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan antara lain sebagai berikut:

- Meningkatnya angka kemiskinan
- Menurunnya daya beli masyarakat
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan
- Perubahan metode perhitungan yang mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat
- Terbatasnya sarana dan sistem pemantauan kualitas udara yaitu alat pengujian kualitas udara parameter PM2,5, data parameter PM2,5 bersumber dari citra satelit yang diolah oleh BRIN dengan rata-rata hasilnya melebihi baku mutu.

Serapan anggaran tahun 2025 ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,64%. Penyebab utama adalah adanya realisasi belanja BBM masih menyisakan anggaran cukup besar karena harga SSH lebih tinggi dibandingkan harga riil di lapangan, terdapat biaya umum yang tidak dilaksanakan karena pengadaan tanah untuk TPST dialihkan, efisiensi belanja melalui e-katalog dan sisa gaji pegawai.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan peningkatan pemantauan secara periodik kualitas air di titik-titik yang berpotensi terjadi pencemaran
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan secara periodik kualitas udara Program kampung iklim Aksi kali bersih
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) Pemeliharaan rutin taman dan hutan kota Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH Gerakan penanaman Penguatan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan serta peningkatan regulasi perlindungan kawasan hijau
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	<ul style="list-style-type: none"> Operasional rutin pengelolaan sampah Pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), Rumah Kompos, Penyapuan Jalan Protokol, Pengangkutan Residu Program Magetan Resik dan Berseri (Bersih dan Lestari) FPSS B3 (Fasilitas Penyimpanan Sampah Spesifik B3) Arahan Rintek dan Pertek B3
Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi Penguatan Cadangan Pangan Peningkatan kelembagaan Pangan
	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> Penanganan Kerentanan/Kerawanan Pangan Menjaga stabilitas harga pangan, & daya beli masyarakat. Kampanye Stop Boros Pangan
	Skor PPH Konsumsi	Meningkatkan Pemanfaatan Dan Keamanan Pangan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi pangan lokal dan Pembinaan B2SA Pengawasan Keamanan Pangan, Setifikasi Izin Edar Pangan Segar & Penguatan Kelembagaan OKKPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti hasil evaluasi LHE SAKIP melalui perbaikan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja • Peningkatan pemahaman dan kompetensi pegawai dalam akuntabilitas kinerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan penyederhanaan persyaratan serta alur pelayanan dokumen lingkungan. • Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta kinerja petugas. • Peningkatan edukasi dan sosialisasi layanan kepada masyarakat sesuai SOP dan Perda.

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan
Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)				79,17	79,17
	Indeks Kualitas Udara (IKU)				80,98	80,98
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)				54,63	54,63
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]				72,430	72,430
Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan				110%	110%
	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)				7,50	7,50
	Skor PPH Konsumsi				94,30	94,30
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP				93,36	93,36
	Indeks Kepuasan Masyarakat				86,91	86,91

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, 20 Februari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Pangan
Kabupaten Magetan



SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721222 199303 1 005

LAMPIRAN

A. Matriks Renstra RPD DAN RPJMD

1. Matriks Renstra RPD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan	Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	%	62,5	62,5	62,5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik	
							Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	
							Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit	
							Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	%	100	100	100	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan baku mutu air;Persentase pemenuhan baku mutu udara

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
							Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
							Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan
		Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	%	100	100	100	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan
							Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun
							Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi
							Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota dokumen
							Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
							Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun
							Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	%	99	100	100	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang diselesaikan
							Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3
							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
							Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
							Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya
							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola
							Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan
							Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
							Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan
							Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
							Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								sampah melalui pembatasan timbulan sampah
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
							Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	Persentase Kelompok/Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	%	53	55	57	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
							Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau IzinPPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
							Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup
							Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
							Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
							Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
							Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
							Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata
							Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup
							Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan	Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan	kkal/kap/hr	6.307	6.308	6.309	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan
		Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan	gr/kap/hr	151.04	151.05	151.06	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta FSVA
							Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan
							Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan
							Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Magetan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi OPD pemangku Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten %
							Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,8	93	93,2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan waktu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan
							Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
							Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
							Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Ketersediaan energy dan ketersediaan protein
							Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
							Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan unit
							Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota
							Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi energi; konsumsi protein kkal/kap/hr dan gr/kap/hr
							Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
							Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai	93,17	93,18	93,19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Indeks	80,25	80,5	80,75	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang /
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Prosedur
							Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								yang Disediakan
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2. Matriks Renstra RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	69,88	69,98	70,08	70,18	70,28	70,38	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan baku mutu air; Persentase pemenuhan baku mutu udara	
										Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	
											Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
											Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
											Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
											Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
											Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan
										PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH
										Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
										Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
										PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata
										Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
										Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
										PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup
										Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
										Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
										PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
										Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80,88	80,98	81,08	81,18	81,28	81,38	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan
										Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun
										Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota
										Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan
										Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan
										Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi
										Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
										Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi II dokumen
										Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun
										Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun
										PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
										Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan
										Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
										Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,34	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tutupan lahan/vegetasi
										Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
										Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun
										Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
										Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
										Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
										Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks	72,42	72,43	72,44	72,445	72,45	72,46	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase penyelesaian dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) %
										Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
										Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
										Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya
										PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
										Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan; Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengolah Sampah
										Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
										Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan
										Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
										Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
										Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
										Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		
	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	%	110	110	110	110	110	110	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Magetan		
										Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat		
											Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	
											Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Skor	7,81	7,5	7,18	6,87	6,56	6,25	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	
												Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya dokumen FSVA
												Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan
												Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan
										Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota
		Skor PPH Konsumsi	Skor	93,9	94,3	94,6	94,9	95,4	95,8	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan
										Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Ketersediaan energy dan ketersediaan protein
										Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
										Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan
										Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota
										Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)
										Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi energi; konsumsi protein
										Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
										Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
										PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk Pangan Segar Aman Diperedaran dan Nilai Audit Sistem Manajemen mutu OKKPD
										Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
										Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
										Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP	Nilai	93,35	93,36	93,37	93,38	93,39	93,4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan; Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83,03	83,04	83,05	83,06	83,07	83,08	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Daerah
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sasaran						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
										Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD

1. Indikator Kinerja Utama Renstra tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA INSTANSI: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN KAB. MAGETAN

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	$\frac{\text{Jumlah lahan yang tertanami}}{\text{Jumlah lahan yang harus ditanami}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Jumlah lahan yang tertanami= jumlah luas lahan eksisting yang memenuhi kriteria tutupan lahan dengan kerapatan tajuk minimal luas 0,1 hektar Jumlah lahan yang harus ditanami=luas Wilayah kota/ Kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai RTH di Kabupaten Magetan Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	Laporan pengelolaan tutupan vegetasi (Bidang Tata Lingkungan)	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	$\frac{\text{Jumlah sample dengan minimal status mutu air ringan}}{\text{jumlah total sample air}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Status mutu air ringan = air yang mempunyai status kualitas tercemar ringan $1,0 \leq IPj \leq 5,0$ = cemar ringan $0 \leq IPj \leq 1,0$ = baik (memenuhi baku mutu) Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	Laporan pemantauan kualitas air badan air (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	$\frac{\text{Jumlah sample yang memenuhi baku mutu udara}}{\text{jumlah sample udara}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Baku Mutu = baku mutu udara ambien yang berlaku di Indonesia berdasarkan PP tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan $NO_2 = 40 \mu g/m^3$ $SO_2 = 20 \mu g/m^3$ Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	Laporan pemantauan kualitas udara ambien (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	$\frac{\text{Volume penanganan dan pengurangan sampah}}{\text{Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Penanganan sampah= $\frac{\text{Volume Sampah yang ditangani dan diangkut ke TPA}}{\text{Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$ Pengurangan sampah= $\frac{\text{Volume sampah yang berkurang dari sumbernya}}{\text{Volume sampah pada sumbernya}} \times 100\%$</p>	Laporan penanganan sampah (Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	Persentase Kelompok/Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok/Lembaga yg peduli terhadap kelestarian lingkungan}}{\text{Jumlah total Lembaga yang dibina}} \times 100\%$ Keterangan: Kelompok/ Lembaga = sekolah adiwiyata, ecopesantren dan kelompok pengelola lingkungan yang berhasil mendapatkan penghargaan	Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan)	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
4	Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan	$\frac{\text{Ketersediaan Energi}}{\sum \text{Penduduk tengah tahun}} \times \frac{1000}{\sum \text{penduduk}} \times \frac{1000}{365}$ Keterangan : Ketersediaan Energi = total energi yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu wilayah \sum Penduduk Tengah Tahun = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun \sum Penduduk = Jumlah total penduduk selama satu tahun	Laporan Analis Konsumsi Pangan (Bidang Pangan)	Kepala Bidang Pangan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan	$\frac{\text{Ketersediaan protein}}{\sum \text{Penduduk tengah tahun}} \times \frac{1000}{\sum \text{penduduk}} \times \frac{1000}{365}$ Keterangan : Ketersediaan Protein = total protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu wilayah \sum Penduduk Tengah Tahun = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun \sum Penduduk = Jumlah total penduduk selama satu tahun	Laporan Analis Konsumsi Pangan (Bidang Pangan)	Kepala Bidang Pangan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
5	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Angka Skor Pola Pangan Harapan terhadap target ketetapan	$\sum \text{Skor PPH Kelompok Pangan } X1...Xi$ Keterangan: Skor PPH Konsumsi = presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dikali dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan	Laporan Analis Konsumsi Pangan (Bidang Pangan)	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Magetan, 5 Januari 2024
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN PANGAN
 KABUPATEN MAGETAN



SAIF MUCHLISSUN, S.Sos. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721222 199303 1 005

2. Indikator Kinerja Utama Renstra tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025-2029**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																														
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum I_i \text{ IKA Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ <p>Keterangan : Nilai IKA dihitung dari 8 parameter yaitu padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Nitrat (NO₃-N), total fosfat (T-P) dan fecal coliform (Fecal Coli)</p> $IKA \text{ Titik Pantau} = \sum w_i I_i$ <p>W = Faktor Pembobot I = Sub- Indeks</p> <p>Faktor Pembobot masing-masing Parameter untuk perhitungan IKA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Parameter</th> <th>Faktor Pembobot (w)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>pH</td><td>0,137</td></tr> <tr><td>2.</td><td>BOD</td><td>0,133</td></tr> <tr><td>3.</td><td>COD</td><td>0,140</td></tr> <tr><td>4.</td><td>TSS</td><td>0,086</td></tr> <tr><td>5.</td><td>DO</td><td>0,167</td></tr> <tr><td>6.</td><td>NO₃-N</td><td>0,081</td></tr> <tr><td>7.</td><td>T-P</td><td>0,100</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Fecal Coli</td><td>0,157</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>1,000</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</p>	No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)	1.	pH	0,137	2.	BOD	0,133	3.	COD	0,140	4.	TSS	0,086	5.	DO	0,167	6.	NO ₃ -N	0,081	7.	T-P	0,100	8.	Fecal Coli	0,157		Total	1,000	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)																																	
1.	pH	0,137																																	
2.	BOD	0,133																																	
3.	COD	0,140																																	
4.	TSS	0,086																																	
5.	DO	0,167																																	
6.	NO ₃ -N	0,081																																	
7.	T-P	0,100																																	
8.	Fecal Coli	0,157																																	
	Total	1,000																																	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks } NO_2 + \text{ Indeks } SO_2 + \text{ Indeks } PM_{2,5}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$ $\text{Indeks } PM_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata } PM_{2,5}}{\text{Baku Mutu } INA}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin • SO₂ mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya • Particulate Matter 2,5 (PM_{2,5}) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan dan konstruksi <p>Baku Mutu INA : Baku mutu udara ambien yang berlaku di Indonesia berdasarkan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> <p>NO₂ = 50 µg/m³ SO₂ = 45 µg/m³ PM_{2,5} = 15 µg/m³</p> <p>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</p>	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>Keterangan: Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan (yang masuk ke dalam kelas tutupan lahan) dan memasukkan faktor koreksi gambut.</p>	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																																																																							
			IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Faktor Koreksi Gambut Kab. Magetan = 0 (<i>karena tidak memiliki lahan gambut</i>) TL = Tutupan Lahan C = Koefisien Kelas Tutupan Lahan <table border="1" data-bbox="1041 411 1438 912"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kelas Tutupan</th> <th>Koefisien (C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Hutan Lahan Kering Primer</td><td rowspan="3">1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hutan Rawa Primer</td></tr> <tr><td>3</td><td>Hutan Mangrove Primer</td></tr> <tr><td>4</td><td>Hutan Lahan Kering Sekunder</td><td rowspan="2">0.9</td></tr> <tr><td>5</td><td>Hutan Rawa Sekunder</td></tr> <tr><td>6</td><td>Hutan Mangrove Sekunder</td><td rowspan="2">0.8</td></tr> <tr><td>7</td><td>Hutan Tanaman</td></tr> <tr><td>8</td><td>Belukar Rawa</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>9</td><td>Belukar</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>10</td><td>Perkebunan</td><td>0.45</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pertanian Lahan Kering Campur</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pertanian Lahan Kering</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>13</td><td>Rawa</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sawah</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>15</td><td>Savanna</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>16</td><td>Transmigrasi</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>17</td><td>Bandara/Pelabuhan</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>18</td><td>Tambak</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>19</td><td>Tubuh Air</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>20</td><td>Tanah Terbuka</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>21</td><td>Permukiman/Lahan Terbangun</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>22</td><td>Pertambangan</td><td>0.05</td></tr> <tr><td>23</td><td>RTH</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>24</td><td>RHL</td><td>0.6</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</i></p>	No.	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	1	Hutan Lahan Kering Primer	1	2	Hutan Rawa Primer	3	Hutan Mangrove Primer	4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9	5	Hutan Rawa Sekunder	6	Hutan Mangrove Sekunder	0.8	7	Hutan Tanaman	8	Belukar Rawa	0.6	9	Belukar	0.4	10	Perkebunan	0.45	11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	12	Pertanian Lahan Kering	0.35	13	Rawa	0.35	14	Sawah	0.35	15	Savanna	0.2	16	Transmigrasi	0.2	17	Bandara/Pelabuhan	0.15	18	Tambak	0.1	19	Tubuh Air	0.1	20	Tanah Terbuka	0.1	21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1	22	Pertambangan	0.05	23	RTH	0.6	24	RHL	0.6		
No.	Kelas Tutupan	Koefisien (C)																																																																										
1	Hutan Lahan Kering Primer	1																																																																										
2	Hutan Rawa Primer																																																																											
3	Hutan Mangrove Primer																																																																											
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9																																																																										
5	Hutan Rawa Sekunder																																																																											
6	Hutan Mangrove Sekunder	0.8																																																																										
7	Hutan Tanaman																																																																											
8	Belukar Rawa	0.6																																																																										
9	Belukar	0.4																																																																										
10	Perkebunan	0.45																																																																										
11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4																																																																										
12	Pertanian Lahan Kering	0.35																																																																										
13	Rawa	0.35																																																																										
14	Sawah	0.35																																																																										
15	Savanna	0.2																																																																										
16	Transmigrasi	0.2																																																																										
17	Bandara/Pelabuhan	0.15																																																																										
18	Tambak	0.1																																																																										
19	Tubuh Air	0.1																																																																										
20	Tanah Terbuka	0.1																																																																										
21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1																																																																										
22	Pertambangan	0.05																																																																										
23	RTH	0.6																																																																										
24	RHL	0.6																																																																										
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dihitung berdasarkan aspek: 1. Kebijakan Pengelolaan Sampah 2. SDM Pengelola Sampah 3. Sarana Dan Prasarana (Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah) 4. Anggaran Pengelolaan Sampah 5. Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah 6. Acceptability & Implementasi 7. Capaian Terhadap Target Dan Kapasitas	Laporan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan																																																																							

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			8. Efisiensi Anggaran (Rasio Incremental Capaian Dan Target Per Kelas Anggaran) 9. Kota Bersih (Penilaian Adipura) 10. Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen Dari IKLH. <i>Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>		
2	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan per tahun}}{\text{Kebutuhan Pangan per tahun}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Ketersediaan pangan (TS) adalah jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu</p> <p>TS = O - ΔSt + M - X dimana, TS = total penyediaan dalam Negeri (<i>total supply</i>) O = produksi ΔSt = stok akhir – stok awal M = impor X = ekspor</p> <p>Kebutuhan pangan (TU) adalah jumlah pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat agar tercapai pola konsumsi pangan yang cukup, bergizi, dan seimbang sesuai standar gizi</p> <p>TU = F + S + I + W + Fd + Rou dimana, TU = Total penggunaan (<i>total utilization</i>) F = Pakan S = Bibit I = Industry W = Tercecer Fd = Ketersediaan bahan makanan Rou = Penggunaan lain</p> <p>- Rasio ≥ 100% = ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan penduduk. - Rasio < 100% = menunjukkan potensi kekurangan pangan.</p>	Laporan Neraca Bahan Makanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	<p>Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment) adalah Proporsi penduduk yang tidak mendapatkan asupan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat hidup sehat dan aktif</p> $PoU = \int_{x < MDER}^s f(x) d(x)$ $CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$ <p>Keterangan:</p> <p>$f(x)$ = fungsi densitas</p> <p>$CV(x)$ = total simpangan baku</p> <p>$CV(x/v)$ = simpangan baku konsumsi kalori per kapita</p> <p>$CV(x/r)$ = komponen tetap, bernilai 0,179</p> <p>Sumber : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018)</p>	Laporan Analisis Konsumsi Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		Skor PPH Konsumsi	<p>Langkah dan Formulasi Perhitungan PPH Konsumsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan pangan 2. Konversi bentuk, jenis dan satuan 3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE) 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE 9. Menghitung Skor PPH 10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan <p>Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	Laporan Analisis Konsumsi Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE <p>LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p>	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 parameter IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN PANGAN
 KABUPATEN MAGETAN



DAF MACHLISSUN, S.Sos. MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19721222 199303 1 005

C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya

1. Matriks Renja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berlandaskan	Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Magetan Ton	87	Angka	239,00	Ton	65.725.000,00	Bidang Pangan
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Persentase partisipasi OPD pemangku Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten %	100	%	100	%	65.725.000,00	Bidang Pangan
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia unit	3	unit	1	unit	45.725.000,00	Bidang Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik laporan	9	laporan	3	laporan	20.000.000,00	Bidang Pangan
Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan angka	93	angka	93,4	angka	301.242.000,00	Bidang Pangan
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Ketersediaan energy dan kkal/kap/hr	6.309	kkal/kap /hr	6.308	kkal/kap /hr	121.522.000,00	Bidang Pangan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	ketersediaan protein gr/kap/hr	151,06	gr/kap/hr	151,05	gr/kap/hr		
		Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia laporan	3	laporan	1	laporan	42.567.000,00	Bidang Pangan
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan unit	105	unit	50	unit	15.373.000,00	Bidang Pangan
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota laporan	30	laporan	30	laporan	30.000.000,00	Bidang Pangan
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dokumen	18	dokumen	13	dokumen	33.582.000,00	Bidang Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi energi; kkal/kap/hr	1.875	kkal/kap/hr	1.870	kkal/kap/hr	179.720.000,00	Bidang Pangan
			konsumsi protein gr/kap/hr	57,50	gr/kap/hr	57,5	gr/kap/hr		
		Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dokumen	3	dokumen	1	dokumen	30.000.000,00	Bidang Pangan
		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal laporan	3	laporan	1	laporan	149.720.000,00	Bidang Pangan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan %	100	%	100	%	518.104.000,00	Bidang Pangan
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta FSVA dokumen	3	dokumen	1	dokumen	15.000.000,00	Bidang Pangan
		Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan dokumen	15	dokumen	13	dokumen	15.000.000,00	Bidang Pangan
		Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan %	100	%	100	%	503.104.000,00	Bidang Pangan
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dokumen	36	dokumen	12	dokumen	438.995.000,00	Bidang Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota laporan	36	laporan	12	laporan	64.109.000,00	Bidang Pangan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan waktu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan %	100	%	100	%	43.918.000,00	Bidang Pangan
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota bulan	36	bulan	12	bulan	43.918.000,00	Bidang Pangan
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dokumen	9	dokumen	7	dokumen	22.361.000,00	Bidang Pangan
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan laporan	36	laporan	12	laporan	21.557.000,00	Bidang Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara lahan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan %	100	%	100	%	65.400.000,00	Bidang Tata Lingkungan
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun dokumen	4	dokumen	1	dokumen	60.400.000,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota dokumen	3	dokumen	1	dokumen	60.400.000,00	Bidang Tata Lingkungan
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun dokumen	6	dokumen	1	dokumen	5.000.000,00	Bidang Tata Lingkungan
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun dokumen	6	dokumen	1	dokumen	5.000.000,00	Bidang Tata Lingkungan
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara lahan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan baku mutu air %	100	%	100	%	355.851.210,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
			Persentase pemenuhan baku mutu udara %	100	%	100	%		

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dokumen	6	dokumen	2	dokumen	72.980.210,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dokumen	3	dokumen	1	dokumen	33.656.000,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan dokumen	3	dokumen	1	dokumen	39.324.210,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	9	laporan	2	laporan	72.692.000,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan laporan	6	laporan	1	laporan	26.272.000,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan titik	3	titik	1	titik	46.420.000,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dokumen	6	dokumen	2	dokumen	210.179.000,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan dokumen	6	dokumen	2	dokumen	210.179.000,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara lahan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik %	100	%	100	%	2.202.617.000,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	15	laporan	5	laporan	2.202.617.000,00	Bidang Tata Lingkungan
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun dokumen	4	dokumen	1	dokumen	94.922.500,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha	41	Ha	41,7	Ha	1.190.225.550,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit	53	Unit	54	Unit	780.288.200,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Unit	12	Unit	4	Unit	137.180.750,00	Bidang Tata Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang diselesaikan %	100	%	100	%	67.412.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 dokumen	6	dokumen	2	dokumen	45.119.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dokumen	3	dokumen	1	dokumen	22.566.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 laporan	3	laporan	1	laporan	22.553.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota laporan	9	laporan	1	laporan	22.293.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya dokumen	9	dokumen	1	dokumen	22.293.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) %	100	%	100	%	40.950.000,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan laporan	6	laporan	2	laporan	40.950.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan dokumen	3	dokumen	1	dokumen	12.200.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi badan usaha	71	badan usaha	15	badan usaha	28.750.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH %	100	%	100	%	16.800.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH lokasi	3	lokasi	1	lokasi	16.800.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH dokumen	3	dokumen	1	dokumen	16.800.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat %	100	%	100	%	162.600.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata dokumen	64	dokumen	9	dokumen	162.600.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan dokumen	45	dokumen	8	dokumen	104.600.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keleompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH lembaga	4	lembaga	2	lembaga	58.000.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup %	100	%	100	%	25.250.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan	12	kegiatan	1	kegiatan	25.250.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas	12	Entitas	1	Entitas	25.250.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup %	100	%	100	%	22.950.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota dokumen	3	dokumen	1	dokumen	22.950.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani pengaduan	30	pengaduan	8	pengaduan	22.950.000,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola %	100	%	100	%	6.045.411.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan Laporan	36	laporan	12	laporan	6.026.060.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kelompok	460	Kelompok	430	Kelompok	81.488.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada dokumen	3	dokumen	1	dokumen	45.800.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir unit	49	unit	1	unit	4.106.015.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan dokumen	3	dokumen	1	dokumen	22.818.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Unit	123	unit	41	unit	1.726.949.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah laporan	36	laporan	12	laporan	42.990.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Dokumen	3	dokumen	1	dokumen	19.351.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota laporan	3	laporan	1	laporan	19.351.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Angka	78,50	Indeks	82,7	Indeks	16.000.245.342,00	Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen	54	dokumen	18	dokumen	73.125.000,00	Sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen	33	dokumen	11	dokumen	50.875.000,00	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	21	laporan	7	laporan	22.250.000,00	Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	95	%	93	%	7.220.156.342,00	Sekretariat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang / bulan	207	orang / bulan	952	orang / bulan	7.211.156.342,00	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD laporan	15	laporan	5	laporan	9.000.000,00	Sekretariat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	199	orang	85	orang	18.500.000,00	Sekretariat
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang	27	orang	5	orang	18.500.000,00	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	21	paket	7	paket	471.500.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	15.000.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	120.000.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	6.500.000,00	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	30.000.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	45.000.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen	3	dokumen	1	dokumen	5.000.000,00	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan	3	laporan	1	laporan	250.000.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan	9	laporan	3	laporan	7.695.714.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan	3	laporan	1	laporan	203.628.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan laporan	3	laporan	1	laporan	25.000.000,00	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan	36	laporan	12	laporan	7.467.086.000,00	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah unit	44	unit	43	unit	521.250.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit	42	unit	42	unit	400.000.000,00	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit	1	unit	1	unit	121.250.000,00	Sekretariat

2. Matriks Renja Perubahan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Magetan Ton	239	Angka	239,00	Ton	56.707.500,00	Bidang Pangan
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Persentase partisipasi OPD pemangku Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten %	100	%	100	%	56.707.500,00	Bidang Pangan
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia unit	3	unit	1	unit	39.108.150,00	Bidang Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik laporan	9	laporan	3	laporan	17.599.350,00	Bidang Pangan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan angka	93	angka	93,65	angka	349.991.200,00	Bidang Pangan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Ketersediaan energy dan kkal/kap/hr	6.309	kkal/kap/hr	6.308	kkal/kap/hr	221.169.300,00	Bidang Pangan
			ketersediaan protein gr/kap/hr	151,06	gr/kap/hr	151,05	gr/kap/hr		
		Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia laporan	3	laporan	1	laporan	36.704.625,00	Bidang Pangan
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan unit	105	unit	50	unit	156.107.500,00	Bidang Pangan
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota laporan	30	laporan	30	laporan	15.000.000,00	Bidang Pangan
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dokumen	18	dokumen	13	dokumen	13.357.175,00	Bidang Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi energi; kkal/kap/hr	1.875	kkal/kap/hr	1.870	kkal/kap/hr	128.821.900,00	Bidang Pangan
			konsumsi protein gr/kap/hr	57,50	gr/kap/hr	57,5	gr/kap/hr		
		Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dokumen	3	dokumen	1	dokumen	15.816.600,00	Bidang Pangan
		Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal laporan	3	laporan	1	laporan	113.005.300,00	Bidang Pangan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan %	100	%	100	%	580.414.015,00	Bidang Pangan
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta FSVA dokumen	3	dokumen	1	dokumen	7.828.615,00	Bidang Pangan
		Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan dokumen	15	dokumen	13	dokumen	7.828.615,00	Bidang Pangan
		Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan %	100	%	100	%	572.585.400,00	
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dokumen	36	dokumen	12	dokumen	531.970.100,00	Bidang Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota laporan	36	laporan	12	laporan	40.615.300,00	Bidang Pangan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan waktu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan %	100	%	100	%	32.059.725,00	Bidang Pangan
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota bulan	36	bulan	12	bulan	32.059.725,00	Bidang Pangan
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dokumen	9	dokumen	7	dokumen	17.558.225,00	Bidang Pangan
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan laporan	36	laporan	12	laporan	14.501.500,00	Bidang Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan %	100	%	100	%	54.841.185,00	Bidang Tata Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun dokumen	4	dokumen	1	dokumen	50.841.185,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota dokumen	3	dokumen	1	dokumen	50.841.185,00	Bidang Tata Lingkungan
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun dokumen	6	dokumen	1	dokumen	4.000.000,00	Bidang Tata Lingkungan
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun dokumen	6	dokumen	1	dokumen	4.000.000,00	Bidang Tata Lingkungan
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan baku mutu air %	100	%	100	%	278.848.860,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
			Persentase pemenuhan baku mutu udara %	100	%	100	%		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dokumen	6	dokumen	2	dokumen	40.279.060,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dokumen	3	dokumen	1	dokumen	15.853.250,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan dokumen	3	dokumen	1	dokumen	24.425.810,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	9	laporan	2	laporan	46.401.150,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan laporan	6	laporan	1	laporan	11.790.350,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan titik	3	titik	1	titik	34.610.800,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dokumen	6	dokumen	2	dokumen	192.168.650,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan dokumen	6	dokumen	2	dokumen	192.168.650,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik %	100	%	100	%	2.145.761.700,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	15	laporan	5	laporan	2.145.761.700,00	Bidang Tata Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun dokumen	4	dokumen	1	dokumen	85.262.200,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha	41	Ha	41,7	Ha	1.189.848.950,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit	53	Unit	54	Unit	711.182.500,00	Bidang Tata Lingkungan
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Unit	12	Unit	4	Unit	159.468.050,00	Bidang Tata Lingkungan
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang diselesaikan %	100	%	100	%	26.328.080,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 dokumen	6	dokumen	2	dokumen	18.334.100,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dokumen	3	dokumen	1	dokumen	8.601.300,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 laporan	3	laporan	1	laporan	9.732.800,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota laporan	9	laporan	1	laporan	7.993.980,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya dokumen	9	dokumen	1	dokumen	7.993.980,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) %	100	%	100	%	25.409.600,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan laporan	6	laporan	2	laporan	25.409.600,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau IzinPPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan dokumen	3	dokumen	1	dokumen	7.283.500,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi badan usaha	71	badan usaha	11	badan usaha	18.126.100,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH %	100	%	100	%	5.570.400,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH lokasi	3	lokasi	1	lokasi	5.570.400,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH dokumen	3	dokumen	1	dokumen	5.570.400,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat %	100	%	100	%	109.335.300,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata dokumen	64	dokumen	10	dokumen	109.335.300,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan dokumen	45	dokumen	8	dokumen	73.196.250,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH lembaga	4	lembaga	2	lembaga	36.139.050,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup %	100	%	100	%	18.756.050,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan	12	kegiatan	1	kegiatan	18.756.050,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas	12	Entitas	1	Entitas	18.756.050,00	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup %	100	%	100	%	12.406.200,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota dokumen	3	dokumen	1	dokumen	12.406.200,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani pengaduan	30	pengaduan	8	pengaduan	12.406.200,00	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola %	100	%	100	%	2.093.444.101,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan Laporan	36	laporan	12	laporan	2.088.486.886,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kelompok	460	Kelompok	430	Kelompok	45.170.325,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada dokumen	3	dokumen	1	dokumen	27.392.450,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir unit	49	unit	1	unit	279.946.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan dokumen	3	dokumen	1	dokumen	8.845.250,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Unit	123	unit	41	unit	1.703.132.361,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah laporan	36	laporan	12	laporan	24.000.500,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Dokumen	3	dokumen	1	dokumen	4.957.215,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota laporan	3	laporan	1	laporan	4.957.215,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Angka	78,50	Indeks	82,7	Indeks	15.732.808.991,96	Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen	54	dokumen	18	dokumen	57.255.350,00	Sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen	33	dokumen	11	dokumen	42.093.400,00	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	21	laporan	7	laporan	15.161.950,00	Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	95	%	94	%	7.242.016.851,96	Sekretariat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang / bulan	207	orang / bulan	952	orang / bulan	7.235.911.601,96	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD laporan	15	laporan	5	laporan	6.105.250,00	Sekretariat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	199	orang	85	orang	16.500.000,00	Sekretariat
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang	27	orang	5	orang	16.500.000,00	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	21	paket	7	paket	449.667.090,00	Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	15.000.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	283.493.991,00	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	6.500.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	14.400.559,00	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	3	paket	1	paket	31.452.540,00	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen	3	dokumen	1	dokumen	5.820.000,00	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan	3	laporan	1	laporan	93.000.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan	9	laporan	3	laporan	7.592.553.100,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan	3	laporan	1	laporan	178.638.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan laporan	3	laporan	1	laporan	28.000.000,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan	36	laporan	12	laporan	7.385.915.100,00	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah unit	44	unit	43	unit	374.816.600,00	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra 2024 - 2026		Target Renja 2025		Pagu Anggaran	Bidang Penanggung jawab
				Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit	42	unit	42	unit	250.000.000,00	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit	1	unit	1	unit	124.816.600,00	Sekretariat

D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN

Jalan Teuku Umar No 48 Magetan Kode Pos 63319
Telepon (0351) 895180
Email: dlh@magetan.go.id website : www.dlh.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : NIZHAMUL, S.E, M.M
Jabatan : Pj. Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama.

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

NIZHAMUL, S.E, M.M

Pihak Pertama,

SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721222 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	64,5%
		Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	100%
		Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan	100%
3.	Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	Persentase kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	55%
4.	Terpenuhinya Kebutuhan pangan Secara optimal	Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan	6.310 kkal/kap/hr
		Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan	151,05 gr/kap/hr
5.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	93,65
6.	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	93,18
		Indeks kepuasan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	83,05

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp. 65.725.000	-
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 301.242.000	-
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 518.104.000	-
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 43.918.000	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.651.740.342	-
6.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 65.400.000	-
7.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 355.851.210	-

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
8.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 2.202.617.000	-
9.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 67.412.000	-
10.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 40.950.000	-
11.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp. 16.800.000	-
12.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 162.600.000	-
13.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 25.250.000	-
14.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 22.950.000	-
15.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 6.045.411.000	-
JUMLAH		Rp. 25.585.970.552	

Magetan, 13 Januari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PANGAN



Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN

Jalan Teuku Umar No. 48 Magetan, Jawa Timur 63319,
Telepon (0351) 895180,
Laman dlh.magetan.go.id, Pos-el dlh@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.
Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magetan, November 2025



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.



SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212221993031005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	69,88
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,88
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,33
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	72,420
2.	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	110%
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	7,81
		Skor PPH Konsumsi	93,90
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	93,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	83,03

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	56.707.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	349.991.200	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	580.414.015	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	32.059.725	Dana Alokasi Umum (DAU)
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.732.808.991,96	Dana Alokasi Umum (DAU)
6.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	54.841.185	Dana Alokasi Umum (DAU)
7.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	278.848.860	Dana Alokasi Umum (DAU)
8.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.145.761.700	Dana Alokasi Umum (DAU)
9.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	26.328.080	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Program	Anggaran	Keterangan
10.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	25.409.600	Dana Alokasi Umum (DAU)
11.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	5.570.400	Dana Alokasi Umum (DAU)
12.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	109.335.300	Dana Alokasi Umum (DAU)
13.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	18.756.050	Dana Alokasi Umum (DAU)
14.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.406.200	Dana Alokasi Umum (DAU)
15.	Program Pengelolaan Persampahan	2.093.444.101	Dana Alokasi Umum (DAU)

Magetan, November 2025



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN

SAIF MUHLISSUN, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212221993031005

E. Pengukuran Kinerja



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**

**SATUAN KERJA :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tripandita No. 17 Magetan, Jawa Timur 63391
Telepon (0351) 897113, Laman inspektorat.magetan.go.id, Pos-el inspektorat@magetan.go.id

Nomor : 700/~~350~~/403.060/2025

26 Juni 2025

Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
Kabupaten Magetan
Di

M A G E T A N

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, dengan uraian sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melaksanakan evaluasi AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/26.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/29.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/26.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/36.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/29.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan ruang lingkup, meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
2. Penilaian pengukuran kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi dan teknik evaluasi AKIP adalah sebagai berikut :

1. Metodologi dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam evaluasi.
2. Teknik evaluasi AKIP
 - a) Pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan meminta kelengkapan dokumen SAKIP kepada masing - masing Perangkat Daerah dengan mengirimkan softcopy ke alamat : <https://si-ksatria.magetan.go.id/> dan pengecekan dokumen yang diupload melalui : <http://esr.menpan.go.id>
 - b) Tim evaluator melakukan evaluasi sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan Aplikasi Si Ksatria diakses melalui <https://si-ksatria.magetan.go.id/>

- c) Tim evaluator juga melaksanakan desk evaluasi dengan wawancara kepada beberapa Perangkat Daerah dalam rangka penajaman evaluasi.

F. Evaluator Internal

Evaluasi internal atas implementasi SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

G. Interval Nilai AKIP

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan Kategori Predikat untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang sangat dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik,

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. HASIL EVALUASI AKIP

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan menilai terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil evaluasi AKIP untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	28,63	27,93
2	Pengukuran Kinerja	30%	28,25	29,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	14,40	14,28
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,88	22,14
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	93,15	93,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	AA
	Interpretasi		Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan

Sesuai hasil evaluasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan telah mendapatkan nilai **93,35** dengan predikat **AA** atau **Sangat Memuaskan**. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) *Cascading* untuk sasaran "Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan " belum disusun.
- 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja kurang menantang. Terdapat penurunan target pada Angka Kecukupan Energi (AKE)

tingkat ketersediaan, Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan dari realisasi tahun sebelumnya.

- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai pada dokumen *Cascading* terkait sasaran "Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan yang belum digambarkan.
 - 4) Rencana aksi 2025 yang disusun hanya menjelaskan program/kegiatan/subkegiatan beserta indikator yang mendukung setiap sasaran OPD. Belum terdapat rencana aksi/ langkah yang nyata dari hasil evaluasi kinerja tahun 2024. Rencana Aksi telah disusun namun tidak ada penjelasan mengenai penelaahan kendala/permasalahan dalam pelaksanaan yang akan dihadapi secara lengkap;
 - 5) Satuan kerja dan pegawai belum begitu memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai 100% terkait Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan dan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan.
- b. Pengukuran Kinerja
- 1) Pengukuran kinerja belum seluruhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. Pada Perubahan Renja 2024 sub bab 2.2, belum dilakukan penelaahan terhadap permasalahan yang dihadapi dan solusinya;
 - 2) Satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai 100% terkait Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan dan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan;
 - 3) Setiap pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai terkait Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan dan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP 2024) telah disusun sesuai standar yaitu telah sesuai dengan sistematika dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, namun masih butuh perbaikan dalam penyajian informasi. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP 2024) telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya namun belum seluruhnya. Kemudian atas hambatan dan alternatif solusi, berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 belum seluruhnya dituangkan kedalam Rencana Aksi 2025.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP 2024) telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) yaitu pada tabel 4.2 namun belum seluruhnya. Rencana aksi yang disusun untuk perbaikan kinerja pada tabel 4.2. Untuk indikator "Nilai SAKIP", belum memasukkan rekomendasi yang selaras dengan LHE SAKIP 2024;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi / nasional / internasional (Benchmark Kinerja). Namun pada Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional yang diuraikan hanya pada sasaran Terpenuhinya Kebutuhan pangan secara optimal
- 4) Informasi dalam laporan kinerja belum seluruhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Masih terdapat target kinerja yang belum tercapai;
- 5) Informasi dalam laporan kinerja tidak selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Masih terdapat target kinerja yang belum tercapai.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi belum menginformasikan permasalahan dan solusi yang dihadapi serta realisasi waktu pelaksanaannya;
- 2) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan secara optimal serta belum merumuskan seluruh kemajuan pelaksanaan, kendala dan solusi sehingga masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai;

- 3) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas namun belum maksimal;
- 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum maksimal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai terkait Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan dan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan.
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada beberapa capaian kinerja. Namun masih terdapat penurunan realisasi pada Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan, Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan 146 gr/kap/hr dari realisasi tahun sebelumnya 157,31 gr/kap/hr.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Menyusun *Cascading* untuk sasaran "Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan " dan dilengkapi pembagian kinerja tiap level jabatan;
- 2) Melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja antara *Cascading*, Perjanjian Kinerja, dan SKP setiap level jabatan, untuk seluruh pegawai;
- 3) Melakukan perubahan Rencana aksi 2025 yang berisikan rencana aksi/langkah yang nyata dalam rangka peningkatan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024;
- 4) Meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Aksi. Rencana aksi sebagai langkah nyata yang dapat dilaksanakan dan telah disepakati oleh satuan kerja untuk mengatasi permasalahan utama yang mungkin dihadapi dalam pencapaian target kinerja (Surat Komitmen Kepala OPD);

- 5) Terkait tidak tercapainya target indikator sasaran “Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan” dan “Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan”:
 - a) Melakukan pembahasan dengan seluruh pegawai dan *stakeholder* terkait (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan);
 - b) Melakukan identifikasi atas permasalahan/hambatan nyata dalam pencapaian target indikator sasaran (hasil identifikasi permasalahan);
 - c) Menyusun rencana aksi terkait langkah-langkah nyata yang harus diambil dan dapat dilaksanakan untuk mencapai target indikator tersebut (Rencana Aksi);
 - d) Meningkatkan komitmen dalam pencapaian target kinerja (Surat Komitmen Kepala OPD);
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Meningkatkan aktivitas dalam mencapai kinerja, dengan:
 - a) melakukan identifikasi masalah beserta alternatif solusinya dan mencantumkan pada Perubahan Renja sub bab 2.2
 - b) meningkatkan komitmen untuk kedepan melakukan penyesuaian atas aktivitas dan strategi pada dokumen Rencana Aksi dan dokumen perubahan Renja (Surat Komitmen Kepala OPD);
 - 2) Menghimbau seluruh pegawai untuk lebih peduli dan meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati dalam pencapaian target indikator sasaran serta melakukan pembahasan dengan seluruh pegawai terkait permasalahan dan langkah nyata yang akan dilakukan untuk memudahkan pengukuran dan pencapaian target kinerja (Berita Acara/Notulen Rapat pembahasan).
- c. Pelaporan Kinerja
 - 1) Meningkatkan komitmen dalam menyusun laporan kinerja yang lebih berkualitas (Surat Komitmen Kepala OPD);
 - 2) Melakukan perbaikan dokumen Laporan Kinerja (LKjIP 2024) sebagai berikut:

- a) Agar memberikan penjelasan yang lebih lengkap terkait permasalahan dan hambatan terkait pencapaian kinerja sasaran dan program yang belum tercapai;
 - b) Melengkapi tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain, dengan indikator sasaran lainnya yang dapat diperbandingkan;
 - c) menambahkan penyebab kegagalan indikator "Nilai SAKIP", dengan menyajikan seluruh temuan/catatan dalam LHE SAKIP 2024;
 - d) Melakukan perbaikan pada tabel 4.2. Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 terkait informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan khususnya pada Nilai SAKIP.
- 3) Melakukan rapat pembahasan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang melibatkan seluruh pegawai dan mendokumentasikannya;
 - 4) Meningkatkan komitmen terhadap perbaikan budaya kinerja organisasi dengan memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja (Surat Komitmen Kepala OPD).
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1) Meningkatkan pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi untuk memastikan evaluasi tersebut menginformasikan permasalahan, solusi serta memastikan ketepatan waktu pelaksanaan rencana aksi;
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi untuk mengendalikan kinerja;
 - 3) Meningkatkan pemantauan berkala terkait Evaluasi Rencana Aksi serta menyajikan progress, kendala/hambatan dan alternatif solusi yang dilaksanakan secara lebih lengkap;
 - 4) Meningkatkan komitmen untuk peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal (Surat Komitmen Kepala OPD);
 - 5) Meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka mendukung perbaikan dan Meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja (Surat Komitmen Kepala OPD).

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami berharap agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP kedepannya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

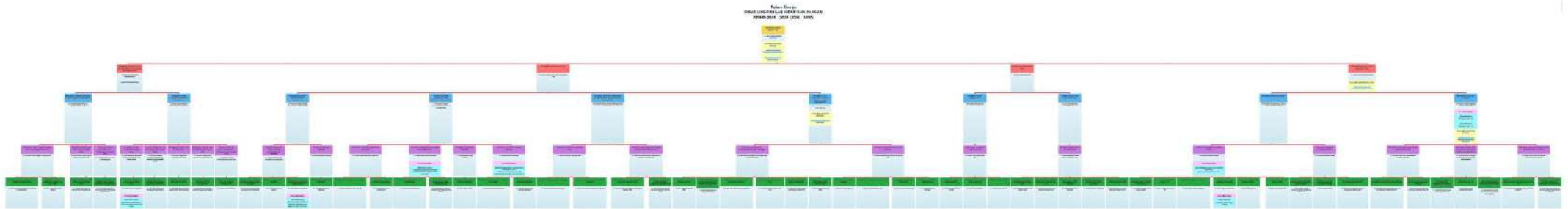
**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**



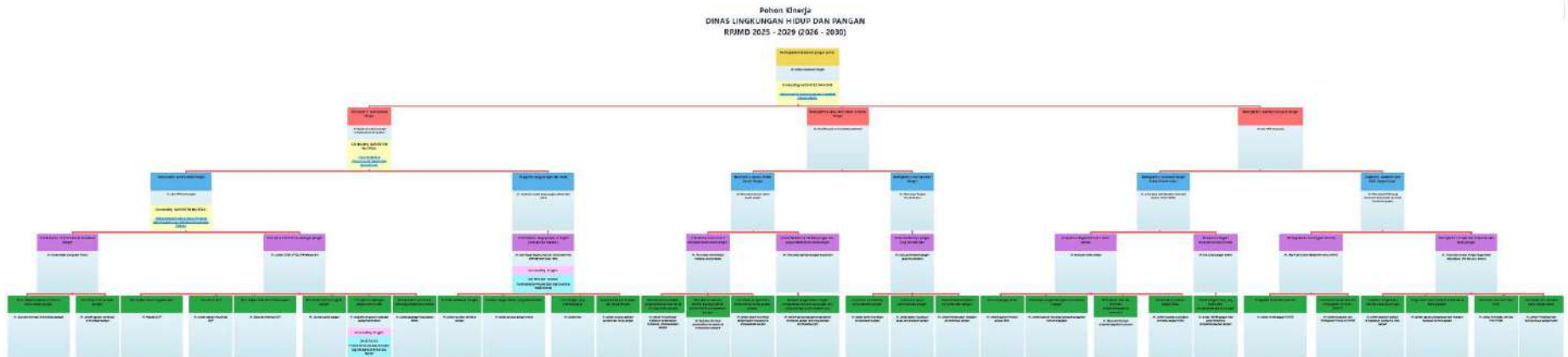
ARN WIDYATMOKO, S.E., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 198603 1001

F. Pohon Kinerja

a. Pohon Kinerja Urusan Lingkungan Hidup



b. Pohon Kinerja Urusan Lingkungan Hidup



Secara Lengkap dapat dilihat pada link <https://si-ksatria.magetan.go.id/>

G. Rencana Aksi tahun 2026

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)							Indeks	79.17	0	0	0	79.17	79.17	0	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)							Indeks	80.98	0	0	0	80.98	80.98	0
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)							Indeks	54.63	0	0	0	54.63	54.63	0
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]							Indeks	72.430	0	0	0	72.430	72.430	0
1.1			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase tutupan lahan/vegetasi					%	64.5	64.5	64.5	64,5	64,5	64,5	0	
1.1.1					Tersusunnya data kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)	Jumlah laporan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)			Laporan	3	0	0	0	3	3	449.910.000,00	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.1.1.1							Tersedianya data administrasi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah laporan administrasi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Laporan	3	0	0	0	3	3	0
1.1.2					Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			Laporan	12	3	3	3	3	12	466.101.315,00
1.1.2.1							Tersedianya dokumen administrasi sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Dokumen	12	3	3	3	3	12	0
1.1.2.2							Tersedianya data kendaraan dan peralatan kerja wilayah I	Jumlah laporan hasil inventarisasi kendaraan dan peralatan kerja wilayah I	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
1.1.2.3							Tersedianya data kendaraan	Jumlah laporan hasil	Laporan	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							dan peralatan kerja wilayah II	inventarisasi kendaraan peralatan kerja wilayah II								
1.1.2.4							Tersedianya data kendaraan dan peralatan kerja Tim III	Jumlah laporan kondisi kendaraan dan peralatan kerja Tim III	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
1.1.2.5							Tersedianya data kendaraan dan peralatan kerja Tim VI	Jumlah laporan kondisi kendaraan dan peralatan kerja Tim VI	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
1.1.2.6							Tersedianya data kendaraan dan peralatan kerja Tim Perapian Pohon	Laporan kondisi kendaraan dan peralatan kerja Tim Perapian Pohon	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
1.1.2.7							Tersedianya data Stok Opname Peralatan Kerja pemeliharaan keanekaragaman Hayati	Jumlah laporan data Stok Opname Peralatan Kerja pemeliharaan	Laporan	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIK KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
								keanekaragaman Hayati									
1.1.3					Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Jumlah Laporan pengelolaan RTH			Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.1.3.1							Tersedianya data capaian target pemeliharaan RTH dan Hutan Kota Tim III	Jumlah laporan capaian target pemeliharaan RTH dan Hutan Kota Tim III	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.1.3.2							Tersedianya data capaian target pemeliharaan RTH dan Hutan Kota Tim VI	Jumlah laporan capaian target pemeliharaan RTH dan Hutan Kota Tim VI	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.1.3.3							Tersedianya data perijinan Perapian dan penebangan pohon	Jumlah laporan pelaksanaan perapian dan penebangan pohon	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.1.3.4							Tersedianya data penggunaan Hutan Kota	Jumlah laporan penggunaan Hutan Kota	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							dan Alun alun	dan Alun Alun								
1.1.3.5							Tersedianya data capaian target pemeliharaan RTH Jalur Hijau dan Hutan Kota wilayah I	Jumlah laporan capaian target pemeliharaan RTH Jalur Hijau dan Hutan Kota Wilayah I	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
1.1.3.6							Tersedianya data capaian target pemeliharaan RTH Jalur Hijau dan Hutan Kota wilayah II	Jumlah laporan capaian target pemeliharaan RTH Jalur Hijau dan Hutan Kota Wilayah II	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
1.1.3.7							Tersedianya data absensi dan dokumentasi pekerjaan petugas pranata taman	Jumlah laporan rekapitulasi absensi dan laporan kinerja petugas pranata taman	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
1.1.3.8							Tersedianya data luas RTH	Jumlah data pendukung luas RTH yang dikelola	Laporan	1	1	0	0	0	1	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
1.1.4					Tersusunnya data peningkatan tutupan lahan di luar kawasan hutan	Jumlah laporan peningkatan kualitas tutupan lahan			Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.1.4.1							Tersedianya data penanaman di Kab. Magetan	Jumlah laporan penanaman di Kab. Magetan	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.1.4.2							Tersedianya data mutasi bibit kebun bibit kehati	Jumlah laporan mutasi bibit di kebun bibit kehati	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.1.4.3							Tersedianya data inventarisasi tutupan lahan	Jumlah laporan inventarisasi tutupan lahan	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.1.5					Tersusunnya hasil monev tutupan lahan di luar kawasan hutan	Jumlah laporan monev tutupan lahan			Laporan	1	1	0	0	0	1	0	
1.1.6					Tersusunnya laporan monev RTH	Jumlah laporan monev RTH			Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.2			Meningkatnya tata kelola pengembangan dan perlindungan dan	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan					%	100	0	100	0	0	100	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
			pengelolaan lingkungan hidup	lingkungan hidup yang diselesaikan													
1.2.1					Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			Dokumen	1	0	1	0	0	1	62.475.150,00	
1.2.1.1							Tersedianya data profil kabupaten Magetan	Jumlah data profil kabupaten Magetan	Laporan	1	1	0	0	0	1	0	
1.2.1.2							Tersedianya data-data tabel SLHD matra perubahan iklim (4 tabel) dan matra risiko bencana (5 tabel)	Jumlah data-data tabel SLHD matra perubahan iklim (4 tabel) dan matra risiko bencana (5 tabel)	Laporan	1	1	0	0	0	1	0	
1.2.1.3							Tersedianya data kondisi ekologis, D3TLH, KLHS	Jumlah data kondisi ekologis, D3TLH, KLHS	Laporan	1	1	0	0	0	1	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.2.1.4							Tersedianya data-data tabel SLHD matra kulit air (9 tabel) dan kulit udara (6 tabel)	jumlah data-data tabel SLHD matra kulit air (9 tabel) dan kulit udara (6 tabel)	Laporan	1	1	0	0	0	1	0
1.2.1.5							Tersedianya data-data tabel SLHD matra lahan dan hutan (14 tabel) dan pengelolaan sampah dan limbah (5 tabel)	Jumlah data-data tabel SLHD matra lahan dan hutan (14 tabel) dan pengelolaan sampah dan limbah (5 tabel)	Laporan	1	1	0	0	0	1	0
1.2.1.6							Tersedianya dokumen KAK dan data personil Tim SLHD serta draft SK Tim	Jumlah laporan KAK, data personil Tim SLHD serta draft SK Tim	Laporan	1	1	0	0	0	1	0
1.2.1.7							Tersedianya data-data tabel SLHD matra keanekaragaman hayati (8 tabel) dan tabel pendukung (18 tabel)	Jumlah data-data tabel SLHD matra keanekaragaman hayati (8 tabel) dan tabel pendukung (18 tabel)	Data	1	1	0	0	0	1	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		13				14	15	16	17	18		24
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
1.2.1.8							Tersedianya data analisis DPSIR untuk delapan matra	Jumlah data analisis DPSIR untuk delapan matra	Data	1	1	0	0	0	1	0	
1.2.1.9							Tersedianya kelengkapan pelaksanaan FGD isu prioritas	Jumlah laporan kelengkapan pelaksanaan FGD isu prioritas	Laporan	1	1	0	0	0	1	0	
1.2.1.10							Tersedianya data ringkasan eksekutif	Jumlah data ringkasan eksekutif	Data	1	0	1	0	0	1	0	
1.2.2					Terlaksananya monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan lingkungan hidup			Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
1.2.2.1							Tersedianya data monev dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah data monev dokumen perencanaan lingkungan hidup	Laporan	6	3	1	0	2	6	0	
1.2.2.2							Tersedianya data monev dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah data monev dokumen perencanaan lingkungan hidup	Laporan	6	0	2	3	1	6	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
								hidup									
1.3			Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu air					%	100	100	100	100	100	100	0	
				Persentase pemenuhan baku mutu udara					%	100	100	100	100	100	100	0	
1.3.1					Terlaksananya Penghentian Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			Titik	1	0	0	0	1	1	34.022.950,00	
1.3.1.1							Menyiapkan Pelaksanaan Penghentian Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Data Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Data	20	5	5	5	5	20	0	
1.3.2					Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan			Laporan	1	0	0	0	1	1	24.000.000,00	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
					Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan											
1.3.2.1							Menyiapkan Pelaksanaan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Bahan	4	1	1	1	1	4	0	
1.3.3					Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Dokumen	1	0	0	0	1	1	20.000.000,00	
1.3.3.1							Membantu penyusunan Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Jumlah laporan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Laporan	4	1	1	1	1	4	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
							Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	an Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
1.3.4					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			Dokumen	1	0	0	0	1	1	30.589.550,00	
1.3.4.1							Menyiapkan data inventarisasi sumber emisi	Jumlah data inventarisasi sumber emisi	Data	20	5	5	5	5	20	0	
1.3.5					Terlaksananya Pembinaan Program Kampung/ Komunitas Iklim	Jumlah Desa/ Kelurahan yang dilakukan Pembinaan Proklam			Desa/ Kelurahan	3	0	0	0	3	3	0	
1.3.5.1							Membantu pelaksanaan pembinaan Program Kampung/ Komunitas Iklim	Jumlah Laporan pembinaan Program Kampung/ Komunitas Iklim	Laporan	4	1	1	1	1	4	0	
1.3.6					Terlaksananya	Jumlah			Dokumen	2	0	0	0	2	2	95.400.000,00	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan											
1.3.6.1							Menyiapkan pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara	Jumlah data pemantauan kualitas air dan udara	Data	8	2	2	2	2	8	0	
1.4			Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase penyelesaian dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)					%	100	100	100	100	100	100	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIK KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			POKIN LEVEL 5							
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
1.4.1					Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)			Dokumen	1	0	0	0	1	1	15.000.000,00	
1.4.1.1							Melaksanakan monev dan menyiapkan BA monev pengelolaan limbah B3 yang bukan wewenang pemerintah kabupaten	Jumlah data monev dan BA monev	Data	12	3	3	3	3	12	0	
1.4.1.2							Menginventaris dan menyiapkan laporan terkait lahan terkontaminasi limbah B3	Jumlah data terkait lahan terkontaminasi limbah B3	Data	12	3	3	3	3	12	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIKIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
1.4.1.3							Terlaksananya laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah data pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan	Data	4	1	1	1	1	4	0	
1.4.1.4							Membuat laporan pengelolaan sampah B3 di FPSS	Jumlah data pengelolaan limbah B3 di FPSS	Data	12	3	3	3	3	12	0	
1.4.2					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan			Dokumen	1	0	0	0	1	1	7.250.000,00	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
					Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya										
1.4.2.1							Menyiapkan laporan penanganan kedaruratan pengelolaan limbah B3	Jumlah data penanganan kedaruratan pengelolaan B3 dan limbah B3	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.5			Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat					%	100	25	25	25	25	100	0
1.5.1					Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			Dokumen	8	0	3	0	5	8	65.375.000,00

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4												
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
1.5.1.1							Tersedianya data Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah data Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten dan Provinsi	Data	10	0	5	0	5	10	0	
1.5.1.2							Tersedianya data Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup tingkat Nasional	Jumlah data Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup tingkat Nasional	Data	10	0	5	0	5	10	0	
1.5.2					Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			Lembaga	2	0	0	0	2	2	36.250.000,00	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
					kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya											
1.5.2.1							Tersedianya data jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Tersedianya data jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Data	2	0	1	0	1	2	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
1.6			Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup					%	100	0	50	0	50	100	0	
1.6.1					Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			Entitas	1	0	0	0	1	1	62.500.000,00	
1.6.1.1							Tersedianya data Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah data Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Data	4	0	2	0	2	4	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
							Hidup	n Lingkungan Hidup									
1.7			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah					%	84	84	84	84	84	84	0	
1.7.1					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.			Dokumen	1	0	0	0	1	1	15.785.250,00	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIK KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
					Sampah dan Mengacu pada Jakstrada											
1.7.1.1							Menyiapkan, mengumpulkan dan mengupload dokumen ke INODA	Jumlah data kegiatan	Data	1	1	0	0	0	1	0
1.7.1.2							Menyiapkan, mengumpulkan dan mengupload dokumen ke INODA	Jumlah data kegiatan	Data	1	1	0	0	0	1	0
1.7.1.3							Menyiapkan, mengumpulkan dan mengupload dokumen ke INODA	Jumlah data kegiatan	Data	1	1	0	0	0	1	0
1.7.2					Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			Unit	41	41	41	41	41	41	1.295.557.300,00
1.7.2.1							Terlaksananya perawatan rutin peralatan pengelolaan sampah di Rumah kompos	Jumlah data peralatan pengelolaan sampah di Rumah kompos yang terpelihara dengan baik	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.7.2.2							Melakukan perawatan rutin peralatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk	Jumlah data peralatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk yang terpelihara dengan baik	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.3							Terlaksananya inventarisasi barang pengelolaan sampah	Jumlah data inventarisasi barang pengelolaan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.4							Melaksanakan perawatan rutin kendaraan pengangkut sampah	Jumlah data kendaraan pengangkut sampah yang beroperasi dengan baik	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.5							Melaksanakan perawatan TPA Milangasri Magetan	Jumlah data perawatan TPA Milangasri Magetan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.6							Melaksanakan pencatatan volume sampah yang masuk ke TPA Milangasri Magean	Jumlah data volume sampah yang masuk ke TPA	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.7.2.7							Terlaksananya laporan rekapitulasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah data SKRD	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.8							Terlaksananya laporan Buku Kas Umum penerimaan retribusi	Jumlah data BKU	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.9							Terlaksananya laporan Surat Tanda Setoran penerimaan retribusi	Jumlah data STS	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.10							Terlaksananya laporan realisasi penerimaan PAD	Jumlah data realisasi penerimaan PAD	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.11							Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan tribulan PAD	Jumlah data rekonsiliasi	Data	4	1	1	1	1	4	0
1.7.2.12							Terlaksananya pemantauan kegiatan pengelolaan sampah	Jumlah data kegiatan pemantauan pengelolaan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.7.2.13							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.14							Melakukan pengecekan peralatan yang rusak dan mengatur pemeliharaan suatu alat berat pengangkutan sampah	Jumlah data kondisi alat berat pengangkutan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.15							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
								persampahan								
1.7.2.16							Melakukan pengecekan peralatan yang rusak dan mengatur pemeliharaan suatu alat berat pengangkutan sampah	Jumlah data kondisi alat berat pengangkutan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.17							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.18							Melakukan pengecekan peralatan yang rusak dan mengatur pemeliharaan	Jumlah data kondisi alat berat pengangkutan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4												
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
							suatu alat berat pengangkutan sampah										
1.7.2.19							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0	
1.7.2.20							Mengadminis trasi teknis pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor	Jumlah data administrasi pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor roda tiga	Data	12	3	3	3	3	12	0	
1.7.2.21							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan	Data	12	3	3	3	3	12	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							prasarana persampahan	menjaga keamanan sarana prasarana persampahan								
1.7.2.22							Melakukan pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan monitoring pengelolaan sampah ke wajib retribusi	Jumlah data pendistribusian SKRD	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.23							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.24							Merekapitulasi volume sampah yang masuk ke TPA	Jumlah data volume sampah yang masuk ke TPA	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							Milangasri Magetan									
1.7.2.25							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.26							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.7.2.27							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.28							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.29							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							sarana prasarana persampahan	dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan								
1.7.2.30							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.31							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.7.2.32							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.33							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.34							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							sarana prasarana persampahan	dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan								
1.7.2.35							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.36							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.7.2.37							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.38							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.39							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							sarana prasarana persampahan	dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan								
1.7.2.40							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.41							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.7.2.42							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.43							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.44							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							sarana prasarana persampahan	dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan								
1.7.2.45							Menyusun laporan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah data SKRD	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.46							Meregister Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah data surat SKRD	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.47							Terlaksananya laporan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain	Jumlah data pembinaan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.48							Mendokumentasikan pemeriksaan angkutan sampah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah data pemeriksaan angkutan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIKIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							agar tertib admistrasi									
1.7.2.49							Mendokumentasikan perawatan angkutan sampah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib admistrasi	Jumlah data perawatan angkutan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.50							Mendokumentasikan pemeriksaan peralatan pengolahan sampah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib admistrasi	Jumlah data pemeriksaan peralatan pengolahan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.51							Mendokumentasikan perawatan peralatan pengolahan sampah sesuai dengan prosedur dan	Jumlah data perawatan peralatan pengolahan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							ketentuan yang berlaku, agar tertib admistrasi									
1.7.2.52							Terlaksananya laporan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah	Jumlah data sistem tanggap darurat pengelolaan sampah	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.53							Terlaksananya laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain	Jumlah data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.54							Terlaksananya laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kebersihan jalan	Jumlah data pelaksanaan tugas penyelenggaraan kebersihan jalan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
1.7.2.55							Menerima dan mengiveterisasi data kegiatan penyelenggaraan kebersihan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut	Jumlah data kegiatan penyelenggaraan kebersihan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.56							Menyusun laporan checklist peralatan operasional persampahan	Jumlah data peralatan operasional persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.2.57							Melaksanakan kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Jumlah data kegiatan kebersihan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan menjaga keamanan sarana prasarana persampahan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.3					Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian,	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat			Kelompok	440	110	110	110	110	440	151.456.200,00

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
					dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat										
1.7.3.1							Melaksanakan penyebaran informasi, mendokumentasikan, mendesain dan membuat media publikasi	Jumlah data dokumentasi kegiatan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.3.2							Melaksanakan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah data POKMAS	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.3.3							Melaksanakan pelatihan/pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga	Jumlah data pelatihan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.7.3.4							Menyiapkan kegiatan pembinaan pengelolaan	Jumlah data pembinaan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
							sampah rumah tangga										
1.7.3.5							Menerima, mencatat dan menyimpan dokumen surat menyurat Bidang PSLB3	Jumlah data surat menyurat bidang PSLB3	Data	12	3	3	3	3	12	0	
1.7.4					Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			Laporan	12	3	3	3	3	12	15.000.000,00	
1.7.4.1							Melaksanakan pencatatan hasil pemilahan dan pengolahan sampah organik	Jumlah data Volume sampah organik yang diolah	Data	12	3	3	3	3	12	0	
1.7.5					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kot	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan			Laporan	1	0	0	0	1	1	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
					a yang Dilaksanakan	Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota										
1.7.5.1							Terlaksananya kualitas pemilahan dan pengolahan sampah	jumlah data monev pemenuhan target dan standart pelayanan pengelolaan sampah	data	4	1	1	1	1	4	0
1.7.5.2							Menyiapkan laporan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan gladi kedaruratan pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah data evaluasi pelaksanaan pelatihan dan gladi kedaruratan pengelolaan B3 dan limbah B3	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.8			Terlaksananya pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH	Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH					%	100	0	0	25	75	100	0
1.8.1					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi			Dokumen	1	0	0	0	1	1	9.375.000,00

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4												
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
					Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH											
1.8.1.1							Tersedianya data Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Terkait dengan PPLH	Jumlah data Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Terkait dengan PPLH	Data	1	0	0	0	1	1	0	
1.9			Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan					%	100	25	25	25	25	100	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AKHIR					
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		AWAL					TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
				oleh Pemerintah Daerah												
1.9.1					Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			Dokumen	1	0	0	0	1	1	7.625.000,00
1.9.1.1							Tersedianya data Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Lingkungan	Jumlah data Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Lingkungan	Data	12	3	3	3	3	12	0
1.9.2					Terlaksananya Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			Badan Usaha	15	0	5	5	5	15	24.218.750,00

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
					oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
1.9.2.1							Tersedianya data persiapan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPelaksana	Jumlah data persiapan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Data	4	1	1	1	1	4	0
1.10			Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup					%	100	25	25	25	25	100	0
1.10.1					Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat			pengaduan	8	2	2	2	2	8	14.375.000,00

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
					Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola										
1.10.1.1							Tersedianya data penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah data penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Data	8	2	2	2	2	8	0
1.10.1.2							Terlaksananya data verifikasi pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah data verifikasi pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Data	8	2	2	2	2	8	0
2	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan							%	110	0	0	0	110	110	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
		Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)							Skor	7.50	0	0	0	7.50	7.50	0
		Skor PPH Konsumsi							Skor	94.30	0	0	0	94.30	94.30	0
2.1			Meningkatnya pengawasaan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan					%	100	0	0	0	100	100	0
2.1.1					Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			dokumen	12	3	3	3	3	12	22.000.000,00
2.1.1.1							Tersedianya Data Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Data Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota								
2.1.2					Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			Laporan	12	3	3	3	3	12	15.000.000,00
2.1.2.1							Tersedianya materi koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah materi koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Materi	12	3	3	3	3	12	0
2.2			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan					%	100	0	0	0	100	100	0
2.2.1					Tersusunnya pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			dokumen	1	0	0	0	1	1	15.000.000,00
2.2.1.1							Tersedianya data Peta Ketahanan dan	Jumlah data Peta Ketahanan dan	Data	1	0	0	0	1	1	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
							Kerentanan Pangan (FSVA) dan Peta SKPG	Kerentanan Pangan (FSVA)									
							Jumlah data SKPG	Jumlah data SKPG	Data	12	3	3	3	3	3	12	0
2.2.2					Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen	12	3	3	3	3	12	95.540.000,00	
2.2.2.1							Terlaksananya monitoring CPPD bulanan	Jumlah Laporan Monitoring CPPD	Laporan	12	3	3	3	3	3	12	0
2.2.3					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			Laporan	12	3	3	3	3	12	8.613.500,00	
2.2.3.1							Tersedianya materi koordinasi dan sinkronisasi penanganan	Jumlah materi koordinasi dan sinkronisasi	Materi	12	3	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIKIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
							kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota									
2.3			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Magetan					%	100	0	0	0	100	100	0	
2.3.1					Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			unit	3	0	1	1	1	3	6.850.000,00	
2.3.1.1							Tersedianya data Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah data Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Data	3	0	1	1	1	3	0	
2.4			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan					Skor	93	0	0	0	93	93	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
			masyarakat														
2.4.1					Tersedianya pangan berbasis sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			laporan	4	1	1	1	1	4	15.000.000,00	
2.4.1.1							Tersedianya Data Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Data Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Data	4	1	1	1	1	4	0	
2.4.2					Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan			unit	53	10	13	15	15	53	13.175.000,00	
2.4.2.1							Terlaksananya monitoring LPM dan kios pangan	Jumlah monitoring LPM dan kios pangan	Laporan	50	10	10	15	15	50	0	
2.4.3					Tersedianya Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			laporan	12	3	3	3	3	12	30.000.000,00	
2.4.3.1							Tersedianya laporan pemantauan harga pasar	Jumlah laporan pemantauan harga pasar	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			POKIN LEVEL 5							
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
2.4.4					Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen Prognosa Neraca Pangan Laporan NBM			Dokumen	12	3	3	3	3	12	9.068.000,00	
									Laporan	1	0	0	0	1	1	0	
2.4.4.1							Tersedianya Data Neraca Pangan	Informasi Data Neraca Pangan	Data	12	3	3	3	3	12	0	
2.4.5					Terlaksananya Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			dokumen	1	0	0	0	1	1	5.877.000,00	
2.4.5.1							Tersedianya data skor PPH	Jumlah data skor PPH	Data	12	3	3	3	3	12	0	
2.4.6					Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan koordinasi keanekaragaman konsumsi			Laporan	4	1	1	1	1	4	49.500.000,00	
									Laporan	4	1	1	1	1	4	0	
2.4.6.1							Tersedianya data Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman	Jumlah Data Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	Data	4	1	1	1	1	4	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							aman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekar agaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan	Nilai SAKIP							Nilai	93.36	0	0	0	93.36	93.36	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat							Skor	86.91	0	0	0	86.91	86.91	0
3.1			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran					%	98.10	0	0	0	98.10	98.10	0
				Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan					skor	79.43	0	0	0	79.43	79.43	0
3.1.1					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	13	4	3	0	6	13	20.000.000,00

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4												
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
3.1.1.1							Tersedianya draf analisis data untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah draf analisis data untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.2					Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan	10	3	4	0	3	10	10.000.000,00	
3.1.2.1							Tersedianya data untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.2.2							Tersedianya draf analisis data untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah draf analisis data untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.3					Tersedianya	Jumlah Paket			Paket	12	3	3	3	3	12	6.258.900,00	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AKHIR					
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		AWAL					TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
					Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
3.1.3.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
3.1.4					Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Orang	69	69	69	69	69	69	10.500.000,00
3.1.4.1							Tersedianya Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
3.1.5					Tersedianya Barang dan Jasa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan			Paket	12	3	3	3	3	12	38.092.950,00

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
					Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Kantor yang Disediakan											
3.1.5.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.6					Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Paket	12	3	3	3	3	12	7.555.100,00	
3.1.6.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.7					Tersedianya	Jumlah Laporan			Laporan	12	3	3	3	3	12	10.209.000,00	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4												
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
					Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Kelengkapan Administrasi Pengadaan Logistik Kantor											
3.1.8					Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan			Laporan	12	3	3	3	3	12	21.376.197,00	
3.1.9					Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	12	3	3	3	3	12	79.000.000,00	
3.1.9.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	si Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
3.1.10					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	12	3	3	3	3	12	180.000.000,00
3.1.10.1							Tersedianya Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
3.1.11					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Laporan	12	3	3	3	3	12	26.120.000,00
3.1.1					Terlaksananya	Jumlah Laporan			Laporan	12	3	3	3	3	12	7.857.220.942,

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
2					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										00
3.1.1 2.1							Tersedianya Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Laporan	12	3	3	3	3	12	0
3.1.1 3					Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional			Laporan	42	10	10	10	12	42	126.240.000,00
3.1.1 4					Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	1	0	1	0	0	1	32.523.900,00

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4												
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	
					Perangkat Daerah												
3.1.1 4.1							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi Pemeliharaan Gedung	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.1 4.2							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Administrasi Pemeliharaan Gedung	Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.1 5					Terkelolanya Data Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dikelola			Laporan	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.1 5.1							Tersedianya Kelengkapan Data Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Data Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dikelola	Data	12	3	3	3	3	12	0	
3.1.1 5.2							Tersedianya Kelengkapan Data	Jumlah Data Kepegawai	Data	12	3	3	3	3	12	0	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
							Kepegawaian Perangkat Daerah	an Perangkat Daerah yang Dikelola								
3.1.1 5.3							Tersedianya Kelengkapan Data Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Data Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dikelola	Data	12	3	3	3	3	12	0
3.1.1 6						Tersedianya Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dikelola		Dokumen	12	3	3	3	3	12	0
3.1.1 6.1							Tersedianya Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Data Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Data	12	3	3	3	3	12	0
3.1.1 6.2							Tersedianya Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Data Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Data	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
								Perangkat Daerah								
3.1.1 6.3							Tersedianya Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Data Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Data	12	3	3	3	3	12	0
3.1.1 7					Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/bulan	966	276	276	207	207	966	7.342.922.614,00
3.1.1 7.1							Tersedianya Data Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Data Kelengkapan Pengajuan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Data	143	21	23	17	82	143	0
3.1.1 7.2							Tersedianya Data Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN melalui aplikasi	Jumlah Data SPP/SPM/S P2D Gaji dan Tunjangan ASN	Data	57	14	16	12	15	57	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR OR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/ OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AKHIR					
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		AWAL					TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
3.1.1 8					Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			Laporan	1	1	0	0	0	1	9.000.000,00
					Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah			Laporan	12	3	3	3	3	12	0
3.1.1 8.1							Tersedianya Laporan Kelengkapan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	28	7	7	7	7	28	0
3.1.1 8.2							Tersedianya Dokumen Administratif dan Fungsional Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kelengkapan Dokumen Administratif dan Fungsional Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Laporan	24	6	6	6	6	24	0
3.1.1 8.3							Tersedianya Dokumen Pencairan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kas	Laporan	12	3	3	3	3	12	0

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						RENCANA PAGU
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
3.1.1 8.4							Tersedianya Register SPP/SPM/SP 2D realisasi penyerapan anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Pengajuan SPP UP/GU/LS	Berkas	110	23	25	24	38	110	0
3.1.1 8.5							Tersedianya Rekaputilasi Pajak	Jumlah Laporan Setoran Pajak	Berkas	48	12	12	12	12	48	0
3.1.1 8.6							Tersedianya Laporan Monitoring Pengajuan Panjar	Jumlah Pembayaran Panjar	Berkas	26	5	5	6	10	26	0
3.1.1 8.7							Tersedianya Laporan Rekonsiliasi	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi	Laporan	4	1	1	1	1	4	0

Sumber : <https://si-ksatria.magetan.go.id/>